Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah

Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya, dalam peraturan yang sama pada pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Pembangunan Daerah mengacu pada prinsip-prinsip: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pembangunan Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan dokumen resmi tahunan sebagai tahapan awal penyusunan RKPD yang mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 memuat rencana kerja perangkat daerah (PD) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah, indikator hasil program *(outcome)*, penanggung jawab program, serta rincian kebutuhan dana/pagu indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta memperhatikan azas koordinasi dengan berbagai pihak.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang–Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 183);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 108);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang penysuunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026;

1.3 Hubungan antar Dokumen

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Keterkaitan RKPD dengan dokumen Perencanaan yang lain dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dan Keterkaitan RKPD Dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya

Rancangan Awal RKPD dibahas pada forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Selanjutnya Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD berdasarkan Rancangan Awal Renja PD dan hasil penelaahan terhadap Rancangan RKPD Provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional. Kemudian Rancangan RKPD dibahas dalam musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga Rancangan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPD dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah. RKPD akan dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD, dilanjutkan dengan Nota Kesepahaman Pimpinan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kepala Daerah sebagai stimulus pedoman penyusunan RKA-OPD.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ini harus mengacu dan berpedoman kepada dokumen RKP Nasional, Renja K/L dan RKPD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar. 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Bagan Keterkaitan RKPD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota

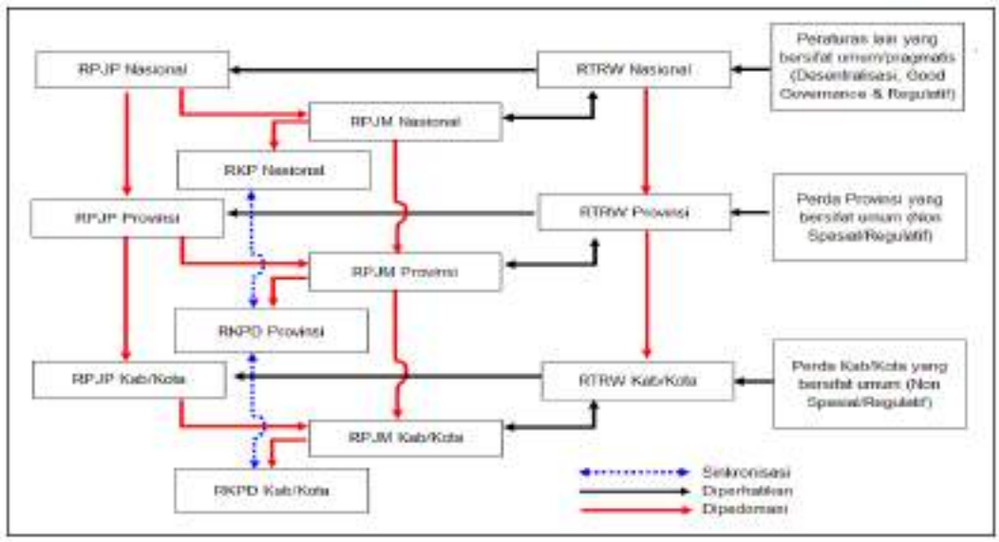

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang mengimplementasikan Rencana Pembangunan Daerah dan penganggaran tahunan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan Ranhir RKPD serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi kinerja pembangunan daerah dan evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Lalu.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun lalu dan tahun berjalan, arah kebijakan ekonomi daerah dan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah serta arah Kebijakan Keuangan Daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAEARAH

Menjelaskan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, prioritas pembangunan Tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan pada tiap bidang urusan wajib/pilihan pemerintahan Tahun 2025.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Ranhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang selanjutnya akan disempurnakan hingga menjadi RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman ataupun landasan bagi para penyelenggara pemerintahan dan para pelaku/pelaksana pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan Ranhir RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah:

1. Dokumen yang memuat arahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 ke dalam rencana operasional pada Tahun 2025;
2. Sebagai tolok ukur bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan daerah;
3. Sebagai acuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

a. Kondisi Geografis Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah pProvinsi Sumatera Utara, dimana salah satu daerah otonom kabupaten yang dibentuk menurut undang-undang tersebut adalah Tapanuli Tengah.

Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terletak di bagian selatan Kota Medan (Ibukota Provinsi Sumatera Utara) dan berlokasi di Pantai Barat Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah

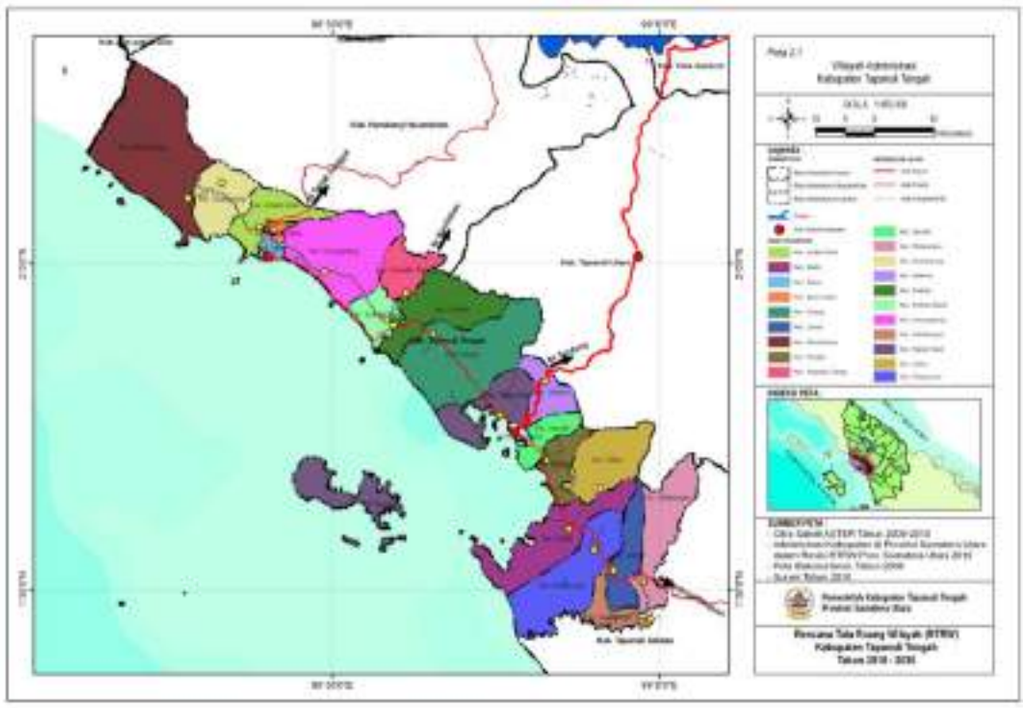

b. Letak dan Batas Administrasi Daerah

Kondisi geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada posisi koordinat **1°11'00"** - **2°22'0"** LU dan **98°07'** - **98°12'**BT. Sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pulau Sumatera Utara dan sebagian lagi merupakan 31 (tiga puluh satu) pulau-pulau kecil, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Mursala dengan luas ± 8.000 Ha, memiliki panorama alam yang sangat indah meliputi air terjun yang langsung jatuh ke laut, terumbu karang dan hutan Pulau Mursala. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panjang garis pantai ± 200 km dan salah satu daerah maritim di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam);
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Pakpak Bharat;
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan;
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia.

c. Luas Wilayah

Kabupaten Tapanuli Tengah dengan ibu kotanya Pandan mempunyai luas wilayah **6.194,98 km²** meliputi 2.194,98 km² luas daratan dan 4.000 km² luas laut.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yaitu 436,29 km² (19,88%), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km² (0,99%). Secara lebih rinci mengenai luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (km²)	%
1.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
2.	Badiri	2	7	129,49	5,90
3.	Sibabangun	1	6	286,64	12,97
4.	Lumut	1	5	105,98	4,83
5.	Sukabangun	-	6	49,37	2,25
6.	Pandan	20	2	34,31	1,56
7.	Tukka	5	4	150,93	6,87
8.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
9.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
10.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
11.	Kolang	2	12	436,29	19,88
12.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
13.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
14.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
15.	Barus	2	11	21,81	0,99
16.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
17.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
18.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
19.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
20.	Sirandorung	1	7	87,72	4,00
Jumlah		**56**	**159**	**2.194,98**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

d. Topografi dan Hidrologi

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada dipesisir Pantai Barat Sumatera dengan ketinggian antara 0–1.266 m di atas permukaan laut (dpl). Kota Pandan adalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan laut. Umumnya setiap kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah memiliki ketinggian yang bervariasi yaitu antara 0-1.000 m diatas permukaan laut, karena umumnya kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah berada di sepanjang pesisir Pantai Barat Sumatera Utara dengan ketinggian antara 0-8 m di atas permukaan laut dan ke arah tengah merupakan kawasan perbukitan yang memiliki ketinggian di atas 100 m dari permukaan laut. Hanya beberapa kecamatan yang tidak berada di pesisir pantai dan terletak di ketinggian antara 100-1.266 di atas permukaan laut, seperti Kecamatan Barus Utara, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tukka, Kecamatan Suka Bangun, Kecamatan Lumut dan Kecamatan Sirandorung.

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA) dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan garis pantai ±200 km dan dilalui jalur pegunungan Bukit Barisan. Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Sebesar 50,46 persen wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian diatas 100 m di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah terbagi dalam beberapa tipologi kelerengan yang bervariasi terdiri dari kelerengan Datar (0–8%), Berombak (8–15 %), Bergelombang (15–25 %), Curam (25 – 40 %) dan Terjal (>40 %).

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

e. Geologi

Dari aspek geologisnya, kondisi tanah di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya terdiri dari struktur tanah alluvium, dan regosol. Untuk alluvium berada di daerah dataran rendah sedangkan tanah regosol merah berada di kaki bukit. Jenis struktur tanah lainnya yang ditemui adalah batuan cadas. Jenis Bahan Tambang yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu jenis bahan galian bukan logam dan batuan (Galian C') yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, bahan tambang granite terdapat di Kecamatan Kolang, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Tukka; bahan tambang andesite di Kecamatan Sorkam, Badiri, Sibabangun, Lumut, Pinangsori. Sementara logam dasar (emas, perak dan tembaga) di Kecamatan Sitahuis, Manduamas, Andam Dewi, Sirandorung, Barus Utara, Sosorgadong, Kolang, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun.

f. Hidrologi

Sumber air yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah berasal dari mata air dan sungai hal ini dapat menjadi pengembangan jaringan sumber daya air dan sarana prasarana sumber daya air selain air minum dapat juga mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara umum, sungai-sungai di Kabupaten Tapanuli Tengah beraliran panjang. Pola Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat dipengaruhi oleh keadaan morfologis, topografi dan bentuk wilayah disamping bentuk atau corak DAS itu sendiri. Di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Tapus, DAS Lae Chinong, DAS Sirahar, DAS Aek Sibundong, DAS Aek Kolang, dan DAS Batangtoru. Daerah hulu sungai berasal dari Pegunungan Bukit Barisan dan bermuara ke Pantai Barat Sumatera Utara. Selain itu terdapat sungai-sungai lainnya yang secara keseluruhan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk air minum, irigasi, transportasi, pembangkit listrik tenaga air, dan untuk kepentingan lainnya.

g. Klimatologi

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan lautan, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Dalam periode Bulan Januari sampai Desember, suhu udara maksimum bisa mencapai 36,20^{0}C dan suhu minimum mencapai 22,00^{0}C. Rata-rata suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 26,40^{0}C. Adapun rata-rata curah hujan 358,71mm. Kecepatan angin rata-rata 2,68 m/det, rata-rata penyinaran matahari 56,17% dan rata-rata penguapan 3,80 mm.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan deskripsi karakteristik wilayah pada sub bab sebelumnya, maka wilayah yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
2) meningkatkan fungsi lindung;
3) menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budi daya;
4) menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan;
5) meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan;
6) meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
7) meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;
8) meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat;
9) meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya;
10) meningkatkan ekspor; atau
11) mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di daerah setempat.

b. Wilayah Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekpoitasi tanaman yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara terbatas.

Berdasarkan SK.44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 52.280 Ha yang terdapat di Kecamatan Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Pasaribu Tobing, Sosor Gadong, Andam Dewi, Manduamas, Sirandorung dan Tapian Nauli. Berdasarkan hal tersebut dengan luasan HPT yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri seperti pohon sengon yang sebagai bahan baku pembuatan beton, pagar konstruksi. Pohon lainnya dapat juga dialokasikan oleh masyarakat untuk produksi kayu sebagai bahan konstruksi.

c. Wilayah Pertanian tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan basah adalah kawasan yang dipergunakan bagi tanaman pengan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, maka kawasan ini direncanakan berlokasi menyebar hampir di seluruh wilayah kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 16.653 Ha yang secara dominan berlokasi pada Kecamatan Kolang, Sibabangun, Sorkam, Sorkam Barat, Tukka dan Badiri.

Bila dilihat peruntukan guna lahan sawah dilapangan dari tahun ketahun mengalami penurunan dan peralihan fungsi lahan, perubahan luas lahan ini antara lain disebabkan:

1) Telah terjadinya perubahan status penggunaan lahan (alih fungsi lahan) dari kawasan pertanian lahan basah (sawah) menjadi kawasan perkebunan.
2) Masih kurangnya sarana irigasi untuk persawahan dan irigasi yang ada belum dapat difungsikan dengan baik sehingga banyak masyarakat mengalih fungsikan lahannya.
3) Sawah non irigasi/tadah hujan pada prinsipnya dapat dialihkan ke penggunaan lain tanpa menimbulkan kerugian investasi yang besar karena tidak ada saluran irigasi teknis yang dibongkar/tidak terpakai.
4) Prospek dan pemasaran hasil perkebunan lebih luas, tidak hanya berskala lokal dan regional tetapi juga internasional.

Oleh sebab itu untuk mempertahankan pertanian lahan basah yang ada saat ini harus melakukan peningkatan, baik hasil produksi maupun pemasaran serta peningkatan sarana irigasi teknis, sehingga Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sebagai salah satu pemasok hasil pertanian lahan basah di Sumatera Utara.

Adapun rencana peningkatan dan pengelolaan kawasan pertanian lahan basah dalam rangka upaya mempertahankan lahan pertanian yang ada, meliputi :

1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, teknologi tepat-guna, pemanfaatan sistem jaringan irigasi secara optimal, pengembangan kelompok dan kelembagaan usaha tani untuk yang didukung sistem pengolahan produksi dan jaringan pemasaran.
2) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah di tingkat kabupaten
3) Penentuan batas dan pemberian ijin Kawasan Pertanian Lahan
4) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan arahan kepada masyarakat tentang pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah.
5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Pertanian Lahan Basah dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

Pada prinsipnya pengelolaan kawasan pertanian lahan basah bertujuan untuk selalu menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dan Provinsi Sumatera Utara umumnya.

Kawasan tanaman pangan lahan kering adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Tanaman pangan lahan kering tidak memerlukan sistem pengairan irigasi. Sedangkan kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mapun kecil dengan luas total 35.654 Ha dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering di Kecamatan Kolang dan Sibabangun

d. Wilayah Pertanian Hortikultura

Prospek hortikultura diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, namun dominan di Kecamatan Kolang dan Sibabangun serta akan dikembangkan disemua kecamatan di samping padi dan palawija, baik di lahan basah maupun kering.

Tanaman sayuran dan buah-buahan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan.

Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan tanaman pangan lahan kering yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering berupa tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan hortikultura direncanakan menyebar hampir diseluruh Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah baik dalam skala besar mapun kecil dengan luas total 458.12 Ha dengan pusat pengembangan hortikultura di Kecamatan Kolang dan Sibabangun dengan komoditas unggulan adalah mangga, rambutan dan durian.

e. Wilayah Perkebunan

Pengembangan kawasan tanaman tahunan di Kabupaten Tapanuli Tengah berupa perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Seiring dengan usaha perluasan kawasan tanaman tahunan, maka jaringan jalan yang ada harus ditingkatkan. Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat lahan tidur yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu lahan tidur yang telah dimiliki oleh perorangan dan lahan tidur yang merupakan hak pemerintah setempat. Kedua jenis lahan tidur tersebut diatas masih banyak terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyebar diseluruh kecamatan. Lahan tidur tersebut diprioritaskan dalam pengembangannya untuk kawasan tanaman tahunan.

Berdasarkan rencana pengembangan perkebunan, dan melihat ketersediaan lahan serta potensinya, maka Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai bagi pengembangan perkebunan, utamanya di Kecamatan Kolang, Sibabangun, Tukka,

Sosorgadong, Kecamatan Manduamas dan Kecamatan Pinangsori. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi minat swasta untuk investasi, sehingga perlu peran serta Pemerintah Daerah untuk meningkatkan infrastruktur pendukung.

Orientasi pasar komoditif perkebunan umumnya sudah berorientasi pasar lokal, regional dan bahkan nasional seperti kelapa sawit, coklat, karet, kelapa, dan kopi. Hal ini membuat pengembangan komoditi perkebunan tidak terbatas oleh daya serap pasar lokal. Pembatas utama adalah ketersediaan dan kesesuaian dan lahan dengan jenis komoditi yang dikembangkan. Oleh karena itu, pengembangan komoditif perkebunan juga harus melihat kesesuaian lahan yang ada agar hasil yang diperoleh optimal. Luar rencana polar ruang perkebunan kurang lebih sebesars 40.386 Ha

Pengelolaan Kawasan Perkebunan, meliputi :

1) Dalam jangka pendek meningkatkan produktivitas perkebunan melalui pemanfaatan bibit yang unggul, pupuk yang tepat, dan teknologi tepat-guna yang didukung oleh pengembangan sistem jaringan pemasaran produksi perkebunan melalui pembangunan sentra pengumpulan dan Terminal Agribisnis di sekitar kawasan perkebunan.
2) Dalam jangka pendek mencari investor untuk pengembangan perkebunan besar untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah.
3) Lembaga yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan Kawasan Perkebunan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sedangkan untuk Perkebunan besar adalah Badan Usaha pengelola.
4) Penentuan batas dan pemberian ijin pemanfaatan Kawasan Perkebunan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Badan Pertanahan dengan mendapat arahan dari Pemerintah Provinsi.
5) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan arahan kepada masyarakat dan seluruh stakeholders tentang pengelolaan Kawasan Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perkebunan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya.

f. Wilayah Perikanan

Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ikan, baik pasar lokal daerah sekitar Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai arahan ini perlu ditindak lanjuti dengan menyediakan sarana dan prasarana pembangunan perikanan, terutama perikanan darat dan laut.

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah. Konsep kompleks wilayah adalah kombinasi antara

analisis keruangan dan ekologi perikanan. Setiap wilayah mempunyai interaksi dengan wilayah lain yang muncul karena adanya perbedaan antar wilayah.

Fenomena wilayah dipelajari melalui analisis keruangan, sedangkan interaksi manusia dengan lingkungan dipelajari keterkaitannya dalam analisis ekologi. Satu wilayah adalah satu kesatuan sosial ekonomi dan sumber hayati perikanan.

Sektor perikanan merupakan sektor yang cukup berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan perikanan merupakan salah satu dari bentuk pemanfaatan ruang yang lebih efisien dari pertanian dan perkebunan. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki cukup banyak sumberdaya ruang yang sesuai untuk pengembangan sektor perikanan, baik budidaya perikanan darat, budidaya perikanan air payau/tambak, penangkapan di daerah perairan umum, maupun penangkapan di laut.

Kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang, maka yang menjadi penekanan disini adalah budidaya tambak dan penangkapan perikanan laut. Kebutuhan masyarakat akan produk perikanan makin hari makin meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan gizi masyarakat. Produk perikanan menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan akan gizi, karena disamping mudah diperoleh juga harganya relatif terjangkau. Akhir-akhir ini bahkan sudah banyak dijumpai pabrik-pabrik pengelolaan ikan untuk tujuan ekspor. Prospek pasar untuk pengembangan komoditi ini baik lokal, nasional, maupun internasional sangat tinggi.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan luas kurang lebih sebesar 2.508,78 Ha yang meliputi pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan ikan

1) Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap dikembangkan di Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli ,Kecamatan Sorkam Barat,Kecamatan Barus, Kecamatan Andam Dewi, dan Kecamatan Manduamas;
2) Rencana pengembangan perikanan budidaya dikembangkan di Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Badiri, Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Lumut , dan Kecamatan Pinagsori;
3) Kawasan pengembangan pengolahan ikan berada di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Tapian Nauli.
4) Kawasan pengembangan pangkalan ikan (PPI) dan Tempat Penangkapan Ikan (TPI) yaitu diarahkan ke TPI Labuan Angin, PPI Barus dan PPI Sorkam.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan, meliputi :

a) Meningkatkan produktivitas perikanan dengan memperhatikan aspek lingkungan;
b) Penentuan batas dan pemberian ijin pada Kawasan Perikanan;
c) Meningkatkan kualitas pelaku perikanan khususnya dalam pengelolaan menuju industri perikanan;

d) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perikanan dan melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar pemanfaatannya;
e) Pengembangan kawasan perikanan menuju pengembangan kawasan Minapolitan.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut:

1) Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;
2) Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3) Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
4) Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5) Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
6) Meningkatkan kesempatan kerja;
7) Meningkatkan ekspor; dan/atau
8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g. Wilayah Pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun akan segera dilakukan kegiatan penambangan. Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi untuk daerah masing-masing, yang mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas kawasan pertambangan mineral logam, kawasan pertambangan mineral non logam, kawasan pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan rakyat. Yang dimaksud dengan kawasan pertambangan mineral logam meliputi emas, tembaga, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin. Definisi dari kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi komoditas intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen

Untuk pengembangan potensi bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, perlu disusun skala prioritas terhadap bahan galian

yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

1) Ketersediaan bahan galian dan lokasinya
2) Kondisi dan Kebutuhan Daerah
3) Pangsa Pasar

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi, diantaranya Batu Bara dan Logam Dasar.

Pola pemanfaatan ruang di wilayah potensi pertambangan diarahkan pada kegiatan industri pengolahan bahan-bahan tersebut menjadi komoditi turunan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pola pemanfaatan ini perlu diiringi dengan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung. Salah satu prasyarat pengembangan kawasan pertambangan adalah kemudahan perjanjian bagi pengusaha yang akan membuka usaha pertambangan, termasuk perijinan industri yang menggunakan bahan baku bahan tambang dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan, tetapi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan. Sehingga kawasan pertambangan yang ada tidak merusak kawasan lindung yang telah ditetapkan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

1) jenis bahan galian komoditi yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian c untuk konstruksi adalah bahan galian industri dan energi;
2) kawasan pertambangan merupakan kawasan budidaya yang mempunyai kriteria berpotensi mineral yang sudah atau belum dibudidayakan;
3) kawasan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pertambangan harus diluar dari kawasan kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan;
4) Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WP) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Pinangsori dan Kecamatan Tukka.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1) meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan investasi;
2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3) tidak mengganggu fungsi lindung;
4) memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

7) menciptakan kesempatan kerja;
8) meningkatkan ekspor; dan/atau
9) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana kawasan pertambangan mineral logam di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas emas, timah, seng dan perak meliputi:

1) Kecamatan Sibabangun;
2) Kecamatan Sukabangun;
3) Kecamatan Lumut;
4) Kecamatan Pinangsori;
5) Kecamatan Badiri;
6) Kecamatan Tukka;
7) Kecamatan Manduamas;
8) Kecamatan Sitahuis;
9) Kecamatan Tapian Nauli;
10) Kecamatan Kolang;
11) Kecamatan Sorkam;
12) Kecamatan Sorkam Barat;
13) Kecamatan Sirandorung;
14) Kecamatan Barus Utara;
15) Kecamatan Andamdewi.

Rencana kawasan pertambangan mineral non logam dan pertambangan batuan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas batu gamping, batu cadas dan pasir sedimen meliputi:

1) Kecamatan Sibabangun;
2) Kecamatan Pinangsori; dan
3) Kecamatan Tukka;
4) Kecamatan Tapian Nauli;
5) Kecamatan Sitahuis;
6) Kecamatan Kolang;
7) Kecamatan Manduamas;
8) Kecamatan Andamdewi;
9) Kecamatan Barus;
10) Kecamatan Sorkam;
11) Kecamatan Sorkam Barat;
12) Kecamatan Pasaributobing;
13) Kecamatan Sosorgadong;
14) Kecamatan Pandan;
15) Kecamatan Sarudik;
16) Kematan Badiri;
17) Kecamatan Sibabangun dan

18) Kecamatan Sukabangun.

Rencana kawasan pertambangan batubara meliputi:

1) Kecamatan Badiri;
2) Kecamatan Kolang; dan
3) Kecamatan Sosorgadong.

Rencana kawasan pertambangan rakyat adalah usaha pertambangan terhadap galian C yang di usahakan secara individu oleh masyarkat yang lokasinya meliputi:.

1) Kecamatan Sibabangun;
2) Kecamatan Pinangsori;
3) Kecamatan Tukka;
4) Kecamatan Tapian Nauli;
5) Kecamatan Sitahuis;
6) Kecamatan Kolang;
7) Kecamatan Manduamas;
8) Kecamatan Andamdewi;
9) Kecamatan Barus;
10) Kecamatan Sorkam;
11) Kecamatan Sorkam Barat;
12) Kecamatan Pasaributobing;
13) Kecamatan Sosorgadong;
14) Kecamatan Pandan;
15) Kecamatan Sarudik;
16) Kecamatan Badiri.

Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

h. Wilayah Industri

Pengembangan kawasan peruntuntukan industri diarahkan pada industri yang tidak merusak lingkungan. Penekanan kegiatan industri adalah industri kecil dan kerajinan yang tersebar di berbagai kecamatan serta industri yang berbasis agroindustri atau industri yang mengelola hasil pertanian. Tidak ada peruntukan kawasan industri khusus untuk menampung kegiatan industri kecil dan kerajinan. Kawasan industri pertambangan diarahkan sesuai dengan lokasi bahan baku berada.

Yang dimaksud dengan jenis atau klasifikasi industri pada kawasan peruntukan industri adalah :

1) Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional;
2) Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relativ lebih luas (berskala regional).

3) Industri kecil dan mikro, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga, produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala lokal).

Secara garis besar, pengembangan industri diarahkan pada :

1) Pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata;
2) Memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
3) Peningkatan kualitas produksi dan daya saing;
4) Menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.

Dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tapanuli Tengah, penentuan lokasi pengembangan merupakan salah satu faktor penting karena kesalahan pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya perkembangan yang ingin dicapai.

Teori lokasi menyatakan bahwa variabel-variabel yang perlu mendapat penilaian atas potensi lokasi industri adalah :

1) Ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pada lokasi atau daerah sekitarnya;
2) Kemudahan mendapat material dari sumbernya ditinjau dari segi waktu, biaya dan mutu;
3) Ketersediaan tenaga kerja yang potensial bagi kegiatan industri;
4) Sarana lingkungan yang menunjang bagi perkembangan kegiatan industri.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor di atas disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dipandang memenuhi syarat sebagai lokasi pengembangan agro industri yang dinilai berdasarkan ketersediaan potensi bahan baku pada hinterlandnya. Dan berdasarkan kriteria yang telah diuraikan di atas, maka rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

1) industri kecil dan menengah dapat diarahkan diseluruh kecamatan sesuai dengan potensi dan sumber bahan baku yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tetap melihat kaedah lingkungan;
2) industri besar diarahkan di pusat industri Labuan Angin Kecamatan Tapian Nauli;
3) industri menengah di kawasan pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Sarudik dan Kecamatan Barus

Penerapan kriteria kawasan peruntukan industri secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan peruntukan industri yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di daerah sekitarnya;

2) mendorong perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3) tidak mengganggu fungsi lindung;
4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7) menciptakan kesempatan kerja;
8) meningkatkan ekspor; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbudaya industri dan berdaya saing.

i. Wilayah Pariwisata

Dari segi potensi, Kabupaten memiliki potensi-potensi berupa keunggulan kondisi alam maupun kegiatan lain yang mendukung kegiatan pariwisata. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan pariwisata dengan mengacu pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditentukan. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diisyaratkan tetap berbasis pada nilai budaya setempat, pendidikan sosial dan upaya-upaya pelestarian alam.

Pola pengembangan pariwisata dilakukan dengan mekanisme yang terencana dan terpadu. Perencanaan yang perlu dilakukan berupa identifikasi potensi objek dan potensi pasar wisata, penyusunan prioritas pengembangan kawasan, studi kelayakan pengembangan serta penyusunan *master plan* pengembangan yang dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor lain. Mekanisme keterpaduan dalam pengembangan pariwisata dimaksudkan agar pengembangan pariwisata sejauh mungkin melibatkan unit-unit usaha masyarakat lokal secara aktif dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial.

Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi :

1) Kawasan peruntukkan pariwisata bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata,dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
2) Usaha pariwisata digolongkan ke dalam usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha sarana pariwisata.
3) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
5) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi;
2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3) tidak mengganggu fungsi lindung;
4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7) menciptakan kesempatan kerja;
8) melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam; dan/atau
9) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana peruntukan kawasan pariwisata di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:

1) Pariwisata alam berupa wisata sungai, pegunungan,pantai, air terjun meliputi di Kecamatan Pinangsori yaitu danau pandan, pemandian sungai lubuk nabolon, sungai ramayana dan air terjun aeknabobar, Kecamatan Badiri yaitu pantai ujung batu pari, pantai kampung sawah sitandus, pantai maloko, pantai sikapas, pantai kampung danau, pulau situngkus, pulau batu mandi, pulau batu layar, pantai bottot, pantai monyet, pulau bakar, pulau ungge, dan pantai sijago-jago, Kecamatan Pandan yaitu pantai bosur, pantai kalangan, pantai hajoran, pantai pandan cerita, pantai labuan mandailing, pantai sibuluan, pantai muara sibuluan, pantai muara nibung, air terjun labuan sonang, sungai sibuluan, Kecamatan Sarudik yaitu bukit pondok batu, sungai sarudik, pantai ujung batu, pantai labuan nasonang, pantai batu lubang, pulau poncan gadang, pulau poncan ketek dan air terjun sibuni-buni, Kecamatan Sitahuis dengan objek wisata adalah bukit anugerah, puncak bonan dolok, sungai aek maranti, sungai aek raisan, air terjun batu lobang dan air terjun bonan dolok, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata pantai labuan angin, pantai mela, pulau mursala, air terjun mursala, pulau silaban barat, pulau talam, pulau silabu na menek, pulau silabu na godang, pulau kalimatung na menek, pulau kalimatung na godang, pulau putri runduk, pulau raja janggi, pulau putih, air terjun aloban dan pantai kuta, Kecamatan Kolang dengan objek wisata adalah air terjun silaklak, sungai aek sibundong, pantai muara kolang, pantai kayu putih, pantai tanah hitam, pantai rintis, pantai bandang, Kecamatan Sorkam Barat dengan objek wisata adalah pantai aek raso, pantai binasi, pantai pasar sorkam, Kecamatan Barus dengan objek wisata adalah pantai pasar tarandam, pantai pasar batu gerigis, pantai kade gadang, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah sungai aek sibundong, pantai teluk roban/bottot, pulau sorkam, Kecamatan Andam Dewi

dengan objek wisata adalah sungai aek husor, pantai sitiris-tiris, pantai sipaubat, pantai aek busuk, pantai kinati, pantai kedai tiga, pulau karang, pulau panjang, pulau dundun, Kecamatan Manduamas dengan objek wisata adalah pantai sitiris tiris, pantai simanuk manuk;

2) Pariwisata budaya dan sejarah meliputi Kecamatan Sitahuis adalah tugu peringatan perang gerilia, makam raja panggabean dan batu lobang, Kecamatan Kolang adalah liang gorga, dan makam pahlawan Dr. Ferdinan Lumbantobing, Kecamatan Barus makam papan tinggi, makam mahligai, makam tuan madhdud, makam ibrahim syeh, makam tuan ambar, benteng portugis, pasar tarandam, rumah tradisional barus, dan desa nelayan pasar tarandam, Kecamatan Barus Utara adalah batu cawan perjamuan kudus, Kecamatan Andamdewi batu ping, makam raja uti, lobu tua, sungai aek busuk, permandian putri andam dewi, dan aek raja, Kecamatan Sorkam dengan objek wisata adalah makam tuan hidayat, Kecamatan Tukka dengan objek wisata adalah liang pagar gunung, Kecamatan Tapian Nauli dengan objek wisata adalah Makam Raja Sasi Hutagalung.

j. Wilayah Permukiman

Kawasan permukiman terdiri dari permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Pengembangan Permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan perdesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan permukiman, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merencanakan penetapan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di beberapa lokasi. Proses penetapan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti potensi ekonomi kawasan, jumlah penduduk, prasarana dan sarana dasar serta potensi-potensi lain yang belum tergali yang diperkirakan mampu meningkatkan kawasan menjadi lebih mandiri dan berkembang.

Di sisi lain, terdapat lingkungan permukiman yang telah berkembang relatif sangat cepat dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga cenderung mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi kumuh (*slum area*) karena keterbatasan ketersediaan prasarana dan sarana dasar.

Pengembangan kawasan pemukiman terkait dengan sektor-sektor lain, terutama sektor fisik prasarana. Kawasan yang dikembangkan untuk pemukiman memiliki beberapa syarat, antara lain :

1) Memiliki sumber air yang terjamin kontiniuitasnya.
2) Aksebilitas (keterjangkauan transportasi) mudah.
3) Dekat dengan pusat-pusat ekonomi-sosial.
4) Mudah dalam pengembangan sarana prasarana seperti penerangan, komunikasi/telepon, air bersih dan sebagainya.
5) Resiko bencana alam kecil.

Pola pengembangan pemukiman diselaraskan dengan pola pemanfaatan ruang untuk sektor lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang. Hal ini terutama agar tidak terjdi dislokasi kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman, terlebih dengan semakin banyaknya jumlah penduduk. Penggunaan kawasan budidaya menjadi kawasan pemukiman akan berakibat pada menurunnya produktifitas lahan secara keseluruhan dan menurunnya tingkat kemandirian kawasan.

Pengembangan kawasan pemukiman meliputi beberapa langkah pokok, yaitu identifikasi kesesuaian kawasan untuk pemukiman, penetapan kawasan, sosialisasi pemanfaatan ruang dan relokasi kawasan pemukiman. Identifikasi kawasan pemukiman dilakukan untuk mendata kawasan-kawasan yang memenuhi syarat dan diprioritaskan untuk pengembangan pemukiman, yang selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pemukiman. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran penggunaan ruang. Adapun relokasi yang dimaksudkan disini adalah penempatan kembali pemukiman yang berada pada kawasan yang dialokasikan untuk tujuan lain dan keberadaannya membahayakan fungsi utama kawasan tersebut. Hal ini terutama karena di Kabupaten Tapanuli Tengah banyak terjadi pemukiman dan kegiatan budidaya ilegal di kawasan-kawasan lindung/konservasi, seperti di kawasan Hutan Lindung, kawasan sempadan pantai dan kanan kiri sungai yang keseluruhannya merupakan kawasan lindung.

Penerapan kriteria kawasan peruntukan permukiman secara tepat diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan permukiman yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
2) meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
3) tidak mengganggu fungsi lindung;
4) tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
5) meningkatkan pendapatan masyarakat;
6) meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
7) menyediakan kesempatan kerja; dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode scoring terhadap informasi geologi. Caranya dengan membobot parameter geologi yang berperan dalam penentuan masing-masing kawasan rawan bencana dan mengalikan dengan nilai kemampuan dari masing-masing parameter

geologi sesuai situasi kondisi wilayahnya. Pola ruang untuk kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat kerawaannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan/fungsi budidaya. Sedangkan analisa tingkat kerawanan dilakukan dengan menganalisa aspek fisik geologi dengan metode skoring.

a. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Aspek geologi yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, bidang lemah atau struktur geologi dengan faktor pemicu adalah curah hujan. Pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel dibawah ini. Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerentanan, yaitu kerentanan longsor tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.2
Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Kemiringan lereng	1. Kemiringan 0 % – 8 %	1	5	5
	2. Kemiringan 8 % - 25 %	2		10
	3. Kemiringan 25 % - 40 %	3		15
	4. Kemiringan 40 %	5		5
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	1	4	4
	2. Kode : Qvt, Tmvak, Tmvp	3		12
	3. Kode : Tmba, Tlsb	5		20
	4. Kode : Mpisl, Puk	2		8
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	1	4	4
	2. 3000 - 3500 mm/thn	2		8
	3. 3500 - 4000 mm/thn	3		12
	4. > 4000 mm/thn	5		20
Struktur geologi	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Dari kondisi alamnya disimpulkan bahwa di Kabupaten Tapanuli Tengah potensi bencana longsor sangat tinggi. Faktor pengontrol utama dalah kemiringan lereng dan curah hujan yang cukup tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana longsor sangat tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan dengan kerentanan tinggi, sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Bahkan akan lebih baik bila kawasan dengan kerentanan tinggi juga dijadikan kawasan lindung.Sebaran luas kawasan

rawan bencana longsor tingkat tingkat dan sedang paling dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi.

Tabel 2.3
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Longsor
Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	
Andam Dewi	2.284,03	2.194,62	3.226,52	623,48	8.328,65
Badiri	732,27	4.044,02	9.945,92	1.606,05	16.328,26
Barus	-	35,57	914,24	568,94	1.518,75
Barus Utara	-	246,15	750,39	77,12	1.073,67
Kolang	520,43	9.360,22	12.803,52	2.991,80	25.675,97
Lumut	1.037,75	2.127,59	4.636,96	446,58	8.248,879
Manduamas	3.569,50	3.847,54	10.600,63	13.858,80	3.1876,48
Pandan	1,79	1.870,82	3.389,06	543,46	5.805,14
Pasaribu Tobing	1.730,56	4.403,35	189,90	-	6.323,81
Pinang Sori	86,83	7.088,91	10.430,21	781,71	18.387,66
Sarudik	230,82	2.809,22	1.634,05	72,31	4746,4
Sibabangun	2.632,22	6.982,71	3.355,12	230,29	13.200,33
Sirandorung	386,75	2.014,37	5.078,39	2.141,59	9.621,11
Sitahuis	1.527,12	3.265,03	1.387,82	-	6.179,97
Sorkam	205,59	6.631,76	6.667,55	1.002,81	14.507,72
Sorkam Barat	59,64	982,47	4.208,26	28,63	5.279,00
Sosorgadong	8.535,44	7.575,46	4.707,63	282,23	21.100,76
Sukabangun	-	381,84	3.660,85	546,43	4.589,12
Tapian Nauli	-	3.203,22	5.964,74	8.822,04	17.990,00
Tukka	3.421,15	6.464,57	2.508,58	34,13	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	**26.961,92**	**75.529,45**	**96.060,33**	**34658,41**	**233.210,10**

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

b. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai. Daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah meliputi Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Barus, Kecamatan Sorkam Barat, dan Kecamatan Kolang.

c. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Surut

Kawasan rawan gelombang pasang air laut meliputi seluruh wilayah pantai khususnya Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Sarudik ,Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sosorgadong, Kecamatan Barus dan Kecamatan Andamdewi.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan lindung geologi di Kabupaten Tengah terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi terdiri atas:

1) Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Parameter geologi yang digunakan dalam penentuan kawasan rawan bencana gempabmi adalah : sifat fisik batuan, kemiringan lereng, struktur geologi serta kondisi kegempaan. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (2000-2009). Dari hasil skoring akan diperoleh peta kawasan rawan bencana gempabumi (dan akan menggambarkan sebaran dari masing-masing tingkat kerawanan bencana gempabumi yang dibagi atas tiga tingkat kerawanan, yaitu : kawasan rawan bencana gempa tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 2.4
Pembobotan Informasi Geologi Untuk Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Tapanuli Tengah

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
Batuan	1. Kode : Qh, Qp	5	4	20
	2. Kode : Qvlt, Tmba, Tmvak, Tmvp, Tlsb	4		16
	3. Kode : Mpisl, Puk	1		4
Struktur	1. < 100 m	5	3	15
	2. 100 - 1000 m	3		9
	3. > 1000 m	1		3
Kegempaan	1. Intensitas tinggi	5	5	25
	2. Intensitas sedang	3		15
	3. Intensitas rendah	2		10
	4. Intensitas sangat rendah	1		5
Kemiringan lereng	1. 0 % – 8 %	1	3	3
	2. 8 % - 25 %	2		6
	3. 25 % - 40 %	3		9
	4. > 40 %	4		12

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Data kegempaan yang dianalisa hanya data keterjadian gempa (di darat dan di laut pantai barat) kurun waktu sepuluh tahun dengan kekuatan gempa yang secara umum tergolong rendah. Artinya bila kekuatan gempa yang bersumber dari patahan di laut dan di darat meningkat, maka tingkat kerentanan dimasing-masing juga akan meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung, hal ini lebih bersifat antisipasi. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah difungsikan sebagai kawasan budi daya. Penyebaran masing-masing tingkat kerentanan perkecamatan seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Pada tabel terlihat tingkat kerentanan rendah sebarannya lebih luas dibandingkan tingkat kerentanan lainnya.

Tabel 2.5
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Gempa Bumi Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) Tingkat Kerawanan				Jumlah Total (Ha)
	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Andam Dewi	59,39	1.303,43	6.826,86	138,97	8.328,65
Badiri	415,16	3.111,59	12.774,59	26,92	16.328,26
Barus	-	118,21	1.400,54	-	1.518,75
Barus Utara	-	146,75	926,93	-	1.073,67
Kolang	9,38	4.332,18	18.391,11	2.943,29	25.675,97
Lumut	87,13	1.808,22	6.353,52	-	8.248,88
Manduamas	102,92	3.313,90	22.566,91	5.892,74	31.876,48
Pandan	-	934,87	4.508,32	361,95	5.805,14
Pasaribu Tobing	152,71	3.759,99	2.399,78	11,33	6.323,81
Pinang Sori	7,65	4.032,04	14.347,98	-	18.387,66
Sarudik	4,38	536,08	3.897,48	308,46	4.746,40
Sibabangun	64,52	3.037,77	10.098,03	-	13.200,33
Sirandorung	-	633,46	8.081,39	906,26	9.621,11
Sitahuis	-	480,16	3.573,07	2.126,75	6.179,97
Sorkam	-	1.111,56	1.3396,16	-	14.507,72
Sorkam Barat	-	740,89	4.509,48	28,63	5.279,00
Sosorgadong	247,64	5.439,04	15.259,68	154,41	21.100,76
Sukabangun	-	679,68	3.459,50	449,93	4.589,115
Tapian Nauli	-	818,99	8.756,74	8.414,26	17.990,00
Tukka	504,71	4.848,29	6.379,81	695,61	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	**1.655,59**	**41.187,13**	**167.907,89**	**22.459,51**	**233.210,10**

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

2) Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada beda tinggi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (bentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Tinggi, berada persis disepanjag pantai yang memiliki ketinggian atau elevasi < 12.5 m dari garis pantai dengan morfologi dataran atau dengan kemiringan antara 0 % - 8 %. Potensi bahaya pada kawasan ini terutama akibat run up yang dapat menyapu apapun yang ada di permukaan pantai, serta bahaya dari energi limpasan air run up bila terjadi tsunami.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Sedang, Sebaran dari kawasan ini persis disisi belakang dari kawasan rawan bencana tsunami tinggi. Kawasannya memiliki ketinggian atau elevasi > 12,5 m dari garis pantai dan dengan bentuk morfologi yang dominan dataran dengan kemiringan dominan 0 % - 8 % dan sebagian kecil memiliki kemiringan 8 % - 15 %. Bila terjadi tsunami, energi run up mulai berkurang namun tetap memiliki potensi bencana tinggi akibat perluasan limpasan air.
- Kawasan Rawan Bencana Tsunami Rendah, Kawasan ini memiliki tingkat kerawanan yang rendah bahkan sampai sangat rendah, karena morfologinya dominan miring dengan kemiringan > 15 %. Kondisi demikian dapat memperlemah energi rup up saat terjadi tsunami, sehingga potensi bencana yang ditimbulkan jauh lebih rendah.

Tabel 2.6
Distribusi Sebaran Tingkat Kerawanan Bencana Tsunami
Per-Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Kecamatan	Luas (Ha) per Tingkat Kerawanan			Jumlah Total (Ha)
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Andam Dewi	5.697,06	1.387,77	1.243,83	8.328,65
Badiri	4.681,35	9.493,86	2.153,04	16.328,26
Barus	58,56	704,04	756,16	1.518,75
Barus Utara	878,86	194,81	-	1.073,67
Kolang	16.631,49	6.434,51	2.609,97	25.675,97
Lumut	8.248,88	-	-	8.248,88
Manduamas	16.433,22	9.123,99	6.319,27	31.876,48
Pandan	2.538,94	2.211,69	1.054,51	5.805,14
Pasaribu Tobing	6.237,60	86,21	-	6.323,81
Pinang Sori	12.682,12	4.554,93	1.150,61	18.387,66
Sarudik	3.199,83	1.191,02	355,55	4.746,40
Sibabangun	13.200,33	-	-	13.200,33
Sirandorung	5.668,46	3.066,28	886,37	9.621,11
Sitahuis	6.069,00	110,98	-	6.179,97
Sorkam	11.348,06	2.299,93	859,74	14.507,72
Sorkam Barat	1.262,98	2.676,48	1.339,54	5.279,00
Sosorgadong	16.835,04	2.279,52	1.986,20	21.100,76
Sukabangun	4.589,12	-	-	4.589,12
Tapian Nauli	3.943,29	2.372,65	11.674,06	17.990,00
Tukka	11.687,14	741,29	-	12.428,43
Jumlah Total (Ha)	**151.891,32**	**48.929,95**	**32.388,84**	**233.210,11**

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Berdasarkan hal tersebut maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana tsunami tinggi harus difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan pola ruang kawasan rawan bencana tsunami sedang dan rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus memenuhi prasyarat. Dari uraian ketiga kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dapat disimpulkan bahwa pola ruang untuk semua kawasan rawan bencana yang tingkat kerentanannya tergolong tinggi - sangat tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan yang memiliki tingkat kerawanan sedang, rendah dan sangat rendah dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya.

Tabel 2.7
Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah

Kawasan Rawan Bencana	Tingkat Kerawanan	Pola Ruang
Longsor	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	
	Sangat rendah	
Gempabumi	Sangat Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Tinggi	Kawasan fungsi budi daya
	Sedang	
	Rendah	
Tsunami	Tinggi	Kawasan fungsi lindung
	Sedang	Kawasan fungsi budi daya
	Rendah	

Sumber : RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah 2013-2033

Adanya potensi bahaya geologi yang berpotensi terhadap terjadinya bencana, maka sangat perlu ditetapkan strategi perencanaan dimasa yang akan datang. Perencanaan kegiatan yang harus dilakukan adalah kegiatan Pemetaan dan Mitigasi Bencana Alam Geologi Detail di masing-masing kecamatan.

3) Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Kawasan Rawan Gerakan Tanah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi adalah kawasan disepanjang Jalan Sibolga – Tarutung Kecamatan Sitahuis.

2.1.1.4. Demografi

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari berbagai etnis antara lain etnis Batak, Melayu, Minangkabau, Jawa, Bugis, Aceh dan pembauran dari suku-suku bangsa lain sebagai pendatang. Kehidupan etnis yang ada berjalan cukup baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung kegiatan sosial dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong rasa kebersamaan sesuai dengan motto Kabupaten Tapanuli Tengah ”Sahata Saoloan” atau ”seia sekata”. Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai data BPS Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 berjumlah 374.734 jiwa penduduk dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 386.895 jiwa.

a. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk disuatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Secara terus menerus jumlah penduduk akan

dipengaruhi oleh banyaknya bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi disisi lain akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua kelompok umur. Sementara itu migrasi juga berperan dalam mempengaruhi jumlah dimana penduduk imigran (pendatang) akan menambah dan emigran (penduduk yang keluar) akan mengurangi jumlah penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen demografi, yaitu ferilitas, mortalitas dan migrasi (masuk/inmigration dan keluar/outmigration). Selisih antar fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif (reproduktive change) atu pertumbuhan alamiah (natural growth), sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto (net migration). Dengan telah berjalannya system registrasi penduduk melalui pelayanan pendaftaran penduduk, maka data jumlah penduduk dapat diketahui secara langsung dari database kependudukan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km^2)
1	Pinangsori	26.753	342
2	Badiri	28,757	222
3	Sibabangun	19.227	68
4	Lumut	13.380	126
5	Sukabangun	4.155	84
6	Pandan	63.671	1.856
7	Tukka	15.368	1-2
8	Sarudik	23.919	923
9	Tapian Nauli	21.348	257
10	Sitahuis	6.232	123
11	Kolang	22.054	51
12	Sorkam	17.432	216
13	Sorkam Barat	18.709	420
14	Pasaribu Tobing	7.929	77
15	Barus	18.227	836
16	Sosor Gadong	15.432	108
17	Andam Dewi	17.032	139
18	Barus Utara	5.114	81
19	Manduamas	24.314	244
20	Sirandorung	17.842	203
Jumlah		**386.895**	**176**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

b. Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Karakteristik penduduk menurut jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Tahun 2021 - 2023

No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk		
		2021	2022	2023
1	Pinangsori	101,28	101,53	101,71
2	Badiri	105,62	107,14	104,66
3	Sibabangun	100,66	100,98	101,27
4	Lumut	100,58	100,82	100,99
5	Sukabangun	102,99	103,01	102,29
6	Pandan	103,07	103,00	102,88
7	Tukka	100,36	101,13	100,21
8	Sarudik	100,79	97,47	104,52
9	Tapian Nauli	103,97	104,34	104,64
10	Sitahuis	99,53	99,47	99,36
11	Kolang	102,23	102,36	103,34
12	Sorkam	97,45	96,99	96,48
13	Sorkam Barat	100,79	101,35	101,87
14	Pasaribu Tobing	98,12	98,12	98,08
15	Barus	104,74	105,17	105,56
16	Sosor Gadong	98,47	98,46	98,41
17	Andam Dewi	98,20	98,38	98,53
18	Barus Utara	95,09	95,00	94,89
19	Manduamas	99,97	99,99	99,98
20	Sirandorung	100,93	101,91	99,96
Jumlah		**101,42**	**101,48**	**101,71**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

c. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dimana hal tersebut merupakan karakteristik penduduk yang pokok. Komposisi

penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih membutuhkan asupan gizi yang baik dan perawatan kesehatan. Pada tabel 2.10 menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-39 tahun.

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan

Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	19.300	18.460	37.760
5-9	16.128	15.484	31.612
10-14	18.124	17.316	35.440
15-19	19.101	18.231	37.332
20-24	19.283	18.114	37.397
25-29	17.972	16.790	34.762
30-34	16.862	15.684	32.546
35-39	15.216	14.148	29.364
40-44	12.649	11.640	24.289
45-49	10.889	10.267	21.156
50-54	8.951	8.985	17.936
55-59	7.082	7.754	14.836
60-64	5.483	6.511	11.994
65-69	3.878	5.129	9.007
70-74	2.410	3.612	6.022
75+	1.758	3.684	5.442
Jumlah	**195.086**	**191.809**	**386.895**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

d. Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Secara umum lapangan usaha yang paling besar menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 86.485 jiwa, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17.349 jiwa, dan sektor Industri Pengolahan sebesar 9.809 jiwa. Secara detail dapat digambarkan dalam tabel dibawah.

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pertanian	43.990	36.086	**80.076**
2.	Manufaktur	13.456	5.346	**18.802**
3.	Jasa	49.479	46.188	**95.667**
Tapanuli Tengah		**106.925**	**87.620**	**194.545**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

e. Penduduk Menurut Pendidikan

Persentase penduduk berusia 10 tahun keatas yang masih tidak/ belum pernah bersekolah pada tahun 2022 sudah sangat jauh berkurang yaitu sebesar 0,42% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,48%.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 dan 2022

No.	Status Pendidikan	2022	2023
1.	Tidak / Belum pernah sekolah	**2,48**	**0,42**
2.	Masih Sekolah	**27,33**	**25,77**
	- SD/ MI/ Sederajat	8,86	7,98
	- SMP/ MTs/ Sederajat	8,20	8,02
	- SMA/ SMK/ MA/ Sederajat	6,83	6,61
	- Diploma/ Sarjana	3,44	3,16
3.	Tidak Bersekolah lagi	**70,18**	**73,81**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

f. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 47.070 jiwa atau sebesar 11,71%.

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di KabupatenTapanuli Tengah Tahun 2021 – 2023

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Tapanuli Tengah		
	2021	2022	2023
- Jumlah total (ribu jiwa)	49,95	47,07	47,09
- Persentase	12,67	11,71	11,50
- Garis Kemiskinan (rupiah/ kapita/ bln)	429.050	450.940	489.760

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging people's choise*). Dalam konsep tersebut penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir (*The ultimate end*), bukan cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (*Human capital formation*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah), 2019-2023.

Tabel 2.14

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah (miliar rupiah) 2019-2023

No	Kategori	2019	2020*	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4.512,63	4.682,30	4.906,09	5.440,65	5.911,56
2	Pertambangan dan Penggalian	26,28	26,20	27,62	29,90	32,42
3	Industri Pengolahan	1.127,03	1.133,10	1.232,82	1.350,04	1.421,54
4	Pengadaan listrik dan gas	56,87	57,53	59,82	64,88	66,79
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang	12,13	12,56	12,77	13,89	14,59

6	Kontruksi	1.192,60	1.170,78	1.246,27	1.361,31	1.515,55
7	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	1.229,06	1.246,49	1.327,07	1.462,36	1.584,87
8	Transportasi dan Pergudangan	276,47	259,80	231,17	280,50	346,06
9	Penyediaan Akomodasi dan makan minum	147,23	138,99	140,84	154,21	166,99
10	Informasi dan komunikasi	60,42	65,35	70,94	77,26	81,67
11	Jasa keuangan dan asuransi	97,04	98,92	108,86	115,48	121,03
12	Real Estate	201,85	208,59	215,09	230,82	245,46
13	Jasa Perusahaan	32,26	33,08	34,68	38,66	43,04
14	Adm. Pemerintahan, pertanahan dan Jamsos wajib	843,75	861,53	856,01	856,28	909,66
15	Jasa Pendidikan	98,21	99,16	103,83	110,17	117,19
16	Jasa Kesehatan dan Keg. Soaial	33,79	35,16	35,22	38,26	41,70
17	Jasa Lainnya	9,18	9,30	9,63	10,62	11,66
Produk Domestik Regional Bruto		**9.956,78**	**10.138,83**	**10.618,75**	**11.635,30**	**12.631,77**

*Catatan: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Grafik. 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 (miliar rupiah)

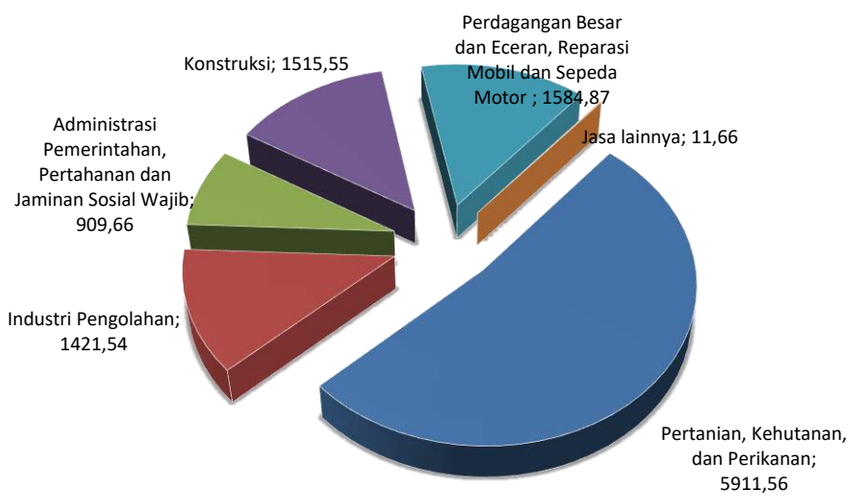

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita
Kabupaten Tapanuli Tengah (ribu rupiah), 2018-2023

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku
2018	24.934
2019	26.119
2020	27.868
2021	28.754
2022*	31.049
2023**	32.649

*Catatan: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan gambaran dari jumlah penduduk yang bisa baca tulis yang diupayakan tetap ditingkatkan agar dapat dipertahankan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.16
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf
Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapanuli Tengah, 2022 dan 2023

Kelompok Umur	Capaian	
	2020	2021
10-14	100,00	99,50
15-24	100,00	100,00
25-40	98,69	99,80
41-64	99,40	97,40
65+	92,23	93,70

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah suatu ukuran capaian dimensi utama pembangunan manusia yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup yang layak.

Tabel 2.17
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah
Dan Provinsi Sumatera Utara, 2021-2023

Komponen	Capaian Kabupaten	Capaian Provinsi Sumatera

	Tapanuli Tengah			Utara		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,16	71,47	71,76	73,10	73,39	73,67
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,07	13,24	13,49	13,27	13,31	13,48
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,84	8,86	8,87	9,58	9,71	9,82
Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	70.138	10.495	10.690	10.499	10.848	11.049
IPM	**71,48**	**72,18**	**72,77**	**73,84**	**74,51**	**75,13**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan IPM dari tahun 2021 s/d 2023 yaitu sebesar 72,77 namun masih berada dibawah pencapaian Provinsi Sumatera Utara. Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih harus berusaha dalam meningkatkan komponen indeks pembangunan manusia (IPM) dalam rangka pencapaian standar hidup yang layak.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Urusan kebudayaan terkait dengan penanaman nilai-nilai budaya, perlindungan dan pemeliharaan cagar budaya baik di daratan maupun di bawah air, pembinaan kesenian tradisional dan modern, menjalin kerjasama dengan berbagai daerah dan luar negeri.

Benda cagar budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup banyak, yang terbagi dalam benda bersejarah bergerak dan tidak bergerak. Benda bersejarah bergerak antara lain ulos, gondang batak, dan tenunan khas melayu. Sedangkan benda bersejarah yang tidak bergerak, yaitu makam pembawa ajaran Agama Islam, Kristen Protestan dan Kristen Katholik pertama kali di Pantai Barat Sumatera, Batu Lobang dan Monumen – monumen perjuangan yang ada di Kecamatan Sitahuis dan Tapian Nauli serta Situs Makam Mahligai dan Situs Makam Papan Tinggi sebagai pembawa ajaran Islam di Indonesia, Situs dimaksud berada di Kecamatan Barus Utara yang sangat penting untuk dibangun fasilitas pendukung sebagai tempat wisata religi.

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan.

Dalam rangka meningkatkan prestasi di bidang pemuda dan keolahragaan, selain mengadakan kompetisi Pemuda dan Keolahragaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan dana pengiriman atlet-atlet yang mengikuti perlombaan baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional, bantuan dana kepemudaan, bantuan dana keolahragaan dan bantuan alat olah raga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk meningkatkan capaian kinerja untuk urusan Pendidikan termasuk angka partisipasi, akreditasi sekolah, hingga pemberian beasiswa untuk siswa yang kurang mampu namun berprestasi. Berikut disajikan table capaian kinerja urusan Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2020 s/d 2023.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2023

NO	URAIAN	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**Murid/Siswa**					
	- TK/PAUD	8.652	7.492	3.366	6.921	8.495
	- SD/MI	45.121	43.938	45.168	37.555	44.108
	- SMP/MTs	21.979	20.154	22.663	17.853	23.840
2	**Guru**					
	- TK/PAUD	487	417	955	647	675
	- SD/MI	3.543	3.380	3.339	3.813	3.386
	- SMP/MTs	2.319	2.226	1.573	1.824	1.436
3	**Sekolah**					
	- TK/PAUD	249	246	304	228	228
	- SD/MI	351	351	353	352	352
	- SMP/MTs	103	104	106	108	108
4	**Angka Partisipasi**					
	- TK / PAUD					
	* APK	66,68	68,83	54,75	54,04	63,56
	- SD/MI					
	* APK	99,58	99,69	99,77	99,88	99,98
	* APM	96,51	97,31	98,73	99,13	99,58
	* Angka PutusSekolah	0,05	0,09	0,10	0,01	0,07
	* Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	12,74	12,83	15,53	11,76	13,02
	- SMP/MTs					
	* APK	95,21	96,71	98,45	98,68	99,10
	* APM	90,20	91,63	91,82	93,87	95,10
	* Angka Putus Sekolah	0,39	0,51	0,17	0,01	0,15
	* Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
	* Rasio Murid-Guru	9,58	11,13	14,40	13,28	16,60
5	Penduduk Berusia>15 Tahun Melek Huruf (%)	99,90	99,93	99,95	99,98	99,98

6	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	91,47	93,25	95,37	97,33	99,21
7	Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK/MA	97.87	97.87	98,24	98,45	99,63
8	Guru Pendidikan Dasar Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	85,38	88,34	94,22	96,86	97,89

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan upaya kesehatan terintegrasi dalam peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat penggerakan peran serta masyarakat; dan
3. Pusat pelayanan Kesehatan dasar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 sebanyak 25 unit yang terdiri dari 6 unit Puskesmas rawat inap dan 19 unit puskesmas non rawat inap.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas Pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara berkala oleh Puskesmas. Tujuan Puskesmas Pembantu adalah untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi Puskesmas Pembantu adalah untuk menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas, di wilayah kerjanya. Puskesmas Pembantu didirikan dengan perbandingan 1 (satu) Puskesmas Pembantu untuk melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) desa/kelurahan. Pendirian Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan dan ketenagaan. Tenaga minimal di Puskesmas Pembantu terdiri dari 1 (satu) orang perawat dan 1 (satu) orang bidan. Hingga tahun 2023 jumlah Puskesmas pembantu sebanyak 89 unit. Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi 2 yaitu Klinik pratama dan Klinik utama. Klinik pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Jumlah klinik di kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 sebanyak 17 unit.

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa. Poskesdes dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Jumlah Poskesdesdi kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir karena bangunan yang sudah tidak dapat dimanfaaatkan lagi dan ketidakaktifan petugas dalam memberikan pelayanan. Pada tahun 2023 jumlah Poskesdes sebanyak 42 unit.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan Kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Dalampenyelenggaraan posyandu, peran aktif ada di masyarakat, sedangkan petugas Kesehatan dan aparat desa/ kelurahan hanya bertindak sebagai fasilitator dan pelaksana kegiatan kesehatan/ medis. Pada tahun 2023, jumlah posyandu di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 385 unit.

Pelayanan keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam keadaan sehat maupun sakit. Jumlah perawat Kabupaten Tapanuli tengah pada tahun 2023 sebanyak 400 orang. Jumlah bidan Kabupaten Tapanuli tengah pada tahun 2023 sebanyak 771 orang. Jumlah dokter umum Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 sebanyak 65 orang. Jumlah dokter gigi Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 sebanyak 22 orang.

Tabel 2.19
Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya
Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Puskesmas	PUSTU	BPU/KLINIK	Poskesdes	Posyandu
1	2019	25	93	12	74	383
2	2020	25	91	15	42	385
3	2021	25	89	17	46	383
4	2022	25	89	16	42	385
5	2023	25	89	17	42	385

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Selain penyediaan sarana prasarana kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga berupaya dalam penyediaan tenaga kesehatan.

Tabel 2.20
Jumlah Perawat, Bidan, Dokter Umum, Doter Gigi, Dokter Spesialis
Di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Perawat	Bidan	Dokter Umum PNS/PTT	Dokter Gigi PNS/PTT	Dokter Spesialis
1	2018	384	755	38	12	-
2	2019	416	773	47	19	-
3	2020	438	788	47	20	-
4	2021	413	785	57	18	-
5	2022	412	734	58	19	-
6	2023	400	771	65	22	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Peningkatkan pelayan kesehatan kepada masyarakat diarahkan kepada Penurunan Stunting merupakan salah satu Proyek strategis Nasional sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditunjuk menjadi salah satu dari Kabupaten/Kota lokus penurunan stunting pada tahun 2020 hingga sekarang sesuai dengan Strategi Nasional Anak Kerdil Tahun 2018-2024.

Kondisi stunting merupakan sebuah sinyal bahwa balita tersebut pernah atau sedang dalam kondisi kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat dan berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 tahun 2021 disebutkan bahwa Keluarga Beresiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting.

Sebagai salah satu upaya dalam bidang pembangunan mausia, pelaksanaan percepatan stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah didukung dengan regulasi yang telah diterbitkan, antara lain :

1. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Peran Desa Dan Kelurahan Dalam Penanggulangan Stunting Terintegrasi
3. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 633/DPPKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Tim Sekretariat Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 – 2024
4. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1421/BPTT/2021 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

5. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 1183/BPTT/2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023
6. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 681/BPTT/2022 Tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

Secara umum, indikator penurunan stunting diukur dengan Prevalensi Stunting dan Keluarga Resiko Stunting. Prevalensi stunting adalah Perbandingan antara jumlah kasus balita stunting dibandingkan dengan jumlah balita yang diukur pada rentang waktu yang tertentu. Terdapat 2 metode pengukuran prevalensi stunting, yaitu melalui data yang diolah dari aplikasi elektronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan laporan Survey Standar Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Tabel 2.21
Data ePPGBM Tahun 2020 - 2023

No	Uraian Data	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Periode data e PPGBM yang digunakan	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023
2	Jumlah Balita diukur (Orang)	14.317	24.357	22.431	20.579	21.102
3	Cakupan Jumlah Balita yang diukur	51,97%	88,42%	88,08%	85.50%	88,61%
4	Jumlah Kasus di Kabupaten (Orang)	1.740	1.726	1.521	487	267
5	Prevalensi Stunting Kabupaten	12,15	7,09	6,78	2,37	1,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Dalam penurunan stunting terintegrasi, upaya dapat dilakukan dalam bentuk intervensi spesisifk dan sensitif. Untuk mendorong tercapainya target RPJMN Tahun 2020 – 2024, bahwa pada tahun 2024 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 14% dinilai perlu untuk melakukan penanganan secara fokus.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

Keluaran (*output*) dari kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan adalah Jalan Hotmix 1.050 m', Rabat 585,30 m', Pembangunan Jembatan 1 Unit, Rehab. Rambin 1 Unit, Plat Beton 4 Unit, Drainase 22 m', Dek 43 m' dan Galian Tanah 1.000 m. Dan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan menangani Hotmix

390 m', Sirtu 72 m', Base A 25,57 m', Tanah Timbun 15 m', Rehab Jembatan beton 2 Unit (26 m'), Rehab. Jembatan Lantai Besi 1 Unit (13 m'), Rehab. Jembatan Lantai Kayu 7 Unit (186 m'), Rehab. Rambin 1 Unit (71 m'), Plat Beton 1 unit, Dek66,70 m' dan Galian Saluran 30 m.

Hal ini memperlihatkan perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah cukup baik sehingga keadaan ini dapat membuat kemudahan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan demikian, diharapkan kondisi infrastruktur jalan ini memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa mendatang.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Nasional dan Provinsi yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023, untuk Jalan Nasional 181,89 km, Jalan Provinsi 56,50 km dan Jalan Kabupaten 722,57 km. Sedangkan untuk kondisi jalan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 yang Baik 306,08 km, Sedang 125,43 km, Rusak 73,08 km dan Rusak Berat 217,9 km.

Sedangkan untuk Total Jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 sebanyak 249 jembatan yang tersebar di 20 Kecamatan.

b. Kondisi Daerah Irigasi

Keluaran (output) dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terdiri dari beberapa pekerjaan yang berupa Bangunan Bagi 16 Unit, Saluran Pasangan (beton) 571 m', Rehab. Saluran Pasangan batu 159 m', Saluran pasangan Batu 18 m', Pintu Air 4 Unit. Pada Pemeliharaan Pemeliharaan Rutin Pengairan, Rawa dan Pantai terdiri dari Rehab. Saluran Pasangan 523 m' dan Talang 34 m'.

Irigasi yang menjadi kewengan Provinsi yang ada di kabupaten Tapanuli Tengah ada 3 Daerah Irigasi Mombang boru seluas 320 ha, Daerah Irigasi Badiri Lopian seluas 1.283 ha dan Daerah Irigasi Pandurungan/Sitandiang seluas 1.769 ha.

Tabel 2.22
Panjang dan Kondisi Jalan Jembatan dan Daerah Irigasi
Serta Luas Tata Ruang Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perkembangan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Panjang Jalan Kabupaten		722,57	722,57	722,57	722,57	722,57
	- Diaspal	Km	499,45	521,05	521,05	521,05	521,05
	- Kerikil	Km	84,12	62,52	62,52	62,52	62,52
	- Tanah	Km	139	139	139	139	139
	b. Panjang Jembatan Kabupaten						

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
	- Jembatan Rangka Baja	M	335	335	335	335	335
	- Jembatan Beton	M	2.022	2.022	2.022	2.022	2.022
	- Jembatan Kayu	M	265	265	265	265	265
	- Gelagar Kayu	M	15	15	15	15	15
	- Gelagar Besi	M	247	247	247	247	247
	- Jembatan Rambin	M	662,2	662,2	662,2	662,2	662,2
2.	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten						
	a. Jalan Kabupaten						
	- Baik	Km	301,88	363,27	391,20	401,90	306,08
	- Sedang	Km	51,43	51,43	51,43	56,43	125,43
	- Rusak	Km	244,30	182,91	154,98	144,98	73,08
	- Rusak Berat	Km	124,96	124,96	124,96	119,26	217,98
	b. Jembatan Kabupaten						
	- Baik	M	2.172,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45	2.272,45
	- Sedang	M	246,8	246,8	246,8	246,8	246,8
	- Rusak	M	382,56	382,56	382,56	382,56	382,56
3	Jenis Bendung						
	a. Bendung Teknis/ Permanen	Buah	59	59	59	59	59
	b. Bendung Semi Permanen	Buah	2	2	2	2	2
	c. Bendung Sederhana	Buah	5	5	5	5	5
4	Kondisi Bendung Permanen						
	- Baik	Buah	29	30	31	31	31
	- Sedang	Buah	24	23	22	22	22
	- Rusak	Buah	6	6	6	6	6
5	Kondisi Bendung Semi Permanen						
	- Baik	Buah	1	1	1	1	1
	- Sedang	Buah	-	-	-	-	-
	- Rusak	Buah	1	1	1	1	1
6	Kondisi Saluran Irigasi Primer						
	- Baik	M	28.154,13	28.154,13	30.803,13	32.961,63	34.296,63
	- Sedang	M	13.950,44	13.950,44	11.301,44	9.142,94	8.949,94
	- Rusak	M	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	SAT	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
5	Kondisi Saluran Irigasi Sekunder						
	- Baik	M	70.229,12	74.697,32	77.065,32	78.584,12	79.829,12
	- Sedang	M	28.475,17	24.842,47	22.474,47	20.955,67	19.710,67
	- Rusak	M	4.036,71	3.201,21	3.201,21	3.201,21	3.201,21
6	Kondisi Saluran Irigasi Tersier						
	- Baik	M	23.284,93	26.715,73	26.715,73	26.715,73	26.715,73
	- Sedang	M	11.341,11	9.207,81	9.207,81	9.207,81	9.207,81
	- Rusak	M	7.874,81	6.577,31	6.577,31	6.577,31	6.577,31
7	Luas Irigasi Kabupaten	Ha	12.853	12.853	12.853	12.853	12.853
	- Baik	Ha	8.141,09	8.673,20	9.040,80	9.323,56	9.419,69
	- Baik	%	63,34	67,48	70,34	72,54	73,29

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Tengah

c. Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap daerah harus telah menyesuaikan RTRW terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2013-2033 adalah untuk mewujudkan kabupaten Tapanuli Tengah sebagai salah satu pusat perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan pariwisata di kawasan barat Sumatera Utara.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

1. Untuk mencapai pemanfaatkan potensi sumber daya alam secara tepat guna yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka dilakukan strategi sebagai berikut:
   a. Melestarikan areal pertanian lahan basah yang sudah ada melalui upaya intensifikasi dengan di dukung jaringan irigasi yang mantap.
   b. Mempertahankan kawasan hutan dan areal lindung lainnya dalam rangka penyangga sumber daya air, penyaring polusi udara, keanekaragaman hayati dan penangkal bencana untuk daerah bawahannya.
   c. Menetapkan jenis komoditi pertanian dan perkebunan sesuai dengan karakteristik alam dan lingkungan melalui zonasi komunitas.

d. Pembangunan mini hidro pada aliran sungai yang berpotensi dan pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga angina.
e. Menetapkan, memanfaatkan, dan mengendalikan kawasan penambangan galian C.

2. Untuk melakukan pengembangan kegiatan sosial ekonomi pada kawasan perkotaan yang dikembangkan melalui prinsip optimalisasi pemanfaatan lahan, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
   a. Menetapkan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi kegiatan ekonomi masyarakat
   b. Mempercepat tersusunnya rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk kawasan perkotaan.
   c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan pada waktu yang tepat.
3. Untuk melakukan penyediaan insfrastruktur untuk mendukung perkembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka dilakukan strategi sebagai berikut :
   a. Jaringan Transportasi
   1) Menyediakan jaringan transportasi darat yang menunjang pengembangan daerah dengan:
      a) Merencanakan jaringan jalan baru, meningkatkan kapasitas pelayanan jalan yang ada dan menetapkan terminal angkutan penumpang dan barang serta daerah tempat istirahat (*rest area*) pada jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
      b) Merencanakan jalur kereta api yang baru, meningkatkan kapasitas pelayanan kereta yang ada, pembangunan dan peningkatkan stasiun angkutan penumpang dan barang.
   2) Mengembangkan transportasi udara dengan mengembangkan dan memelihara bandara perintis di Kecamatan Pinangsori.
   3) Mengembangkan jaringan air baku untuk kegiatan domestik, industri dan irigasi untuk pertanian dalam jumlah yang cukup dan berkualitas.
   4) Mengembangkan jaringan listrik melalui pembangunan pembangkit listrik mini hidro, energi angin, energi bio massa dan sumber energi listrik lainnya yang berkapasitas besar serta mengembangkan sistem jaringan listrik yang efektif melalui pengembangan jaringan kluster dan interkoneksi.
   5) Mengembangkan jaringan telekomunikasi guna mempercepat arus informasi yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.
   6) Mempersiapkan jaringan gas sebagai sumber energi baru dalam rangka menunjang kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
4. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dalam rangka pemerataan pembangunan, antara lain:
   a. Mengembangkan stasiun agropolitan guna mendukung daerah pegunungan

b. Mengembangkan kawasan pariwisata guna mendukung pembangunan di daerah.
c. Mengembangkan kawasan industri Kecamatan Tapian Nauli, Sarudik, dan Barus guna mendukung pembangunan agroindustri
d. Mengembangkan Ibukota Kabupaten di Pandan sebagai pusat pemerintahan.
e. Menetapkan PKL, PPK, dan PPL.

Struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai.

Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten juga memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 disebutkan bahwa rencana struktur ruang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, maka Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah direncanakan meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana.

Pusat permukiman tersebut mempunyai fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi komoditas/jasa dan tumbuh secara berjenjang/berhierarki sesuai dengan fungsi dan perannya, baik sebagai pusat pengembangan maupun pusat kegiatan.

Rencana sistem jaringan yang dimaksud terdiri dari rencana sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya, sistem jaringan prasarana dan sarana lainnya seperti sistem jaringan persampahan, penyediaan air minum, drainase, dan air limbah.

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
c. Pusat Kegiatan Lingkungan (PPL)

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri, Perdagangan dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan hasil analisis pusat pelayanan kabupaten, kecamatan yang merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:

a. Barus
b. Pandan

Besaran Potensi Lokasi PKL di dua daerah sangat baik, mudah dan menguntungkan di karenakan Pandan merupakan Pusat Ibukota Kabupaten dan Kecamatan Barus banyak di keliingi oleh Destinasi wisata dan Transportasi masih mudah terjangkau.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesisibiltas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

2.1.3.1.3. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan Rumah Layak Huni Secara Stimultan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu, dimana pembangunan rumah layank huni yang terbangun pada Tahun 2023 sebanyak 70 unit dari dana DAU, 50 unit dari dana APBD Provinsi dengan total sebanyak 120 unit rumah. Untuk lebih jelasnya ada pada tabel dibawah ini. Untuk data pembangunan RTLH (rumah tidak layak huni) sejak tahun 2023-2026 dapat disajikan data berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2023-2026

No.	Pembangunan Baru/ Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)					
	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	Tahun	Satuan	Target RPD	Realisasi	Keterangan
1.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2023	Unit	30	70	Sumber dana DAU
	Peningkatan RTLH		Unit	-	50	Sumber dana APBD Provinsi
2.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2024	Unit	30	-	Sumber dana DAU
3.	Pembangunan Baru Rumah Layak Huni	2025	Unit	30	-	Sumber dana DAU
4.	Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH	2026	Unit	30	-	Sumber dana DAU
Total Pembangunan Baru/ Peningkatan RTLH pada Tahun 2023 – 2026 (Target RPD)			Unit	120	120	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat wewenang dalam memelihara Kantrantibmas dan pencegahan tindakan kriminal serta Pemadaman Kebakaran tersebut berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan beberapa tindakan dengan menugaskan pesonil yang dimiliki. Bentuk konkrit dari penyelenggaraan Kantrantibmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah berupa :(1) pelaksanaan operasi rutin terkait pelanggaran peraturan daerah, (2) patroli bersifat priodik terkait kondusifitas ketentraman masarakat dan ketertiban umum serta (3) pembinaan dan peningkatan anggota Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta (4)Tugas Pemadaman kebakaran.

Tabel 2.24
Perkembangan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal Tahun 2020 – 2023

NO.	URAIAN	Satuan	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP + Damkar)	Orang	366	347	365	380	364
2.	Jumlah Linmas	Orang	2.076	2.076	2.076	2.076	2.660

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.25
Perkembangan Penertiban di Kabupaten
Tapanuli Tengah Tahun 2021 – 2023

No.	Operasi Penertiban	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%	Target Objek Penertiban	Realisasi Penindakan	%
1.	Peningkatan Disiplin PNS	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Penertiban IMB	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Operasional Kasih Sayang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Pengamanan Objek Vital	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Penertiban PSK dan Sarang Prostitusi	100	973	973	100	100	100	100	100	100
6.	Penegakan Perda	100	95	95	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.26
Data Hasil Penindakan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Tahun 2023

NO.	NAMA OPERASI	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1.	Operasi Penutupan sarang Prostitusi	0	Tempat	-
2.	Operasi Pedagang Kaki Lima	3	Kegiatan	Operasi Penertiban Pedagang kaki lima (per kegiatan/tahun) berdasarkan aduan masyarakat
3.	Operasi Wanita Rawan Sosial	24	Orang	Operasi penertiban Wanita Rawan Sosial
4.	Operasi Hewan Berkaki Empat	0	Ekor	-
5.	Operasi Kasih Sayang	23	Orang (Anak Usia Sekolah)	Penertiban Anak Usia Sekolah Pada Jam Belajar

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki hamparan gunung, pantai, laut dan sungai (GUPALA). Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah, yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di daerah pegunungan. Dengan kondisi geografis seperti ini Kabupaten Tapanuli Tengah juga rentan akan terjadinya bencana. Berikut disampaikan rekapitulasi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.27
Kejadian Bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023

No.	TANGGAL	LOKASI	KORBAN JIWA	KETERANGAN
A. BENCANA BANJIR				
1.	02-04-2023	Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Barus	Tidak ada	Dikarenakan Kondisi curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan memasuki beberapa ruamh warga khususnya yang tinggal disekitar jembatan
2.	28-04-2023	Desa Sigambo-gambo Kecamatan Barus	Tidak ada	Dikarenakan Kondisi curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan banjir dan memasuki beberapa ruamh warga khususnya yang tinggal disekitar jembatan
3.	05-09-2023	Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik	Tidak ada	Dikarenakan Curah hujan tinggi disertai angin kencang sehingga air laut naik pasang dan mengakibatkan banjir
4.	15-09-2023	Jembatan Pinangsori Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	Dikarenakan Jembatan Pinangsori mengalami penurunan pondasi pilar akibat gerusan air (scooring) sehingga
5.	20-09-2023	Desa Sigambo-gambo Kecamatan Barus	Tidak ada	Beberapa rumah terkena banjir akibat curah hujan yang sangat deras sehingga mengenai rumah warga
6.	29-09-2023	Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik	Tidak ada	Pada jam 3.00 dini hari terjadi hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan kebanjiran dan hamper memasuki rumah warga
7.	21-11-2023	Desa Pasar Terandam, Desa Kinali, Desa Ujung Batu, Desa Sigambo-gambo, Kelurahan Batu Gerigis, Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus	Tidak ada	Pada Jam 22.00 s/d 05.00 terjadi hujan dengan intensitas yang sangat tiggi sehingga mengakibatkan kebanjiran dan hampir memasuki rumah warga
8.	21-12-2023	Desa Mungkur Kecamatan Tapian Nauli	Tidak ada	Pada Tanggal 20 Desember 2023 telah terjadi banjir ynag diakibatkan tingginya curah hujan, sehingga

				mengakibatkan Sebagian ruas jalan di desa tersebut tergenang air dan sebagian air memasuki rumah warga
B. Bencana Longsor				
9.	12-04-2023	Desa Unte Mungkur IV, Kecamatan Kolang	Tidak ada	BPBD, Camat Kolang, TNI/BABINSA, Beserta Warga melakukan pembersihan material longsor disepanjang aliran Sungai.
10.	23-04-2023	Desa Simaninggir	Tidak ada	1. Terjadinya Longsor di Batu Lubang sehingga Pohon terjatuh tepat diatasnya dan menutupi langit-langit terowongan 2. Tim BPBD melakukan pembersihan pohon tumbang diatas batu lubang
11.	28-04-2023	Perumahan Cemara Asri Sibuluan Kecamatan Pandan	Tidak Ada	1. Terjadinya Longsor diakibatkan curah hujan ynag sangat deras sehingga mengakibatkan rubuhnya sebuah rumah 2. Tim BPBD melakukan Evakuasi Rumah yang longsor dan melakukan pembersihan
12.	28-04-2023	Perumahan GMS Matauli Pandan Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Terjadinya Longsor diakibatkan curah hujan yang sangat deeras sehingga mengakibatkan longsor dan menimpa satu unit rumah 2. Tim BPBD melakukan Evakuasi Rumah yang longsor dan melakukan pembersihan
13.	28-04-2023	Desa Sipange Lingkungan 4 Barung-barung Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Terjadinya Longsor diakibatkan curah hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan longsor dan menutupi akses jalan 2. Tim BPBD melakukan evakuasi rumah yang longsor dan melakukan pembersihan
14.	28-04-2023	Jl. Sibolga-Tarutung Bonandolok Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	Terjadinya Longosr diakibatkan curah hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan jalan amblas dan membuat kendaraan roda 4 tidak bisa lewat
15.	13-08-2023	Desa Sigiring-giring Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Terjadinya Longsor diakibatkan curah hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan longsor dan menutupi akses jalan 2. Tim BPBD melakukan pembersihan material longsor dengan menggunakan alat berat

16.	06-09-2023	Jl. Kapten Pattimura Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh cerah hujan yang sangat deras sehingga mengenai rumah warga A.N Medi Sitanggang 2. Tim BPBD melakukan pembersihan material longsor
17.	09-09-2023	Jalan Lintas Sibolga-Kolang Desa Unte Mungkur IV Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Melakukan Pembersihan di lokasi longsor bersama warga sekitar
18.	15-09-2023	Jalan Lintas Ruas-Rampah-Poriaha Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga menutup ruas jalan dan membuat perjalanan terhenti
19.	20-09-2023	Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras sehingga menutup ruas jalan dan membuat perjalanan terhenti
20.	20-09-2023	Dusun Napitupulu Desa Satahi nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras sehingga mengenai rumah warga (rusak ringan)
21.	25-09-2023	Desa PO Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan tanah longsor
22.	25-09-2023	Desa Sidaling Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras sehingga mengakibatkan tanah longsor
23.	01-11-2023	Dusun III Desa Mombang Boru Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	1. Pada tanggal 31 Oktober 2023 Jam 18.00 telah terjadi amblasnya gorong-gorong jalan penghubung Dusun III ke Dusun II dan Dusun I
24.	09-11-2023	Lingkungan IX Kel. Sibabangun Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	1. Pada jam 5.00 pagi telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan tanah longsor dan menutup akses jalan
25.	14-11-2023	Jalan Nasional KM 6 Kecamatan Sitahuis	Tidak ada	1. Pada Jam 20.00 Telah terjadi longsor di desa Bonandolok sehingga akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan
26.	19-11-2023	Dusun IV Pancur Malaka Desa Mela I Kecamatan Tapian Nauli	Tidak adda	1. Pada jam 23.30 telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan 1 unit rumah tertimpa tanah longsor yang mengakibatkan dapur dan

				ruang tengah rumah dipenuhi tanah longsor. Pemilik rumah A.n Andi Marbun
27.	20-11-2023	Desa Simarpinggan Kecamatan kolang	Tidak ada	1. Telah terjadi bencana longsor di jalan menuju desa simarpinggan yang mengakibatkan jalur transportasi putus total atau tidak dapat dilaui dikarenakan jalannya amblas. Kerugian 1 unit mobil pickup jatuh ke jurang bermuatan durian
28.	21-11-2023	Desa Simargarap Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan tanah longsor
29.	12-12-2023	Desa Bair Kecamatan Tapian Nauli	Tidak ada	1. Pada Jam 20.20 Wib, tanggal 11 Desember 2023 telah terjadi longsor yang menimpa 1 unit rumah Dimana dinding rumah tersebut roboh (Rusak Berat) pemilik rumah Bernama Janter Simanjuntak (60 Tahun) / Roslina br Tarihoran (63 Tahun) 2. Tim BPBD melakukan pendataan dan pembersihan tanah longsor yang menimpa rumah warga tersebut
C. BENCANA BANJIR DAN LONGSOR				
30.	02-05-2023	Desa Muara Sibuntuon, Dusun I Aek Nahombar Kecamatan Sibabangun	Tidak ada	1. Telah terjadi banjir bandang sehingga jembatan rusak parah yang mengakibatkan jalur jalan Masyarakat lumpuh total
D. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN				
31.	31-1-2023	Desa Mekarti Nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Kebakaran lahan terjadi disebabkan oleh warga yang ingin membakar sampah dengan tujuan membuka lahan baru 2. Tim BPBD turun langsung ke lokasi bencana untuk mengevakuasi dan membantu memadamkan api dilokasi bantu oleh pihak POLRI serta Masyarakat setempat.

32.	25-02-2023	Kelurahan Sibuluan Indah, Komplek Pemakaman	Tidak ada	1. Kebakaran lahan terjadi dikarenakan cuaca yang panas sehingga terbakarnya daun kering dengan cepat menyebar membakar hutan
33.	26-02-2023	Trans SP3 Desa Satahi Nauli Kecamatan Kolang,	Tidak ada	1. Kebakaran lahan terjadi dikarenakan cuaca yang panas sehingga terbakarnya daun kering dengan cepat menyebar membakar hutan. 2. Tim BPBD membantu memadamkan api di lokasi bencana dan dibantu oleh pihak Aparatur Desa serta Masyarakat setempat.
34.	09-03-2023	Lingkungan II Kalangan Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Kebakaran lahan disebabkan oleh pemilik lahan Farhan Koto membakar rumput disekitar lahan miliknya dan meninggalkan lahan tersebut. Pada saat pemilik meninggalkan lahan, cuaca yang saat itu berangin menyebabkan api semakin membesar dan menghanguskan lahan ⍰1,5 hektar lahan. 2. Tim BPBD Babinkamtibmas, babinsa, lurah kalangan dan warga sekitar melakukan pemadaman api dan memutus jalur api agar tidak sampai ke rumah warga
35.	09-03-2023	MBC belakang ruko Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Kebakaran lahan terjadi dikarenakan cuaca yang panas sehingga terbakarnya daun kering dengan cepat menyebar membakar hutan. 2. Tim BPBD membantu memadamkan api di lokasi bencana.

36.	31-05-2023	Desa Rawa Makmur Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Kebakaran lahan terjadi dikarenakan cuaca yang panas sehingga terbakarnya daun kering dengan cepat menyebar membakar hutan. 2. Tim BPBD membantu memadamkan api di lokasi bencana.
37.	03-06-2023	Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan cuaca yang sangat panas beberapa hari terakhir sehingga rumput kering dan mudah terbakar.
38.	16-06-2023	Desa Pulo Pane Kecamatan Sosorgadong	Tidak ada	1. Terjadinya kebakaran lahan seluas +/- 15 Ha dan penyebab kebakaran tersebut belum diketahui 2. Tim BPBD, TNI, Polri dan Damkar beserta Masyarakat Setempat membantu memadamkan api supaya tidak menjalar sampai ke pemukiman warga.
39.	17,18-06-2023	Desa Satahi (Perkebunan SP3) Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan seluas 5 Ha dan masih ada beberapa titik api yang menyala serta berasap.
40.	19-06-2023	Desa Ramba Goring-goring Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan cuaca yang sangat panas beberapa hari terakhir sehingga rumput kering dan mudah terbakar.
41.	21-06-2023	Kelurahan Sibuluan Nauli Jl. PLTA Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan cuaca yang sangat panas beberapa hari terakhir sehingga rumput kering dan mudah terbakar.
42.	22-06-2023	Kelurahan Sarudik JLN. Jetro Hutagalung Kecamatan Sarudik	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan cuaca yang sangat panas beberapa hari terakhir sehingga

				rumput kering dan mudah terbakar.
43.	24-06-2023	Kelurahan Hajoran Indah Lingkungan III Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan oleh kelalaian seorang nenek yang sedang membakar sampah sehingga api menyebar hampie kepemukiman warga.
44.	29-06-2023	Kelurahan Tukka Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran Lahan kosong (bukit) diakibatkan cuaca yang sangat panas beberapa hari terakhir sehingga rumput kering dan mudah terbakar.
45.	28 Juli 2023	Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Telah terjadi kebakaran lahan masyarakat diakibatkan terbakarnya semak belukar akan tetapi apinya telah padam.
46.	30 Juli 2023	Desa Aek Nadua Kecamatan Pasaribu Tobing	Tidak ada	1. Telah terjadi kebakaran lahan masyarakat diakibatkan terbakarnya semak belukar akan tetapi apinya telah padam.
47.	Kebakaran Hutan Senin, 07 Agustus 2023 Pukul 07.00 Wib	Desa Hudopa Nauli Kecamatan Kolang	Tidak ada	1. Tim BPBD dan Personil Polsek Kolang mengecek kelokasi yang terpantau dari aplikasi sebanyak 2 titik dengan tingkat medium. Tetapi api tersebut telah padam dikarenakan turunnya hujan.
48.	Kebakaran Hutan Selasa, 08 Agustus 2023 Pukul 07.00 Wib	Desa Sipakpahi Kecamatan Sorkam	Tidak ada	1. Tim BPBD dan Personil Polsek Sorkam mengecek kelokasi yang terpantau dari aplikasi sebanyak 2 titik dengan tingkat medium. Tetapi api tersebut telah padam dikarenakan turunnya hujan.
E. KEBAKARAN RUMAH DAN GEDUNG				
49.	14 Januari 2023	Lingkungan IV Kelurahan Sipange Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Akibat anak yang bermain mancis di dalam kamar, mengakibatkan terjadinya kebakaran di dalam rumah. 2. Tim BPBD membantu memadamkan api di lokasi

				bencana.
50.	13-03-2023	Jln. Oswald Siahaan, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Terjadinya Kebakaran 2 unit kios sembako dan 3 unit kamar kontrakan milik ibu Hj, Resmiati Pohan. 1. Tim BPBD, TNI, Polri, Damkar dan warga setempat membantu mengevakuasi sekaligus memadamkan api di lokasi bencana.
51.	30-03-2023	Desa Sidikkalang, kecamatan Sorkam Barat	Tidak ada	1. Terjadinya korsleting listrik pada satu rumah sehingga mengakibatkan kebakaran menjalar ke 3 titik rumah. 2. Tim BPBD, Camat Sorkam Barat beserta jajarannya, DANRAMIL, DAMKAR, KAPOLRI dan Warga setempat mengevakuasi warga yang terkena dampak bencana ketempat yang lebih aman.
52.	1 April 2023	Dusun II Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Sukabangun	1 orang Mengalami Luka Bakar	1. Terjadinya kebakaran berasal dari dapur, namun api begitu cepat membesar karena bangunan rumah seluruhnya terbuat dari kayu dan barang-barang isi warung yang mudah terbakar. 2. Tim BPBD ,Camat Sukabangun ,DAMKAR dan Warga Setempat mengevakuasi warga yang terkena dampak bencanda dan ikut memadamkan api.
53.	13 April 2023	Lingkungan VI Aek Tolang Induk, Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Terjadinya kebakaran berasal dari tabung kompor gas yang mengakibatkan ledakan api yang melahap dapur dan 2 unit rumah yang berada disamping dapur; 2. Tim BPBD , babinsa , DAMKAR dan Warga Setempat mengevakuasi warga yang terkena dampak bencanda dan ikut memadamkan api.
54.	21-05-2023	Lingkungan III Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Terjadi kebakaran rumah diakibatkan oleh arus pendek

55.	09-08-2023	Lingkungan VIII Kecamatan Sibabangun	1 Orang Terluka Ringan (Antonius Silalahi)	1. Telah terjadi kebakaran Rumah diakibatkan meteran lampu milik PLN meledak.
F. POHON TUMBANG				
56.	14 Maret 2023	Desa Gotting Mahe, Kecamatan Sorkam	Tidak ada	1. Pada jam 18.00 curah hujan turun dengan intensitas sangat tinggi disertai angin yang mengakibatkan pohon tumbang 2. Tim BPBD, Camat Sorkam beserta jajarannya dan warga setempat melakukan evakuasi pohon tumbang.
57.	03-05-2023	Desa Pahieme 1 Kecamatan Sorkam	Tidak ada	1. terjadi pohon tumbang diakibatkan angin yang begitu kencang sehingga menimpa 1 unit rumah warga.
58.	05-05-2023	Jalan Lintas Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	1. 1. terjadi pohon tumbang diakibatkan angin yang begitu kencang sehingga menimpa 1 unit rumah warga.
59.	01-07-2023	Kelurahan Albion Perancis Kecamatan Pinangsori	Tidak ada	1. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon sawit tumbang dan menimpa salah satu rumah warga (Surahman 47 tahun)
60.	25-08-2023	Kelurahan Bonan Lumban Lingk. V Kecamatan Tukka	Tidak ada	1. Telah terjadi pohon sawit tumbang
61.	09-09-2023	Kelurahan Sorkam Kecamatan Sorkam Barat	Tidak Ada	1. Melakukan pembersihan pohon tumbang
62.	15-09-2023	Jalan Lintas Ruas Tarutung-Sibolga (Bonandolok) Kecamatan Sitahuis	Tidak Ada	1. Telah terjadi longsor diakibatkan oleh curah hujan yang sangat deras sehingga menutup ruas jalan dan membuat perjalanan terhenti.
63.	15 November 2023	Kel. Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik	Tidak Ada	1. Pada tanggal 13 Nov 23 jam 19.30 telah terjadi pohon tumbang yang menimpa rumah warga an. Laidin Purba diakibatkan derasnya hujan pada saat itu.

G. ORANG HANYUT				
64.	20 September 2023	Desa Mardame Kecamatan Sitahuis	1 Orang atas nama Kenzo Pandiangan (Meninggal Dunia)	1. Kronologi : korban mandi disungai aek panampahan belakang mesjid mardame tiba-tiba arus sungai naik dan menghanyutkan korban. 2. Dilakukan pencarian dan ditemukan sekitar 15 meter dari tempat kejadian dalam kondisi meninggal
65.	05 s/d 07 Desember 2023	Desa Pasaribu Tobing Kecamatan Pasaribu Tobing	3 Orang Korban diantaranya 2 Selamat dan 1 Meninggal Dunia Berikut data korban : 1. Olive Hutagalung (Pr) 11 Tahun – Berhasil Diselamatkan 2. Narin Hutagalung (Pr) 9 Tahun – Berhasil Diselamatkan Kelesia bondar (Pr) 10 Tahun – Meninggal Dunia	1. Kronologi : para korban mandi dipinggiran sungai aek sibundong pada tanggal 3 desember 2023 sekitar pukul 15.15 wib. tiba-tiba ke 3 anak tersebut terseret arus sungai yang cukup deras sehingga menghanyutkan para korban, 2 korban berhasil diselamatkan oleh warga yang sedang berada dipinggiran sungai tersebut, namun 1 korban lagi tidak berhasil diselamatkan warga dan dinyatakan hilang terseret arus sungai. 2. Tubuh korban baru ditemukan pada hari jum'at dengan kondisi (meninggal Dunia) 3. Tim BPBD, dan Basarnas melakukan pencarian di sepanjang sungai bundongan
H. ANGIN KENCANG				
66.	01 Juli 2023	Kelurahan Muara Nibung Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Telah terjadi musibah yaitu rumah rubuh diakibatkan angin kencang.
67.	23 Juli 2023	Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	2. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan atap rumah ibadah terbang.
68.	23 Juli 2023	Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan atap pondok tempat wisata

				hancur.
79.	05 September 2023	Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan	Tidak ada	1. Telah terjadi musibah yaitu rumah rubuh diakibatkan hujan deras disertai angin kencang.

Sumber : BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. Pelayan Informasi Rawan Bencana
   Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah rawan bencana yang ditargetkan sebanyak 3.000 jiwa
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
   Memberikan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi warga yang ada di daerah rawan bencana.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   Memberikan Penyelamatan dan Evakuasi kepada korban bencana yang ada di daerah rawan bencana.

2.1.3.1.5. Sosial

Urusan Sosial adalah salah satu Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang mengurusi bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pelaksanaan tugas pembangunan, baik pelayanan kepada masyarakat melalui pembinaan, penyuluhan dan pendampingan yang pada hakekatnya berpedoman pada hukum dan kebijakan yang sejalan dengan hakekat otonomi itu sendiri yaitu khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial, yang berpedoman kepada Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan sasaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan keluarga miskin yang harus ditangani secara professional dan sungguh-sungguh. Adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial berdampak pada masalah-masalah lain seperti masalah pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi dan masalah lainnya. Agar Pembangunan Kesejahteraan Sosial segera dapat mengentaskan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan adanya dukungan dan peran serta masyarakat untuk mau ikut memecahkan masalah ini, sehingga nantinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat menempuh kehidupan yang layak, berkemampuan, bermartabat sebagai manusia layaknya.

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 memang belum sepenuhnya mencapai target yang

telah ditetapkan. Adapun belum tercapainya kegiatan dari program yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menanggapi adanya bencana yang terjadi baik bencana alam maupun bencana sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Adanyan keterbatasan dukungan anggaran Dinas Sosial.
3. Kurangnya jumlah dan kualitas aparatur yang dimiliki Dinas Sosial relatif terbatas.
4. Kurangnya jumlah pekerja sosial yang dimiliki Dinas Sosial mengingat letak strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat luas, sehingga belum mampu menutupi kebutuhan dalam pendampingan di masyarakat.

Adapun capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang telah di tetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 terdiri dari:

a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program Pemberdayaan Sosial, mempunyai satu kegiatan yaitu Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan keluaran sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota dan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota.

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial dengan tolak ukur nya adalah jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya adalah 99,6%.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan TKSK dan Pekerja Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial sehingga dihasilkan data valid tentang PPKS di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi ke Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan Operator Data Terpadu di 20 Kecamatan se - Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan ini juga terjalin atas kerjasama lintas sektoral antara operator yang berada disetiap desa/kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Penanggung - jawab data yang ada di Layanan Data Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program rehabilitasi sosial merupakan program yang bertujuan untuk pemulihan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar masyarakat. Program ini mempunyai kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan

korban HIV/AIDS di luar panti sosial. Capaian Kinerja Program Rehabilitasi Sosial adalah 98,4%.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis, wanita rawan sosial (waras) yang dilakukan penertiban (ditangkap) oleh Satuan Pamong Praja (Satpol PP) dan yang di bawah binaan lembaga di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk wanita rawan sosial (Waras) hasil penertiban dilakukan pembinaan di rumah singgah sebelum di kirim ke UPT. Parawansa di Berastagi, yang merupakan tempat pembinaan rehabilitasi di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk PMKS/PPKS lainnya dilakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhannya. Pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 151 orang.

Operasional Rumah Singgah

Tujuan umum adanya Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah adalah membantu anak jalanan sehingga masalah dapat teratasi dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, tempat singgah Wanita Rawan Sosial (WTS) yang terjaring razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kemudian di data dan di bina selanjutnya WTS tersebut akan di kirim ke Parawansa UPT Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara untuk di bina kembali dan diberikan pembekalan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan hidup bermasyarakat, serta tempat persinggahan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar.

Selama Tahun 2023, Dinas Sosial memiliki 1 (satu) unit Rumah Singgah yang berada di RSUD Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dan sudah menampung 40 Orang WTS, 1 Orang yang terkena HIV / AIDS dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 10 orang.

c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu:

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah yang hasil akhirnya adalah tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) periode Desember 2023 sebanyak 63.464 (Keluarga) dan 236.588 (Individu) serta data masyarakat miskin yang mendapat bantuan dan santunan seperti Sembako sebanyak 28.789 Keluarga penyaluran melalui Himbara dan 2.807 Keluarga penyaluran

melalui Kantor POS, PBI sebanyak 161.663 Jiwa, dan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (SANKEM) sebanyak 308 Jiwa.

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten/Kota di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu berupa biaya sekretariat PKH (Program Keluarga Harapan) Kegiatan PKH di Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai Pendamping PKH di 20 (duapuluh) Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan jumlah pendamping tahun 2023 sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, yang terdiri dari koordinator kabupaten 1 (satu) dan 52 (lima puluh dua) orang sebagai pendamping kecamatan. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 sebanyak 17.991 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang terdiri dari 16.478 orang peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyaluran melalui HIMBARA dan sebanyak 1.513 orang peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyaluran melalui Kantor POS. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak 5-7 tahun yang belum masuk SD dari Rumah Tangga sangat miskin (RTSM), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan dan pendidikan. Hal ini mengingat ke-2 (dua) sektor diatas merupakan inti peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

d. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program Penanganan Bencana mempunyai kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang sub kegiatannya adalah penyediaan makanan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Penyediaan Makanan untuk korban bencana (penyediaan Buffer Stock) di Kabupaten Tapanuli Tengah diberikan untuk korban bencana alam seperti angin puting beliung, dan bencana sosial (kebakaran). Pada Tahun 2023 Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan awal berupa Beras 30 Kg, Telor 1 Papan, Mie Instan 1 Karton per Kepala Rumah Tangga sesuai dengan "Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial" kepada 61 KK atau 294 Jiwa. Bantuan tersebut ditambah dengan Logistik dari Kementerian Sosial RI berupa Paket Lauk Pauk, Paket Perlengkapan Bayi, Matras, Selimut, Perlengkapan Dapur, dan Sandang.
2. Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Di Kabupaten Tapanuli Tengah

tahun 2023 berupa Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin (SANKEM) Penyaluran Santunan Kematian Keluarga Miskin (SANKEM) bertujuan untuk membantu dan meringankan beban keluarga ahli waris sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di peruntukkan kepada masyarakat atau keluarga miskin atau kurang mampu di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Pada Tahun 2023, sebanyak 308 Jiwa yang sudah menerima SANKEM dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.3.1.6 Tenaga Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga Kerja yang dimaksud disini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu berusia 15 tahun sampai 64 tahun.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2019 – 2023

No	Ketenagakerjaan	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Jiwa	176.988	171.470	185.218	201.096	210.141
2	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun)	Jiwa	234.654	239.854	261.202	267.955	274.672
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	75,42	71,49	70,90	75.05	76,51
4	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan	Jiwa	1.010	339	7	165	68
5	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar	Jiwa	1.249	452	252	398	349
6	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persen	80,84	75	81,13	41,45	18,62
7	Jumlah Pencari Kerja	Orang	1.249	452	252	398	349
8	Jumlah Pengangguran	Orang	11.287	12.447	13,968	14,566	16.754
9	Jumlah PHK	Orang	52	68	70	87	76
10	Jumlah TKI /PMI yang dikirim	Orang	982	339	339	164	65
11	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Tapanuli Tengah	Orang	4	2	7	3	5
12	Upah Minimum Kabupaten	Rupiah	2.608.869	2.830.884	2.830.884,32	2.830.884,32	3,019,194,74
13	Upah Minimum Provinsi	Rupiah	2.303.403	2.499.423	2.499.423, 06	2.522.609, 94	2,710,493,93

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Angkatan Kerja terdiri dari individu yang saai ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 210.141 Jiwa, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 9045 jiwa. Sementara itu, defenisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara 15 dan 64 tahun.

Pada Tahun 2023 Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-64 Tahun) di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 274.672 jiwa naik sebanyak sebesar 6.717 jiwa, dibandingkan tahun 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (**labor force participation rate)** adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja diperoleh dengan menggunakan rumus (Angkatan Kerja / Populasi Usia Kerja) x 100%. Pada Tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 76,51% mengalami kenaikan 1,46% dibanding Tahun 2022. Tingkat Partisipasi Kerja yang tinggi berarti banyak orang yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di

jumlah penduduk usia kerja yang ingin melakukan aktifitas ekonomi semakin banyak terdorong oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar pada Tahun 2023 sebanyak 349 jiwa. Pada Tahun 2023, pendaftaran Pencari Kerja sudah menggunakan aplikasi SIAPkerja.kemnaker.go.id. Dari 349 Pencari Kerja, sebanyak 68 jiwa yang ditempatkan. Angka ini diperolah dari pencari kerja yang sudah ditempatkan yang melapor ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selebihnya sebanyak 201 jiwa tidak dapat diprediksi apakah sudah ditempatkan atau belum karena Pencari Kerja tidak melakukan pelaporan kembali ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan dikarenakan masih proses pembekalan oleh Perusahaan. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sebesar 0,186% yang merupakn perbandingan antara Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan dengan Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar.

Jumlah Pengangguran pada Tahun 2023 sebanyak 16.754 jiwa, naik sebesar 2.188 jiwa.

Penganggur Terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjan dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja;

Data menunjukkan bahwa jumlah Penganggur di Kabupaten Tapanuli Tengah meningkat..menurun. Hal ini disebabkan jumlah lapangan kerja yang terbatas, adanya pertambahan Penduduk Usia Kerja di Kabupaten Tapanuli Tengah.

UMK Tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.3,019,194,74 berdasarkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan dalam rangka melindungi keberlangsungan kerja bagi pekerja/ buruh dan menjaga keberlangsungan usaha.

2.1.3.1.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah. Program yang dilaksanakan diantaranya, Program Perlindungan Khusus Anak melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Program Perlindungan Perempuan melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

1. **Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, berupa penerimaan pengaduan dan layanan pendampingan untuk Anak berhadapan dengan Hukum (ABH), baik Anak sebagai korban, Anak Saksi, Maupun Anak Pelaku yang membutuhkan layanan pendampingan dalam proses penegakan hukum. Terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 31 (tiga puluh satu) kasus anak telah diterima pengaduannya dan diberi pelayanan pendampingan.

Adapun rincian pelayanan yang diberikan sebagai berikut :

- 2 Kasus Pelecehan Seksual telah diberikan pendampingan, dengan keterangan Kasus ditutup dikarenakan Tersangka sudah meninggal.
- 3 Kasus Pelecehan Seksual telah diberikan pendampingan dan kasus selesai dengan Persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga
- 13 Kasus Pelecehan Seksual telah diberikan pendampingan dan masih di proses di Polres Tapanuli Tengah
- 4 Kasus Kekerasan fisik telah diberikan pendampingan dan masih di proses di Polres Tapanuli Tengah
- 1 Kasus Kekerasan Psikis telah diberikan pendampingan dan masih di proses di Polres Tapanuli Tengah
- 1 Kasus Kekerasan Fisik telah diberikan dan kasus telah selesai.
- 1 Kasus Kekerasan Psikis telah diberikan pendampingan dan masih di proses di Polres Tapanuli Tengah
- 1 Kasus tentang Hak Asuh Anak telah diberikan pendampingan dan kasus selesai dengan Persidangan di Pengadilan Agama Pandan
- 1 Kasus Pengeroyokan telah selesai dengan proses mediasi di Lingkungan Sekolah
- 1 Kasus Pencurian telah diberikan pendampingan dan kasus selesai dengan Persidangan di Pengadilan Negeri Sibolga
- 2 Kasus Pemenuhan Hak Anak telah selesai melalui proses mediasi.
- 1 Kasus Pencurian telah selesai melalui proses mediasi.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2023 merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa penerimaan pengaduan dan pelayanan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan kerja serta korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Terhitung dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 9 kasus perempuan telah diterima pengaduannya dan diberi pelayanan pendampingan.

Adapun rincian pelayanan yang diberikan sebagai berikut:

- 1 Kasus KDRT telah selesai dan diberikan layanan pemulangan;

- 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di lingkungan Kerja telah diberikan layanan pendampingan dan masih di proses di Polres Tapanuli Tengah;
- 2 Kasus Penelantaran Istri telah selesai dengan proses mediasi;
- 1 Kasus KDRT telah diberikan layanan pendampingan dan masih proses di Pengadilan Agama Pandan;
- 1 Kasus Pengancaman telah diberikan layanan pendampingan dan mediasi di tingkat Kelurahan;
- 1 Kasus Penalantaran istri telah diberikan layananpendampingan dan masih proses di Polres Tapanuli Tengah;
- 1 Kasus KDRT telah diberikan layanan pendampingan dan masih proses di Polres Tapanuli Tengah.

2.1.3.1.8. Pangan

Data bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah pada awal hingga akhir tahun 2023 sangat beragam, mulai dari kebutuhan, ketersediaan serta komoditi yang sangat efektif. Sepanjang tahun 2023 ketersediaan komoditi beras di pasar tradisional cukup lancar, namun informasi harga yang berbeda dari rata-rata harga beberapa titik pantau/pasar dalam wilayah masing-masing. Berikut disajikan data Pemantauan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023.

Tabel 2.29

Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2023

No	Komoditi	Kebutuhan		Ketersediaan		
		Per bulan (ton)	Per hari (ton)	Per bulan (ton)	Per hari (ton)	
					H-1	H
1	Beras	4.457,30	148,58	6.877,30	228	229,2
2	Jagung	123,47	4,12	123,4	3,9	4,11
3	Cabai merah	139,36	4,65	44,8	1,35	1,49
4	Cabai rawit	100,47	3,35	36,6	1,15	1,22
5	Bawang putih	67,85	2,26	33,925	1,10	1,13
6	Bawang merah	123,15	4,11	61,57	2,03	2,05
7	Daging sapi	5,8	0,19	2,9	1,02	1,1
8	Daging ayam	387,86	12,93	193,93	6,40	6,46
9	Telur	253,47	8,45	126,7	4,12	4,22
10	Minyak goreng	734,53	24,48	367,2	12,10	12,24
11	Gula	346,31	11,54	173,15	5,70	5,77

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.9. Urusan Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senantiasa berpedoman kepada adanya keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan dimana prinsip pengadaan tanah untuk pembangunan adalah mewujudkan pengadaan tanah yang memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat yang terkena pengadaan tanah dengan diberi ganti kerugian yang dapat menjamin kelangsungan hidupnya, dan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memerlukan tanah untuk dapat memperoleh tanah sesuai dengan peraturan perundang – undangan Yang berlaku.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2017 - 2023

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Jumlah Kasus yang Diselesikan	Buah	1	1	1	2	1
2.	Jumlah Kasus yang Terdaftar	Buah	2	2	2	3	2
3.	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	50	50	50	66.67	50
4.	Jumlah Advis Lokasi	Buah	14	1	-	-	-
5.	Permohonan Advis Lokasi	Buah	17	-	-	1	1
6.	Persentase Penyelesaian Advis Lokasi	%	82,35	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Untuk menghindari adanya permasalahan dilapangan terhadap asset Tanah Pemerintah yang ada, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah membuat tanda patok dan plank asset Tanah Pemerintah, sehingga asset tanah Pemerintah tersebut dapat terinventarisir dengan baik. Untuk kepentingan pembangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum seperti pelebaran jalan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan Sertifikat kepada Masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran jalan sebagai perhatian Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

2.1.3.1.10. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang diawasi sebanyak 11 perusahaan. Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 45,45%. Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL sebanyak 2 perusahaan. Berikut disampaikan capaian kinerja urusan lingkungan hidup sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL yang diawasi	Perusahaan	11	11	11	11	11	11
2	Jumlah Seluruh Perusahaan Wajib AMDAL	Perusahaan	11	11	11	11	11	11
3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	Persen	100	45,45	45,45	45,45	45,45	27,27
4	Jumlah seluruh perusahaan wajib UKL/UPL	Perusahaan	7	7	9	3	2	1
5	Uraian Penjelasan Kasus Lingkungan Hidup							
	1. Pengaduan masyarakat kelurahan Sarudik tentang pembuangan limbah PT. Toba Surimi	Kasus (selesai)	√					
	2. Penambangan bahan galian C oleh PT. CIPTA DAYA PERKASA di Kecamatan Pinangsori	Kasus (selesai)	√					
	3. Peternakan babi yang menimbulkan keresahan masyarakat di Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan	Kasus (selesai)	√					
	4. Keluhan masyarakat atas sedimentasi akibat galian tanah ke kawasan permukiman masyarakat	Kasus (selesai)	√					
	5. Keberatan masyarakat terhadap bau yang ditimbulkan oleh peternakan bebek di Kecamatan Tukka	Kasus (selesai)		√				
	6. Penambangan mineral jenis batu di luar kawasan oleh PT. ANRA	Kasus (selesai)		√				
	7. Keberatan masyarakat sekitar PT. Mujur Timber karena sebaran debu hasil pengolahan kayu	Kasus (selesai)		√				
	8. Perambahan mangrove oleh PT. Nauli Sawit	Kasus (selesai)		√				
	9. Longsor yang disebabkan oleh pembangunan perumahan citra hijau lestari	Kasus selesai		√				
	10. Dugaan pencemaran air laut oleh PLTU Labuan Angin oleh limbah pembakaran batubara	Kasus selesai (tidak terbukti		√				
	11. PT. Horizon, Keberatan Masyarakat atas dugaan pencemaran dan temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√			
	12. PT. ASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√			
	13. PT Tobasurimi, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√			
	14. CV. Roganda, dugaan perusakan lingkungan	Kasus selesai (CV. Roganda telah memiliki dokumen perizinan)			√			
	15. PT. Mujur Timber, dugaan pencemaran lingkungan	Kasus selesai (tidak terbukti mencemari			√			

		lingkungan)						
	16. PT. KASAHI, temuan atas dokumen lingkungan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada	Kasus Selesai (dokumen sudah diperbaharui)			√			
	17. Penambangan batu di Kec. Sitahuis	Kasus selesai (kegiatan ditutup)			√			
	18. Dugaan pencemaran air terhadap pelurusan sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi di Kecamatan Sibabangun	Kasus selesai				√		
	19. Dugaan pencemaran air sungai oleh PT. Tri Bahtera Srikandi	Kasus selesai				√	Nihil	
	20. Keberatan masyarakat atas penutupan daerah genangan air di Kelurahan Binasi Kec. Sorkam Barat	Kasus selesai				√		
	21. Keberatan masyarakat terhadap dugaan pencemaran air yang berdampak terhadap ekosistem ikan pada lubuk larangan di kecamatan Lumut	Kasus selesai						
	22. Keresahan masyarakat terhadap tangki timbun dan permintaan tembok penahan oleh PT. Indera Angkola	Kasus selesai						
	23. Keresahan masyarakat atas dugaan reklamasi, penebangan mangrove dan penggerusan bukit karena pembangunan perumahan Grand Tapian Nauli di Kecamatan Tapian Nauli	Proses ditangani Polres Tapteng						
	24. Laporan masyarakat atas dugaan pencemaran air karena galian C di sungai Pinangsori di Kecamatan Pinangsori	Kasus selesai semua perusahaan pertambangan meiliki dokumen perizinan						
	25. Laporan An. Tarida sigalingging atas, pembukaan lahan perkebunan di Kecamatan Sosorgadong yang ditangani Polda Prov. Sumatera Utara							(masih proses penanganan Polda Sumut)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.11. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keluaran (output) kegiatan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah terlaksananya Pembangunan dan Pengoprasian SIAK secara terpadu kepada penduduk wajib KTP-el; Terwujudnya pendataan penduduk wajib KTP-el yang akurat dan akuntabel; Terciptanya administrasi kependudukan yang baik; serta terlaksananya kegiatan KTP-el dengan baik. Pada Tahun 2022 jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-el sebanyak 233.573 orang, sementara jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 256.837 orang, dengan demikian persentase indicator pengurusan KTP-el sebesar 90,94 persen.

Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 175.979 orang dari seluruh jumlah penduduk 366.982orang, dengan demikian capaian kinerja kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk sebesar 47,95 persen.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kepemilikan KTP-el, cakupan kepemilikan Akta Kelahiran adalah Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (Perekaman KTP-el secara Mobile, Pengurusan Kartu Keluarga) dan Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (Akta Lahir, Akta Kawin, Akta Kematian dll) di 20 Kecamatan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

a. Kurangnya kesadaran penduduk dalam pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil
b. Perangkat SIAK dan perangkat KTP-el di kecamatan sebagian besar dalam kondisi kurang baik sehingga pelayanan penataan administrasi kependudukan terhambat.
c. Minimnya sarana prasarana untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan jarak ibu kota kabupaten dengan kecamatan cukup jauh sehingga administrasi kependudukan tidak berjalan dengan baik.
d. Dengan mempertimbangkan factor geigrafis, diperlukan suatu upaya untuk selalu mendekatkan pelayanana kepada masyarakat.

Solusi untuk pemecahan masalah adalah :

a. Peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Gedung Kantor, Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling, Pengadaan Perangkat KTP-el, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor)
b. Renovasi Pelayanan Dukcapil (Urus 1 Dokumen dapat 3 sekaligus dokumen kependudukan)
c. Pelayanan Jemput Bola pengurusan Administrasi Kependudukan
d. Perencanaan Gerakan Indonesia Sadar Admininduk atau disingkat #GISA adalah sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.
e. Go Digital dengan sarana, materai dan SDM yang bekerja sangan baik, membangun Indonesia yang jauh lebih baik dalam system digital.
f. Inovasi Pelayanan dengan melakukan kerjasama dengan stakeholder internal dan eksternal tentang pelayanan Administrasi Kependudukan.

Melakukan sosialisasi administrasi kependudukan ke masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui berbagai media dan sarana saluran, diantaranya melalui tetap muka langsung melalui sosialisasi kebijakan kependudukan, melalui media cetak, leaflet, pamphlet, buku saku, spanduk dan lain-lain. Hal ini dilakukan secara intergratif dan berkesinambungan sehingga masyarakat semakin kenal dan dapat mengakses layanan administrasi kependudukan dengan baik.

Tabel 2.32
Perkembangan Data Kependudukan Tahun 2020– 2023

NO	URAIAN	SAT.	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk yang Memiliki KTP-*el*	Jiwa	210.990	210.957	217.500	223.742	233.573
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP-*el*	Jiwa	251,827	253.056	252.496	256.929	256.837
3	Persentase Kepemilikan KTP-*el*	Persen	83,78	83,36	86,14	87,08	90,94
4	Jumlah Perekaman KTP-*el*	Buah	210.990	210.957	220.125	223.742	233.573
5	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jiwa	137.705	127.741	150.212	162.254	175.979
6	Jumlah Penduduk	Jiwa	363,823	365.344	365.606	366.361	366.982
7	Jumlah KK	KK	88.489	91.887	91.621	93.272	95.727
8	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jiwa	183.720	183.861	184.038	184.459	184.568
9	Jumlah Penduduk Perempuan	Jiwa	180.103	181.483	818.568	181.902	182.414
10	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	37,85	34,96	41,09	44,29	47,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.12. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai SKPD yang melayani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dapat disebut juga dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dibedakan atas sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan. Dalam memberikan pelayanan, kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki adalah salah satu faktor yang menentukan baiknya tingkat pelayanan yang diberikan.Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 21 Orang, terdiri dari 12 Laki-laki dan 9 Perempuan. Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 2.33
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1.1	Persentase pengentasan desa sangat tertinggal dan tertinggal	72,33%					72,32%
1.2	Persentase peningkatan	27,67%					36,47%

	status desa berkembang, maju dan mandiri						
1.3	Jumlah LSM	26	26	26		0	0
1.4	LPM berprestasi	0				0	0
1.5	PKK aktif	7114	7125	7130	7140	7140	7114
1.6	Posyandu aktif	382	394	398		402	386
1.7	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	4	6	7		2	5
1.8	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	4	6	7		2	5

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tahun 2022 ditargetkan 235 untuk Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan hal tersebut dapat dicapai dengan angka yang sama yaitu 235, Sama halnya dengan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK yang mencapai target realisasi 6 pada Tahun 2022, dan untuk PKK Aktif juga mencapai target realisasi pada Tahun 2022 yaitu mencapai angka 7.140.

2.1.3.1.13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

a. Prevalensi peserta KB aktif
   - Jumlah Peserta Program KB Aktif tahun 2023 sebanyak 24,146 peserta pada tahun 2022 sebanyak 17,266 peserta ;
   - Jumlah Pasangan usia subur tahun 2023 sebanyak 41,501 pasangan Usia Subur tahun 2022 sebanyak 39,415 Pasangan Usia Subur;
   - Capaian kinerja sebanyak 58,18%.

b. Rasio Petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa Kelurahan
   - Jumlah Desa Kelurahan sebanyak 215 peserta;
   - PLKB/ PKB PNS Sebanyak 65 Orang, PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 193 orang pada tahun 2023. PLKB/ PKB PNS Sebanyak 63 Orang PLKB/ PKB Non PNS sebanyak 218 orang pada tahun 2023.

2.1.3.1.14. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah. Berhubung Terminal Baru Pandan belum dioperasikan, maka kegiatan ini difokuskan kepada pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai peranan dalam pengoperasian terminal. Pihak terkait tersebut antara lain Dinas PUPR, Dinas Perindag, Polisi Lalu Lintas, Organda dan lain-lain. Selain pengawasan dan koordinasi kegiatan ini juga

di utamakan perawatan dan pembersihan terminal secara rutin setiap hari demi terciptanya kenyaman dan kebersihan terminal.

Tabel 2.34
Data Perhubungan Darat di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018 – 2023

No.	Uraian	Satuan	Tahun					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Menurut Jenisnya							
	a. Perdesaan	Unit	327	539	571	578	578	426
	b. Truk	Unit	215	-	-	-	-	-
	c. Becak Mesin	Unit	615	-	-	-	-	615
	d. Ojek	Unit	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Pengusaha Angkutan Umum	Usaha	8	8	8	8	8	8
3	Penerbitan Izin							
	a. Trayek Perdesaan	Buah	8	8	8	8	8	8
	b. Usaha Angkutan	Buah	6	6	6	6	6	6
4	Jumlah Terminal	Unit	1	1	1	1	1	1
5	Jumlah KIR/STUK Angkutan Umum	Unit	1.174	-	-	-	-	-
	a. Mobil Penumpang	Unit	575	-	-	-	-	-
	b. Bis	Unit	4	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Unit	561	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Unit	-	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Unit	6	-	-	-	-	-
6	Lama Pengujian KIR/STUK							
	a. Mobil Penumpang	Hari	-	-	-	-	-	-
	b. Bis	Hari	-	-	-	-	-	-
	c. Mobil Barang	Hari	-	-	-	-	-	-
	d. Kereta Gandeng	Hari	-	-	-	-	-	-
	e. Kereta Tempelan	Hari	-	-	-	-	-	-
7	Fasilitas Pendukung Keselamatan Pengujian	Unit & Manual	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.1.15. Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pertama, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif dan kedua, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Sedangkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan adalah Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan kegiatan strategis provinsi yaitu Pembangunan Satu Data Digital Daerah.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui pemberitaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik/masyarakat, dan sosial kemasyarakatan di berbagai kanal media (media elektronik, media online, media cetak, dan media sosial) dan

menjalin sinergitas dan kemitraan dengan media massa, serta para pemangku kepentingan. Selain itu, juga mendorong peningkatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pada tahun 2022 dan 2023, Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Tapanuli Tengah kategori "Cukup Informatif" oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, sehingga pada tahun 2024 ini ditargetkan Kabupaten Tapanuli Tengah kategorinya semakin Informatif dengan meningkatkan peran dan kualitas PPID Kabupaten Tapanuli Tengah dan mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal media yang ada. Pj. Bupati Tapanuli Tengah juga telah menerbitkan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor 500.12.1/077/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Hal: Keterbukaan Informasi Publik, yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Camat se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapanuli Tengah, Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga ke depan tujuan atas pelaksanaan program ini dapat terwujud.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga melaksanakan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu melalui Fasilitasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah, dan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Mellaui program ini maka akan mewujudkan transformasi digital dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan semakin baik, cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga mendorong terwujudnya Tapanuli Tengah Smart City, aplikasi Satu Data Kabupaten Tapanuli Tengah, dan meningkatnya Literasi Digital Masyarakat dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hasil evaluasi SPBE Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Kementerian PANRB tahun 2022 indeks sebesar 1,62 (predikat Kurang) dan meningkat pada tahun 2023 indeks sebesar 1,87 (predikat Cukup). Pada tahun 2024 ditargetkan hasil evaluasi SPBE Kabupaten Tapanuli Tengah dengan predikat Baik. Pada tahun 2024 ini sebanyak 21 aplikasi domain-sub domain, telah diinisiasi penyusunan Arsitektur SPBE OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, penyempurnaan regulasi, penerapan transaksi non tunai dan/atau digital, dan penerapan Sertifikat Elektronik, serta pengembangan kolaborasi program aplikasi sehingga penerapan SPBE di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat dan baik.

Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah juga melaksanakan Program Statistik Sektoral melalui Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, dan Penerapan Satu Data Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, melalui Penyelenggaraan

Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

2.1.3.1.16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2022 berjumlah 394 unit koperasi, meningkat dari tahun 2021 yang berjumlah 391 unit koperasi sesuai data dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Tapanuli Tengah. Angka tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.35
Jumlah Koperasi di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2018-2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Manduamas	16	17	15	15	15	15
2.	Sirandorung	15	15	15	15	15	14
3.	Andam Dewi	11	12	12	12	12	12
4.	Barus	25	25	26	26	26	26
5.	Barus Utara	2	2	2	2	2	2
6.	Sosorgadong	8	8	9	9	9	6
7.	Pasaribu Tobing	3	3	4	4	4	4
8.	Sorkam Barat	20	20	18	19	19	12
9.	Sorkam	12	13	16	16	17	20
10.	Kolang	23	23	24	25	25	23
11.	Tapian Nauli	24	25	25	25	25	26
12.	Sitahuis	6	6	6	6	6	6
13.	Pandan	99	102	103	106	107	105
14.	Tukka	11	11	11	12	12	12
15.	Badiri	21	22	23	24	24	21
16.	Pinangsori	14	14	14	18	19	26
17.	Lumut	8	8	9	9	9	9
18.	Suka Bangun	3	3	3	3	3	3
19.	Sibabangun	15	15	17	17	17	18
20	Sarudik	23	23	27	28	28	28
	Jumlah	**359**	**368**	**379**	**391**	**394**	**386**

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.36
Jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Jumlah UMKM	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM
1	Manduamas	1.736	1.736	848	457	457
2	Sirandorung	1.159	1.159	1.069	222	222
3	Andam Dewi	722	722	165	535	535
4	Barus	2.448	2.448	2.466	649	649
5	Barus Utara	328	328	439	342	342
6	Sosorgadong	881	881	2.204	1.363	1.363
7	Pasaribu Tobing	938	938	554	1.753	1.753
8	Sorkam Barat	1.118	1.118	1.186	820	820
9	Sorkam	1.395	1.395	2.767	583	583
10	Kolang	1.361	1.361	386	535	535
11	TapianNauli	1.377	1.377	2.002	31	115
12	Sitahuis	375	375	382	137	137
13	Pandan	3.897	3.997	5.790	1.742	1.742
14	Tukka	802	802	1.086	699	699
15	Badiri	1.366	1.366	3.042	682	682
16	Pinangsori	1.925	1.925	2.691	1.057	1.057
17	Lumut	606	787	1.685	3.877	3.877
18	SukaBangun	431	431	158	624	624
19	Sibabangun	1.088	1.088	1.322	592	592
20	Sarudik	1.232	1.432	1.726	2.105	2.105
Jumlah		**25.165**	**25.666**	**31.968**	**18.805**	**18.889**

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pada tahun 2023, terdapat **18.889** jumlah UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jumlah UMKM terbanyak pada Kecamatan Lumut dengan jumlah 3.877 UMKM. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen melakukan inovasi di bidang pelayanan masyarakat serta kemudahakan bagi pelaku UMKM dan pelaku ekonomi di bidang komoditas unggulan. pelayanan publik, UMKM menjadi salah satu bidang yang untuk dilakukannya inovasi terutama UMKM yang mengembangkan produk unggulan daerah. Inovasi yang dilakukan dengan mengikuti Ekspo produk unggulan daerah dengan penyelenggaraan pameran tingkat lokal maupun keikutsertaan dalam ajang pameran tingkat regional (provinsi Sumatera Utara) dan nasional. Inovasi di bidang UMKM lainnya adalah dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif melalui pengembangan kreasi intelektual

(*knowledge based economy*) seperti barang seni atau kerajinan, fashion, fotografi, periklanan, film pendek, dan sebagainya.

2.1.3.1.17. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja penanaman modal yaitu Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah yang Keluaran (output)nya yaitu melalui koordinasi pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan melalui kegiatan ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/ regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

2.1.3.1.18. Kepemudaan dan Olah Raga

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Kabupaten Tapanuli Tengah juga berperan aktif mengikuti setiap kegiatan baik kepemudaan dan olah raga baik lokal maupun tingkat provinsi dan nacional.

2.1.3.1.19. Perpustakaan

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki sebuah perpustakaan daerah yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain memiliki buku-buku yang tersedia di gedung perpustakaan, maka untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memdapatkan informasi, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki satu unit Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) yang digunakan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari lokasi perpustakaan. Adapun buku koleksi dan sarana yang tersedia di Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) dan gedung perpustakaan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mobil Perpustakan Keliling (MPK) Pertama (I) Tahun 2017 memiliki :
   - Buku bacaan : 800 eksemplar
   - Mesin genset : 1 Unit
   - Laptop : 1 Unit
   - TV LED : 1 Unit
   - Modem : 1 Unit
   - Proyektor : 1 Unit

2. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) ke II Tahun 2023 memiliki :
   - Buku Bacaan : 500 eksemplar

- TV LED : 1 Unit
- Speaker Multimedia : 1 Unit
- Mesin Genset : 1 Unit
- UPS (Uninter Power Supplay) : 1 Unit
  Sebagai pasokan listrik cadangan
- DLS (Digital Library Sistem) : 1 Unit
  Sistem Perpustakaan Digital

3. Perpustakaan Daerah, memiliki :

A. Buku bacaan:
   - Koleksi tahun 2017 : 9,181 eksemplar
   - Pengadaaan tahun 2018 : 2,259 eksemplar
   - Pengadaan tahun 2019 : 2,520 eksemplar
   - Pengadaan Tahun 2020 : -
   - Pengadaan Tahun 2021 : -
   - Hibah Bank Indonesia : 300 eksemplar
   - Hibah Perpusnas RI Tahun 2018 : 572 eksemplar
   - Hibah Prov. Sumatera Utara : 264 eksemplar
   - Hibah Perpusnas RI Tahun 2021 : 300 eksemplar
   - Hibah Perpusnas RI Tahun 2022 : 700 eksemplar
   - Buku Digital Tahun 2022 : 885 eksemplar
   - Automasi Layanan Perpustakaan Inslite 6 unit Dari Kegiatan Dana DAK Tahun 2021

B. Pojok Baca Digital Tahun 2022 : 1 Unit

C. Sepeda Motor Perpustakaan Keliling Tahun 2021 : 1 Unit

2.1.3.2. Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Pertanian

Perkembangan kebutuhan beras dan produksi beras dapat dilihat pada Grafik di bawah, terlihat pada grafik tersebut bahwa selama tahun 2014-2023 Kabupaten Tapanuli Tengah mampu berswasembada beras. Pada tahun 2022 jumlah kebutuhan beras sebesar 48.734 Ton dan Produksi beras sebesar 95.214 Ton.

Grafik 2.3
Grafik Perimbangan Produksi dan Kebutuhan Beras
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2014 – 2023

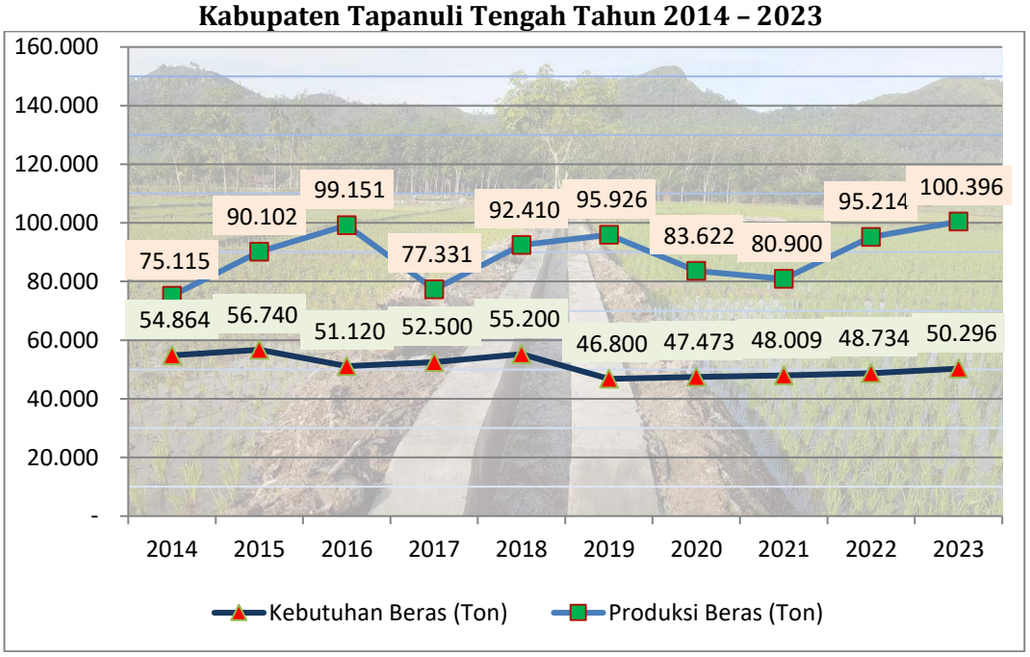

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Produksi beras pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, sejalan dengan peningkatan luas panen pada tahun 2023. Pada tahun 2022 luas panen hanya 34.385 Ha sedangkan pada tahun 2023 luas panen meningkat menjadi 37.408 Ha.

Data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dari beberapa komoditi terus meningkat, diantaranya komoditi sapi, kerbau, domba serta ayam kampung. Namun untuk komoditi ayam petelur jumlahnya menurun dari 9.500 ekor di tahun 2022 menjadi 9.000 ekor pada tahun 2023. Demikian juga untuk komoditi Itik Unggas dari 14.128 ekor pada tahun 2022 menurun menjadi 9.807 ekor pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya data perkembangan populasi ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2016 – 2023

No.	Komoditi	TAHUN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sapi	2.115	2.355	2.433	2.504	2.736	2.958	2.803	2.925
2.	Kerbau	9.311	10.242	10.444	10.648	10.927	11.638	10.518	10.917
3.	Kambing	15.410	15.872	16.188	16.257	14.488	13358	11.971	12.804
4.	Domba	387	399	407	425	512	977	1.087	1.252
5.	Babi	71.870	74.026	75.705	69.525	30.316	9.689	6.903	9.158
6	Ayam Kampung	546.485	562.880	574.137	580.125	435.689	412.674	397.509	407.334
7.	Ayam Petelur	350	0	0	0	4.000	2.500	9.500	9.000
8.	Ayam Pedaging	17.151	0	0	50.000	224.400	292.000	424.000	467.000
9.	Itik Unggas	17.286	17.805	18.161	18.638	14.043	15.612	14.128	9.807
10.	Itik Manila	11.145	11.479	11.708	11.890	9.419	18.177	10.316	11.020
11.	Burung Puyuh	5.387	5.356	5.463	0	0	0	3.300	4000
12	Merpati	2.092	2.387	2.434	2.030	1.928	2.000	2.320	2177
13	Kelinci	410	604	616	457	343	104	132	0

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Beberapa tanaman perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah karet, kelapa, kelapa sawit, dan kakao. Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain produksi karet tahun 2023 sebesar 20.658,62ton. Demikian juga produktivitas kelapa tahun 2023 sebesar 1.053,01 ton. Produksi kelapa sawit rakyat tahun 2023 sebesar 58.064,36 ton. Luas Pertanaman, produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah Tahun 2023 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Luas Pertanaman, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023

No	Jenis Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kg/Ha/Thn)	KK Petani
1	Karet	20.416,49	20.658,62	1.012	26.994

2	Kelapa	1.078,72	1.053,01	976	6.441
3	KelapaSawit	16.836,12	58.064,36	3.449	547
4	Kakao	6,56	7,33	1.117	3.804
5	Aren	31	78	2.507	264
6	Pala	-	-	-	-
7	Kopi Robusta	9	18	2.118	357
8	Cengkeh	-	-	-	-
9	Kemenyan	-	-	-	-
10	Kapuk	-	-	-	-
11	Lada	-	-	-	-
12	Kulit Manis	-	-	-	-
13	Kemiri	2	8.50	4.250	197
14	Gambir	-	-	-	-
15	Pinang	204	287,13	1.409	193

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.2.2. Kehutanan

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan keadaan kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, air permukaan. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai SK. 44/Menhut-II/2005 Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 54.975,11 Ha.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian kawasan lindung dihadapkan pada permasalahan semakin meningkatnya tekanan sosial-ekonomi terhadap sumber hutan, serta sinergitas lintas instansi. Luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah 114.537,71 Ha. Luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Data Luas Hutan berdasarkan Fungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Luas Kawasan (Ha)			
		Hutan Lindung	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Terbatas	Areal Penggunaan Lahan
1.	Sibabangun	1.545,00	4.729,20	-	2.545,00
2.	Sukabangun	-	-	-	1.950,00
3.	Lumut	475,00	-	-	1.325,00
4.	Pinangsori	853,00	-	-	6.924,00
5.	Badiri	735,00	-	-	6.197,00
6.	Pandan	-	-	-	300,00
7.	Sarudik	3.312,50	-	-	325,50
8.	Tukka	7.625	1.062,21	-	3.510
9.	Sitahuis	8750,90	-	-	-
10.	Tapian Nauli	6.062,40	562,50	-	1.265,63
11.	Kolang	7.312,51	1.312,50	7.312,50	4.768,75
12.	Sorkam	-	-	9.312,30	1.618,75
13.	Sorkam Barat	875,00	-	3.812,50	1.656,25
14.	Pasaribu Tobing	655,50	-	4.937,50	-
15.	Sosorgadong	13.984,30	-	3.875,00	1.406,25
16.	Barus	-	-	-	310,25
17.	Barus Utara	-	-	48,00	521,00
18.	Andam Dewi	1.879,00	-	6.687,20	1.312,5
19.	Sirandorung	575,00	-	5.755,00	2.562,5
20.	Manduamas	335,00	-	10.156,19	8.911,87
Jumlah		**54.975,11**	**7.666,41**	**51.896,19**	**47.410,75**

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapanuli Tengah dipadukan dengan Hasil Perhitungan BPKH Wilayah-I Medan terhadap SK Menteri Kehutanan RI No 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005

Luas lahan kritis di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah seluas 95.469,25 Ha, dimana luas lahan kritis di luar kawasan hutan seluas 54.890,25 Ha sedangkan lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 40.579,00 Ha.

2.1.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi investasi pertambangan di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi granit, pasir dan sirtu (pasir dan batu), kuarsa, lempung, tras, batu gamping, batu apung, andesit – basal. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi yang besar untuk bahan galian golongan "C" sehingga memudahkan dalam pelaksanaan konstruksi bangunan yang memerlukan bahan galian tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki potensi bahan galian golongan "A" seperti batubara, uranium

dan timah putih yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk dapat menentukan deposit yang sebenarnya dari potensi bahan tambang tersebut.

Untuk bahan tambang jenis batubara di Kabupaten Tapanuli Tengah masih sangat muda, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama agar batubara tersebut dapat dipakai. Sebaran potensi bahan galian secara umum digambarkan sebagai berikut :

- Granit : >455.726.250 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis. Granit dikenal kuat dan tahan lama apabila dibandingkan dengan keramik lainnya. Selain itu, granit juga tidak mudah retak atau pecah meskipun termakan usia dan menghadapi segala cuaca. Selain itu, lantai granit tidak mudah pudar dan cocok digunakan di area-area yang sering terpapar sinar matahari seperti kolam, teras, atau gazebo. Keramik yang berkualitas baik juga tahan lama dan sulit dipecahkan. Bahkan, keramik yang baik dapat bertahan hingga 10-20 tahun lebih jika perawatannya tepat.
- Lempung : ± 31.500.000 ton tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Pinangsori. Tanah lempung adalah agregat partikel-partikel yang berukuran mikroskopik dan submikroskopik yang berasal dari pembusukan kimiawi unsur-unsur penyusun bantuan. Tanah lempung memiliki ciri-ciri berupa bersifat plastis, kadar air sedang hingga luas, permeabilitas yang sangat rendah, memiliki ukuran < 0,002 mm, berbutir halus, dan akan mengeras dalam keadaan kering. Tanah lempung umum digunakan dalam kegiatan pembangunan seperti batu bata dan kerajinan gerabah, sebagai wadah untuk dijadikan piring, kendi, guci, kuali, dan sebagainya. Adapun dalam pembangunan, manfaat tanah lempung dikenal untuk pembuatan batu bata.
- Tras : ± 18.900.000 ton tersebar di Kecamatan Tapian Nauli dan Kecamatan Kolang. Tras disebut pula sebagai pozolan, tergolong bahan galian industri atau golongan C yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut di air atau dalam larutan asam. Tras dapat menjadi pengganti bahan semen setelah dicampur dengan bahan kapur (Lime).
- Pasir Kuarsa dan Batu Pasir : ± 766.090.000 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Sorkam, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Pinangsori.
- Sirtu (Pasir dan Batu) : > 7.938.750 tersebar di Kecamatan Pandan, Kecamatan Sitahuis, Kecamatan Tapian Nauli, Kecamatan Kolang, Kecamatan Pinangsori, dan lain-lain.

Adapun potensi tambang golongan “B” yang teridentifikasi di Kabupaten Tapanuli Tengah meliputi timbal (Pb), seng (Zn), wolfram (W), niobium (Ni), dan zat radioaktif.

Berdasarkan cakupan pelayanan prasarana jaringan listrik di Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2013, terdapat keluarga yang belum mendapatkan

fasilitas listrik perdesaan yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Sirandorung, Kecamatan Barus, Kecamatan Pasaribu Tobing, dan Kecamatan Andam Dewi. Di bidang energi, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi Tenaga Air (PLTA) dan Tenaga Uap (PLTU).

Ketenagalistrikan di Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari :

1. PLTU Batubara Labuan Angin kapasitas 2 x 115 MW.
2. PLTA Sipan Sihaporas kapasitas 50 MW.
3. PLTMH Aek Bontar kapasitas 22 KW.
4. PLTMH Sipakpahi kapasitas 22 KW.
5. PLTS Terpusat Sitardas kapasitas 5 KW.
6. PLTS tersebar di beberapa wilayah desa tertinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.

2.1.3.2.4. Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata mendorong untuk pegembangan sektor pariwisata dan peningkatan kualitas kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dapat memberikan kontribusidalam meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan, namun penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata tahun 2023 tidak menjadi prioritas dikarenakan kurangnya anggaran sehingga berdampak pada nihilnya objek wisata terbangun dan kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana di objek wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah, semoga di tahun selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas kinerja pemkab Tapanuli Tengah untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkelanjutan yang memiliki sasaran untuk sektor pariwisata yaitu : “Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif, namun pada Tahun 2023 kunjungan wisatawan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan dengan jumlah 384.140 orang dengan rincian Wisatawan Nusantara sebanyak 384.100 jiwa dan wisatawan mancanegara sebanyak 40 jiwa, wisatawan mancanegara banyak mengunjungi wisata sejarah yaitu makam mahligai dan papan tinggi.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	SAT	CAPAIAN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah destinasi wisata terbangun	Unit	2	2	2	0	0	0
2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	162	215	0	0	11	40

3	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	208.190	228.978	331.206	335.678	371.132	384.100
4	Kunjungan Wisata	Orang	208.352	229.193	331.206	335.678	371.143	384.140

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan laut yang cukup besar adalah dengan pemberdayaan nelayan, peningkatan sarana dan prasarana, bantuan modal dan bimbingan, penetapan kawasan pantai sebagai daerah pengembangan agribisnis berbasis usaha perikanan. Pengembangan komoditas perikanan darat dapat ditempuh melalui usaha penerapan teknologi tepat guna.

Pemanfaatan sawah untuk areal mina padi perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan pemanfaatan perairan umum, baik melalui usaha budidaya ikan dengan sistem keramba, keramba jaring apung, merupakan alternatif yang dapat dikembangkan mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai potensi situ atau sungai yang cukup besar. Komoditas yang bisa dikembangkan dengan sistem ini adalah ikan mas, mujair dan nila.

Kegiatan *restocking* di perairan umum berupa lubuk larangan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat sekitar situ atau sungai sebagai pengelola dan pengawas, sehingga dapat diatur musim penangkapannya, dan alat yang boleh dioperasikan. Budidaya udang tambak juga merupakan prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan di beberapa pantai Kabupaten Tapanuli Tengah, hal ini didukung oleh kondisi perairan yang belum tercemar bila dibandingkan dengan perairan pantai di daerah lain.

Sub sektor perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah secara khusus dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara pada umumnya. Hal ini didukung oleh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang terdiri dari sumberdaya perikanan tangkap, perairan umum maupun budidaya perikanan baik budidaya di air tawar (kolam, sawah), budidaya ikan di air payau (tambak), budidaya ikan di laut maupun budidaya Keramba Jaring Apung (KJA).

Tabel 2.41
Produksi Ikan (Ton)di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2023

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Penangkapan Ikan						
	a. Laut	Ton	40.515,24	42.321	41.453	41.468	41.468
	b. PerairanUmum	Ton	1.280	1.290	1.300	-	-
2	Budidaya						
	a. Kolam	Ton	282.995	801.271	813.720	345,6	345,6
	b. Sawah	Ton	-	-	-	-	-
	c. Tambak	Ton	150.997,55	2.663	12.000	496,4	484,4
	d. BudidayaLaut	Ton	148.215	1.210	1.240	-	-
	e. Keramba Jaring Apung (KJA)	Ton	68.282,5	1.856	1.866	3	3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.42
Perahu Penangkap Ikan Lautdi Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2023

No	Jenis Perahu	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	PerahuTanpa Motor	Unit	100	110	100	100	105
2	Perahu Motor Tempel	Unit	1.458	1.472	1.502	1.459	1.432
3	Kapal Motor	Unit	1.009	1.020	1.100	1.010	1.030

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.43
Perkembangan Nelayan dan Petani Ikan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023

No	Kategori	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nelayan Penuh	Orang	16.350	14.087	13.145	14.087	14.093
2	Nelayan Sambilan	Orang	5.415	9.889	11.038	5.326	5.337
3	Nelayan Sambilan Tambahan	Orang	13.560	1.094	903	5.637	5.620

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.2.6. Perdagangan

Pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rakyat yang sangat menyandarkan hidupnya kepada pasar tradisional. Meskipun harus

bersaing dengan pasar modern, pasar tradisional masih tetap menjadi salah satu segmen ekonomi yang sangat diandalkan oleh suatu daerah.

Pemerintah daerah yang masih memiliki masyarakat dengan daya beli yang rendah sangat mengandalkan keberadaan pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Oleh karena itu, keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran roda perekonomian suatu daerah melalui pajak yang bersumber dari retribusi lapak pedagang dan pungutan parkirnya. Pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian masyarakat yang layak untuk dipertahankan eksistensinya dan dikembangkan agar tidak hilang semata karena hadirnya pasar modern.

Tahun 2023 terdapat 23 Pasar yang menyebar di 20 Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, 20 Pasar dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 3 Pasar di kelola oleh swasta. Adapun Kondisi 20 Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah masih tergolong kurang baik dan belum memenuhi persyaratan SNI dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Tidak adanya biaya pemeliharaan pasar mengakibatkan banyaknya atap pasar yang sudah mengalami kebocoran yang berakibat ketidaknyamanan Pedagang untuk berjualan yang berdampak juga kepada hasil Retribusi Pasar.

Revitalisasi Pasar yang membutuhkan anggaran yang besar, dibutuhkan dukungan dana APBN melalui DAK atau Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI melalui usulan Proposal dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, akan tetapi untuk 3 (tiga) tahun terakhir ini Pembangunan/Revitalisasi Pasar tidak ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019-2023

No	INDIKATOR	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase pasar tradisional yang tergolong baik (%)	63	62.85	77,8	77.25	88,8	88,56	90,00	89.42	92,00	88
2	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan (%)	50	46	58	56	66	65	75	74	77	72

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah pasar tradisional yang tergolong baik mencapai 77,25% dan pada tahun 2021 mencapai 88,56% dan untuk tahun 2022 dari target 90.00% dengan capaian 89.42 persen, tahun 2023 dari target 92.00 dengan capaian 86 % Untuk tahun 2023 tidak ada kegiatan Revitalisasi/ Pembangunan Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya sebatas kegiatan pengelolaan pasar yaitu Monitoring Pasar dan Intensifikasi

Retribusi Pasar di 20 Pasar di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam hal pencapaian target angka ini menggambarkan bahwa capaian tidak sesuai dengan target.

2.1.3.2.7. Perindustrian

Jumlah Usaha Industri (IKM) di Kabupaten Tapanuli Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 2.129 usaha industri meningkat pada tahun 2023 menjadi sebanyak 2.467 usaha industri. Jumlah usaha industri di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45
Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
di Kabupaten Tapanuli Tengah

NO	Kecamatan	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha	Jumlah Usaha Industri	Jenis Usaha
1	Manduamas	28	IKM	29	IKM	29	IKM	29	IKM	31	IKM
2	Sirandorung	179	IKM	193	IKM	239	IKM	260	IKM	283	IKM
3	Andam Dewi	53	IKM	55	IKM	67	IKM	81	IKM	88	IKM
4	Barus	172	IKM	173	IKM	179	IKM	180	IKM	186	IKM
5	Barus Utara	76	IKM	76	IKM	77	IKM	77	IKM	78	IKM
6	Sosorgadong	62	IKM	62	IKM	62	IKM	62	IKM	66	IKM
7	Pasaribu Tobing	48	IKM	48	IKM	50	IKM	50	IKM	51	IKM
8	Sorkam Barat	18	IKM	18	IKM	22	IKM	26	IKM	27	IKM
9	Sorkam	109	IKM	118	IKM	123	IKM	137	IKM	151	IKM
10	Kolang	83	IKM	94	IKM	94	IKM	94	IKM	100	IKM
11	Tapian Nauli	96	IKM	98	IKM	99	IKM	100	IKM	100	IKM
12	Sitahuis	28	IKM	29	IKM	29	IKM	30	IKM	30	IKM
13	Pandan	585	IKM	607	IKM	612	IKM	620	IKM	629	IKM
14	Tukka	82	IKM	92	IKM	92	IKM	96	IKM	96	IKM
15	Badiri	97	IKM	105	IKM	105	IKM	109	IKM	110	IKM
16	Pinangsori	112	IKM	119	IKM	121	IKM	129	IKM	129	IKM
17	Lumut	20	IKM	21	IKM	21	IKM	21	IKM	21	IKM
18	Sukabangun	13	IKM	13	IKM	13	IKM	13	IKM	13	IKM
19	Sibababngun	28	IKM	28	IKM	28	IKM	28	IKM	28	IKM
20	Sarudik	240	IKM	244	IKM	245	IKM	250	IKM	250	IKM
		2129	**IKM**	**2222**	**IKM**	**2307**	**IKM**	**2392**	**IKM**	**2467**	**IKM**

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.2.8. Transmigrasi

Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah transmigrasi yang saat ini telah berubah status menjadi Eks-Transmigrasi yang terletak pada 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah luas wilayah yang berbeda-beda. Wilayah tersebut sudah

berubah nama seperti yang terdapat di beberapa kecamatan yang terdiri dari kecamatan Manduamas, kecamatan Sirandorung, kecamatan Kolang dan kecamatan Sukabangun.

Kecamatan Manduamas terdisi dari 1 (satu) kelurahan 5 (lima) desa. Pada saat ini setelah pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Manduamas dan kecamatan Sirandorung terdiri dari :

1. Desa Pagaran Nauli Kecamatan Manduamas;
2. Desa Sarma Nauli Kecamatan Manduamas;
3. Desa Tambahan Nanjur Kecamatan Manduamas;
4. Desa Pagaran Baru Kecamatan Manduamas;
5. Kelurahan Bajamas Kecamatan Sirandorung;
6. Desa Masnauli Kecamatan Sirandorung.

Sesuai dengan wilayah Transmigrasi sebelumnya berada di kecamatan Kolang yang pada saat ini sudah menjadi Eks-Transmigrasi yang terdiri dari 2 (dua) desa. Yang terdiri dari SP :

1. Makarta Nauli;
2. Desa Rawa Makmur.

Kecamatan Sukabangun yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wilayah Eks-Transmigrasi yang saat ini sudah devenitif menjadi desa pada kecamatan Sukabangun yaitu Pulo Pakkat II.

Dari jumlah kelurahan dan desa Eks-Transmigrasi yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah masih perlu pengembangan sarana dan prasarana yang ada pada Eks-Transmigrasi seperti pembinaan, pemberdayaan, fasilitasi pemberian bantuan untuk peningkatan ekonomi sosial dan budaya sehingga mampu bersaing dengan kecamatan yang sudah memiliki tingkat ekonominya yang sudah maju.

2.1.3.3 Fokus Layanan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.1.3.3.1 Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, dan 20 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan reses Anggota DPRD dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019 - 2023

No	Lokasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dapil I					
	– Kec.Pandan	10	0	0	4	0
	– Kec.Sarudik	3	0	0	1	0
	– Kec.Tukka	6	0	0	3	0
2	Dapil II					
	– Kec.Badiri	4	0	0	2	0
	– Kec. Sukabangun	1	0	0	0	0
	– Kec. Sibabangun	3	0	0	2	0
	– Kec.Lumut	0	0	0	2	0
	– Kec. Pinangsori	6	0	0	1	0
3	Dapil III					
	– Kec.Sosorgadong	3	0	0	1	0
	Kec.Barus	1	0	0	1	0
	– Kec. Barus Utara	1	0	0	0	0
	Kec.Andam Dewi	3	0	0	0	0
	– Kec. Sirandorung	1	0	0	0	0
	– Kec. Manduamas	4	0	0	1	0
4	Dapil IV					
	– Kec.Sitahuis	0	0	0	0	0
	– Kec.Tapian Nauli	1	0	0	1	0
	– Kec.Kolang	2	0	0	0	0
	– Kec.Sorkam	1	0	0	3	0
	– Kec.Sorkam Barat	2	0	0	2	0
	– Kec.Pasaribu Tobing	1	0	0	1	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 (enam) Bagian yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Ekonomi Pembangunan, Bagian Humasy, dan Bagian Kessos. Bagian Umum Sekretariat Daerah melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan Program peningkatan disiplin aparatur. Bagian Pemerintahan Umum melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Bagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Program Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan. Bagian Humasy melaksanakan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dan Program Kerjasama Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bagian Hukum melaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Penerbitan Produk Hukum Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2023

No	Jenis Peraturan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perda tentang APBD	3	3	3	3	2
2.	Perda tentang Penerimaan Daerah	-	1	-	-	-
3.	Perda tentang Organisasi	-	1	-	-	-
4.	Perda tentang Penanaman Modal	-	-	-	-	-
5.	Perda tentang lain-lain	4	1	2	3	2
Jumlah		7	6	5	6	4

Sumber : Bagian Hukum Setdakab Tapanuli Tengah, 2024

Bagian Ekonomi Pembangunan melaksanakan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Program Pembinaan Pengelolaan Potensi Daerah.

Di Kabupaten Tapanuli Tengah ada 20 Kecamatan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.48
Nama Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km2)	%
1.	Manduamas	3	17	99,55	4,54
2.	Sirandorung	1	7	87,72	4,00
3.	Andam Dewi	1	13	122,42	5,58
4.	Barus Utara	-	6	63,02	2,87
5.	Barus	2	11	21,81	0,99
6.	Pasaribu Tobing	-	9	103,36	4,71
7.	Sosor Gadong	1	8	143,13	6,52
8.	Sorkam Barat	2	10	44,58	2,03
9.	Sorkam	4	17	80,61	3,67
10.	Kolang	2	12	436,29	19,88
11.	Tapian Nauli	1	8	83,01	3,78
12.	Sitahuis	1	5	50,52	2,30
13.	Pandan	20	2	34,31	1,56
14.	Sarudik	4	1	25,92	1,18
15.	Tukka	5	4	150,93	6,87
16.	Badiri	2	7	129,49	5,90
17.	Pinangsori	5	5	78,32	3,57
18.	Lumut	1	5	105,98	4,83
19.	Sibabangun	1	6	284,64	12,97
20.	Suka Bangun	-	6	49,37	2,25
Jumlah		**56**	**159**	**2.194,98**	

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.3.2 Pengawasan

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam melaksanakan dan mendukung kinerja pengawasan hingga tahun 2024 auditor berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.49
Jumlah Auditor Kabupaten Tapanuli Tengah

Sertikasi Auditor	Jumlah ASN / Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Auditor Terampil							
1. Auditor Pelaksana	1	1	1	-	-	-	-
2. Auditor Lanjutan	1	1	1	1	-	-	-
3. Auditor Penyelia							
Auditor Ahli							
1. Ahli Pertama	2	1	3	3	3	3	3
2. Ahli Muda	7	4	8	9	5	5	5
3. Ahli Madya	3	7	4	3	5	5	5
4. Ahli Utama	-	-	-	-	-	-	
Jumlah	14	14	17	16	13	13	13

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Jumlah temuan dan rekomendasi BPK RI Tahun 2023 mengalami penurunan baik dari aspek temuan dan saran seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Jumlah Temuan dan Rekomendasi BPK RI Tahun 2017 – 2023

Tahun	Temuan	Saran	Rp (TOTAL)	Sudah Tindak Lanjut		Belum Tindak Lanjut	
				Jlh	Rp	Jlh	Rp
2017	13	41	Rp. 6.295.070.288,73	27	3.725.444.831,82	13	2.565.577.456,91
2018	16	91	Rp. 14.359.931.631.68	76	4.327.959.733,62	12	9.550.906.405
2019	28	146	Rp. 17.388.253.104,74	122	9.866.359.218,24	2	4.564.633.828,00
2020	9	40	Rp. 6.746.096.498,13	21	1.284.456.972,87	19	5.461.639.525,26
2021	13	45	Rp. 4.743.791.337,23	43	4.303.604.978,23	2	471.977.059,00
2022	11	22	Rp. 5.778.747.739,26	20	5.565.193.389,26	2	213.554.350
2023							

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Hasil pemeriksaan tahun 2023 belum diserahkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berikut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2023.

Tabel 2.51
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2017– 2023

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1.	2017	6	8	7	1	-	-
2.	2018	18	31	22	5	4	9
3.	2019	15	25	15	10	-	-
4.	2020	-	-	-	-	-	-
5.	2021	6	8	5	3	-	3
6.	2022	28	28	26	2	-	2
7.	2023	Belum diserahkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tabel 2.52
Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2017-2023

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Saran	Status Tindak lanjut			
				SS	BS	BT	SISA
1	2017	77	78	68	1	9	10
2	2018	36	39	34	0	5	5
3	2019	36	50	0	14	36	36
4	2020	259	259	242	0	17	17
5.	2021	179	179	138	0	41	41
6.	2022	77	77	35	-	42	42
7.	2023	131	80	51	0	29	29

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Ket: SS = Sudah Selesai
BS = Belum Selesai
BT = Belum Tindak Lanjut
TT = Tidak di Tindak Lanjuti

Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2023 telah dilaksanakan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah disampaikan kepada masing-masing OPD.

2.1.3.3.3 Perencanaan

Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut amanat Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemeilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, maka jabatan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2022–2024 diisi oleh penjabat Bupati sebagai pengganti Bupati yang masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2022. Untuk menindaklanjuti amanat Undang–Undang tersebut mengenai penyusunan dokumen perencanaan daerah, maka berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Wali kota agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Perkada.

1.1.3.3.4 Keuangan

Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mendukung system prosedur pengelolaan keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah maka dilaksanakan kegiatan penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama dari BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu melakukan penyusunan APBD dan P-APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan hal ini telah dilaksanakan walaupun pada beberapa penyusunan APBD tidak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Tengah maka BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak dan Retribusi.

Selain itu BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah juga melakukan pendampingan pengelolaan PBB secara online dengan menghadirkan pendamping

dalam pelaksanaan pengelolaan PBB untuk meningkatkan kemampuan aparatur Bidang Pendapatan untuk mengelola PBB.

Tabel 2. 53
Capaian Kinerja Urusan Aset Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN	SATUAN	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Luas Lahan Bersertifikat	Ha	139,83	221,135	310,121
2.	Luas Lahan yang Seharusnya Bersertifikat	Ha	779,33	785,708	786,195
3.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	18	28.14	39.45

Sumber: BPKPAD Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.3.5 Kepegawaian

Kebutuhan akan peningkatan strata pendidikan menjadi alasan bagi PNS untuk terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya melanjutkan ke tingkat Strata 1 tapi juga ke strata 2. Dalam hal ini BKPSDM telah mendata jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke Strata 1 sebanyak 107 orang. Sementara untuk jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 adalah sebanyak 20 orang. Data tersebut tersaji dalan tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan
Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan S-2	18	71	5	42	32	32	20
2	Pendidikan S-1	27	27	43	97	38	38	107
3	Pendidikan D-IV	-	2	-	-	-		
3	Pendidikan D-III	-	2	1	-	-		
4	STPDN	4	4	4	2	-		
Jumlah		**49**	**106**	**53**	**141**	**70**	**70**	**127**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja atas biaya sendiri dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal). Sebagai pemenuhan kebutuhan PNS untuk melanjutkan pendidikannya namun tetap dapat menjalankan tugasnya

sebagai PNS maka BKPSDM telah menerbitkan ijin belajar. Adapun datanya tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.55
Jumlah Pemberian Ijin Belajar PNS Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	S-3	-	-	-	-	-	-	
2	S-2	3	61	5	42	32	27	13
3	S-1	25	22	43	97	38	83	105
4	D-IV	-	-	-	-	-		
5	D-III	-	2	1	-	-		
Jumlah		28	85	49	139	70	110	118

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tugas belajar adalah tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri, dengan meninggalkan tugas, di mana biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah.PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dapat ditugaskan mengikuti pendidikan tertentu melalui tugas belajar dengan ketentuan orgabisasi memerlukan kompetensi dengan syarat pendidikan yang ditempuh. Penugasan PNS dalam tugas belajar merupakan kebutuhan daerah melalui mekanisme seleksi yang tepat dan transparan serta diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.Pembiayaan tugas belajar ditanggung oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri. Tempat pendidikan PNS untuk mengikuti tugas belajar adalah lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan lain (swasta) dengan akreditasi minimal B yang bekerjasama dengan pemerintah, kementerian atau lembaga non kementerian.Semenjak tahun 2021 IPDN bukakan lagi utusan daerah dan memasuki IPDN belum menjadi PNS.

Tabel 2.56
Jumlah Pemberian Tugas Belajar PNS Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	S-2	15	10	13	8	7	7	7
2	S-1	2	5	4	4	4	2	2
3	D-IV	4	6	1	1	1	2	-
4	D-III	-	-	-	1	1	-	-
Jumlah		21	21	18	14	13	11	9

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada para Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugasnya dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah bekerja terus-menerus dalam jangka waktu

tertentusekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Satyalancana ini ditetapkan pada tahun 1959. Satyalancana ini dibentuk dengan tujuan untuk menghargai jasa-jasa serta sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja sehingga dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.Pemberian Satyalancana ini difasilitasi oleh BKPSDM sebagai fasilitator ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu dengan mengajukan usulan ASN yang berhak diberikan penghargaan tersebut ke Kemendagri. Data dari tahun ke tahun tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Pemberian Satya Lencana Karya Satya
Tahun 2017-2023

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PNS yang berhak	354	100	151	-	-	51	178
2	Yang diusulkan	-	100	151	-	-	51	178
3	Realisasi	-	-	-	221	-	102	158

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memberikan teladan bagi masyarakat, dengan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS diwajibkan untuk mentaati peraturan sesuai dengan kedudukannya sebagai abdi negara.Apabila seorang PNS melakukan suatu bentuk pelanggaran (indisipliner), maka PNS tersebut akan diberikan sanksi kepegawaian. Sanksi kepegawaian merupakan sanksi administrasi yang berupa hukuman disiplin diperuntukkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS.Adapun beberapa jenis sanksi bagi PNS, diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi.Pemberian hukuman disiplin bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam hal administrasi kepegawaian terhadap seorang PNS, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut merupakan peralihan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman

disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin PNS adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas PNS itu sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut M. Suparno (1992:85), Peraturan Disiplin PNS adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban – kewajiban tidak ditaati atau dilanggar oleh PNS.Dengan maksud untuk mendidik dan membina PNS, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintah diatas tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS.Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.

Jenis kasus indisipliner yang ditangani oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari disiplin kehadiran hingga pidana korupsi dan pidana pencabulan.Adapun angka penanganan kasus indisipliner di wilayah kerja BKPSDM Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.58
Jumlah Pemberian Kasus Disiplin ASN di Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2019-2023

No	Kasus	2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1	Ringan	-		-		-	-	-	
2	Sedang	-		-		-	-	-	
3	Berat	8 1	Diberhentikan Pemberhentian sementara	6	Diberhentikan	0	Tidak Ada	2	Diberhentikan

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.3.6 Pendidikan dan Pelatihan

Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai abdi negara, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tentu perlu untuk terus mengembangkan diri.Pengembangan diri ini diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya dalam bertugas sebagai seorang PNS.Untuk itu, diperlukanlah suatu pendidikan dan latihan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pendidikan dan Pelatihan PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan, wawasan sikap dan moral Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan Pelatihan PNS yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah jenis dan penggolongan pendidikan dan latihan PNS :

a. Diklat Prajabatan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan merupakan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan guna membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sekaligus untuk memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan juga mengenai bidang tugas serta budaya organisasinya.

b. Diklat Dalam Jabatan

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan yang perlu ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil ada 3 (tiga) jenis, meliputi :

1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim)

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.Oleh karena itu diklat ini termasuk kedalam salah satu jenis diklat struktural, selain diklat prajabatan.

2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah bentuk diklat yang dilakukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional.

Diklat Fungsional merupakan jenis Diklat Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Jenjang jabatan fungsional ini terdiri dari :

- Diklat fungsional keahlian yang merupkaan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.
- Diklat fungsional ketrampilan yang merupakan bentuk diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan fungsional tertentu dan terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan.

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis merupakan diklat yang dilakukan guna mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas para PNS. Kompetensi Teknis ini merupakan kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu yang digunakan demi pelaksanaan tugas masing-masing. Diklat teknis meliputi :

- Diklat teknis bidang umum/administrasi dan manajemen yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/atau penguasaan pengetahuan dalam bidang pelayanan teknis yang sifatnya umum serta di bidang administrasi dan manajemen guna menunjang tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- Diklat teknis substantif yang merupakan diklat yang memberikan ketrampilan dan/ atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Selain jenis diklat di atas, dalam beberapa aplikasi kepegawaian terdapat jenis Diklat Formal dan Non Formal. Diklat formal sama seperti diklat fungsional, dimana diklat ini merupakan diklat wajib bagi para calon dan pejabat fungsional tertentu, contoh : diklat auditor, diklat profesi guru, dll. Sedangkan Diklat Non Formal adalah diklat yang tidak wajib dilaksanakan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti : diklat pengelolaan keuangan, diklat managemen sekolah, dan lain sebagainya. Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59
Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Diklat Prajabatan						
	Golongan II						
	- Reguler	-	-	-	-		-
	- Eks Honorer K 2	197	41	-	-		-
	Golongan II & III				243	161	
	- Umum Gol. III	-	158	-	-	-	-
	- Umum Gol. II	-	53	-	-	-	-
2	Diklat Struktural	-	-	-			
	Diklatpim Tk. II	-	-	-	-	-	1
	Diklatpim Tk. III	-	-	-	-	-	-
	Diklatpim Tk. IV	-	-	-	-	-	-
3	Diklat Fungsional	-	-	-			
4	- Diklat Fungsional Kepala SD	-	40	-	-	-	-
5	- Diklat Fungsional Kepala SMP	-	40	-	-	-	-
6	Diklat TOF	-	-	-	-	-	-
7	Diklat MOT	-	-	-	-	-	-
	Diklat Pengembangan Kompetensi ASN	80		-			
	- Diklat Bendahara ASN	-	30	-	-		

	- Bintek Anjab/ ABK	-	-	-	-	-	40
	- Bintek PAK bagi Pejabat Fungsional Disetarakan	-	-	-	-	-	80
	Diklat Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa	40		-			
	- Diklat Bendahara Desa	-	40	-	-		-
	- Diklat Kepemudaan Desa	-	40	-	-		-
Jumlah		317	472	0	243	161	121

Sumber: BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.3.3.7 Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah. Salah satu tugas yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan ormas. Berikut disajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	2	2	5
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	4	4	4	4	2

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan yang merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah (*value added*) dan persaingan baik dalam negeri (*domestic*) maupun internasional dalam peningkatan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 2.61
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2023

Kelompok Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Makanan	443.675	483.409	539.537	555.147	572.571
Jumlah Bukan Makanan	316.435	379.463	363.732	354.869	375.507
Jumlah/Total	760.110	862.872	903.269	910.016	948.078

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024 data diolah

Kegiatan pengumpulan data sosial dan ekonomi dilaksanakan secara rutin oleh BPS melalui survei social ekonomi nasional (Susenas). Sejak tahun 2011 sampai dengan 2014, pengumpulan data Susenas konsumsi pengeluaran rumah tangga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2015 pengumpulan data Susenas dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September.

Data konsumsi/pengeluaran yang dikumpulkan pada Susenas Maret dibagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan dan bukan makanan. Jumlah komoditas makanan sebanyak 174 komoditas. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya komoditas yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Referensi waktu survei yang digunakan adalah selama seminggu terakhir untuk konsumsi makanan dan sebulan atau setahun terakhir untuk konsumsi bukan makanan. Ketersediaan pangan per kapita adalah ketersediaan pangan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ketersediaan pangan per kapita bisa dalam bentuk kuantum maupun unsur gizi, yaitu kalori, protein, dan lemak.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Komitmen ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dilakukan. Taat azas yang dimaksud disini adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti proses pentahapan sesuai prosedur, dan adanya

komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mengawal RTRW tersebut. Sesuai dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2013, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Tapanuli Tengah semakin meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari strategi penyusunan RTRW yaitu rencana peruntukan wilayah dengan peruntukan yang telah ada dilapangan. Penetapan Kawasan Hutan Lindung di kabupaten Tapanuli Tengah mengacu kepada Usulan Revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:
SK.44/Menhut-II/2005tanggal 16 Februari 2005, luas kawasan hutan di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan SK Menhut tersebut sebesar 58.647ha yang kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.

b. Luas wilayah produktif

Wilayah budidaya merupakan suatu wilayah yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia dalam rangka kegiatan dan penghidupannya. Kawasan budidaya diharapkan dapat menampung semua kegiatan masyarakat, pemerintah dan swasta dengan tetap mempertahankan asas penatagunaan tanah yaitu Lestari, Optimal dan Seimbang/serasi (LOS). Luas wilayah produktif di Kabupaten Tapanuli Tengah masih relatif sangat luas, pada tahun 2022 luas areal tanaman perkebunan seluas 16.836,12ha, luas areal tanaman padi dan palawija seluas 28.730ha serta luas areal budidaya perikanan tahun 2022 seluas 11,02ha.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia

a. Investasi

Dalam mendukung perkembangan iklim berinvestasi, Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berusaha untuk menjamin maupun mempermudah proses izin administrasi hingga pelaksanaan di lapangan melalui koordinasi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal terhadap badan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan pendataan perizinan dalam rangka pengawasan peruntukan dan operasional izin usaha. Diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan/regulasi lebih baik sehingga mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

b. Angka Kriminalitas dan Jumlah Demonstrasi

Pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban nasional (Kantrantibnas) dan pencegahan tindak kriminal diwujudkan melalui peningkatan kerjasama aparat dalam teknik pencegahan kejahatan; peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah; serta pengawasan pengendalian dan evaluasi Perda. Selanjutnya peningkatan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan melalui

pengendalian keamanan lingkungan; pertemuan berkala Ormas, Orsospol, OKP dan LSM serta terselenggaranya Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direnca nakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro bertujuan untuk memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Kondisi ekonomi makro yang di pengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan antara lain adalah perekonomian regional, Nasional dan perkonomian Global.

Untuk mencapai target kinerja makro ekonomi yang telah direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar perencanaan yang sudah dibuat dapat diimplementasikan secara baik. Kerangka pendanaan merupakan basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip perencanaan anggaran berdasarkan prioritas pembangunan yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya ekonomi di suatu wilayah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah dilakukan dengan telaah terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi yang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional

Kondisi ekonomi Nasional trus mengalami tren peningkatan positif setelah terdampak Covid-19. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2024 sebesar 5,11 persen (y-o-y), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04 persen (y-o-y). Peningkatan ekonomi Nasional diperkirakan trus meningkat dengan didukung oleh peningkatan permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2024 didukung oleh permintaan domestik yang lebih tinggi. Konsumsi rumah tangga tumbuh seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024, hari libur nasional, momen ramadhan dan cuti bersama. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga tercermin dari sisi lapangan usaha dan spasial. Dari sisi lapangan usaha hampir seluruh lapangan usaha pada triwulan I 2024 menunjukan kinerja positif dengan pertumbuhan yang tinggi antara lain adalah transfortasi, pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta perdagangan besar dan eceran. Dari sisi spasial pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) tahun 2025

merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025–2029. Sebagaimana diamanatkan dalam rancangan UU RPJPN 2025–2045, bahwa RPJMN wajib selaras dan berpedoman kepada RPJPN serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) wajib selaras dan berpedoman pada RPJMN. Penyusunan perencanaan pembangunan membutuhkan sinergi, integrasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kemudian singkronisasi perencanaan pusat dan daerah perlu diperkuat melalui berbagai rangkaian koordinasi dan musyawarah untuk perencanaan pembangunan. Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

Pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode (2020-2024 ke 2025-2029). berdasarkan hal tersebut RKP tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, sebagai fondasi awal sasaran agenda-agenda transformasi. Sehingga penetapan RKP tahun 2025 **''Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**'' dengan berfokus pada infrastruktur yang berkualitas untuk peningkatan produktivitas, SDM yang berdaya saing dan produktif, dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan. Adapun target pertumbuhan ekonomi makro yang berkualitas dan inklusif berdasarkan RKP tahun 2025 yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6 persen
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0 persen
3. Rasio gini sebesar 0,379-0,382 persen
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen
5. Indeks modal manusia sebesar 0,56

Tantangan ekonomi Nasional di tahun 2025 tentu lebih kompleks setelah terdampak oleh Covid-19 meskipun dalam proses pemulihan ekonomi. Namun, dampak jangka panjang masih dirasakan oleh masyarakat khususnya tingginya tingkat pengangguran, perubahan pola konsumsi, dan restrukturisasi industri. Tidak hanya itu, tekanan inflasi yang menyebabkan kenaikan barang dan jasa, ketidakpastian politik dan konflik, perubahan iklim dan bencana alam, transformasi digital, ketergantungan pada sektor komoditas, dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan sehingga membutuhkan perencanaan yang baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi secara Nasional.

3.1.2 Kondisi Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Kondisi ekonomi Sumatera Utara tahun 2024 menunjukan beberapa tren positif meskipun menghadapi beberapa tantangan. Ekonomi Sumatera Utara pada triwulan I tahun 2024 tumbuh sebesar 4,88 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Meskipun melambat dari triwulan IV 2023 yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara adalah terjadinya perlambatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi seiring dengan

siklus penyerapan anggaran belanja pemerintah yang masih rendah diawal tahun, tidak hanya itu sikap *wait and see* investor ditengah berlangsungnya pemilu 2024 juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Meski demikian, perekonomian Sumatera Utara masih tetap kuat di topang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekspor dan impor. Hal ini sejalan dengan perayaan tahun baru imlek dan indikasi pergeseran pola konsumsi menjelang bulan ramadhan, peningkatan permintaan ekspor, dan pemulihan harga komoditas internasional. Secara keseluruhan kondisi ekonomi provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 menunjukan pemulihan yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi yang solid dan perbaikan dalam berbagai indikator sosial-ekonomi.

Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan di atas sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 ±1,0 persen (yoy). Inflasi Sumatera Utara pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 3,67 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,25 persen (yoy). Inflasi Sumatera Utara juga tercatat lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 3,05 persen (yoy). Tekanan inflasi bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, kemudian dikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Inflasi berdasarkan komoditas didorong oleh kenaikan harga beras, cabai merah, daging ayam ras, dan sigaret kretek mesin (SKM). Kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kenaikan biaya produksi dan tingginya permintaan barang dalam satu waktu tertentu.

Perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2025 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dari tahun 2024. Kebijakan ekonomi yang telah dijalankan untuk meningkatkan daya beli masyarakat antara lain melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong peningkatan daya beli produk UMKM/IKM, stimulus ekonomi pada sektor-sektor perekonomian yaitu pariwisata, pertanian, investasi, perindustrian, perdagangan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan strategis ekonomi serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat dalam rangka menurunkan tingkat Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui APBD Provinsi Sumatera Utara.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program prioritas nasional serta sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026. Untuk itu, pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengusung tema "**Akselerasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara".** Adapun tujuan dan arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara antara lain;

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan Gender
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif meelalui penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan petani serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

3. Meningkatkan layanan infrastruktur berkelanjutan melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, layanan infrastruktur permukiman, kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta serta penurunan ketimpangan pembangunan wilayah serta ketangguhan bencana.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas melalui peningkatan penilaian kualitas pembangunan dan inovasi daerah, keberlanjutan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dimana target makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,20-5,40 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 73,10 – 73,40
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi: 8.20 – 8,00 persen
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi: 5,50-5,20 persen
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi: 0,324 poin
6. Laju Inflasi menurun menjadi: 2,75 ± 1 persen
7. Emisi GRK menurun menjadi: 30,16 juta Ton CO2eq

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output barang dan jasa disuatu sektor ekonomi dari waktu ke waktu. Hal ini merefleksikan peningkatan standar hidup serta ketersediaan barang dan jasa bagi penduduk. Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dapat diukur menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Regional Bruto (PRB). Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah ukuran total barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah tertentu dalam priode satu tahun. PDRB digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu daerah dan membandingkan kinerja ekonomi antar wilayah. Peningkatan PDRB dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti Konsumsi rumah tangga, Investasi, pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor net (selisih harga ekspor dan impor).

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah selama lima tahun mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 trus mengalami peningkatan signifikan terutama pada tahun 2022 hingga 2023 setelah terjadinya Covid-19 atau masa transisi ke new normal. Salah satu penyebabnya adalah upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan cara memberi bantuan sosial baik bantuan langsung tunai maupun bantuan berupa kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. nilai PDRB berdasarkan harga berlaku Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 sebesar RP. 11.635,30 Miliar kemudian pada tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 12.631,77 Miliar. Hal ini menunjukan bahwa daya beli masyarakat mengalami peningkatan.

Gambar 3.1
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (y-on-y) KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2019-2023

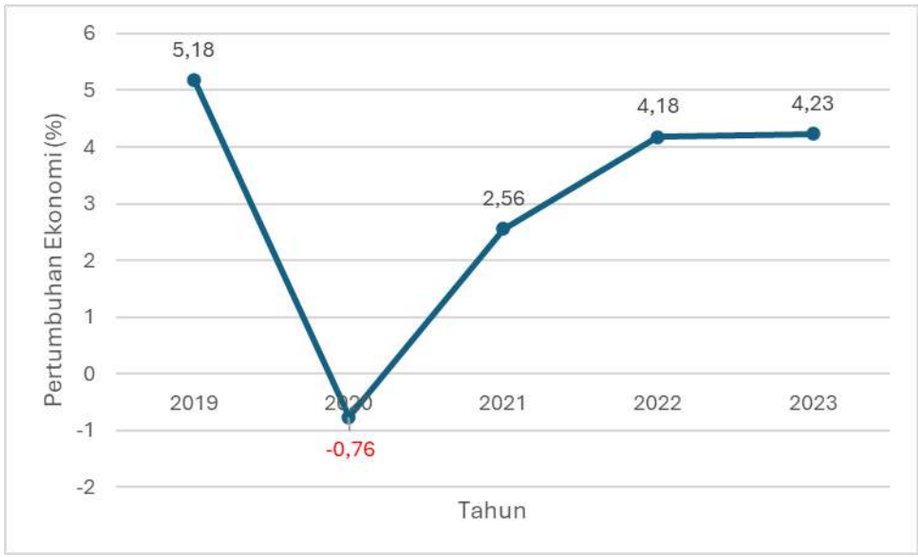

Dalam beberapa tahun terakhir setelah terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mengalami kontraksi signifikan mencapai -0,76 persen pada tahun 2020. Namun pada tahun selanjutnya pemerintahan terus berupaya agar pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Tengah agar tetap stabil dan mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan seiring dengan normalnya aktivitas masyarakat setelah terdampak Covid-19. laju pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun mulai dari tahun 2019 hingga 2023 terus bertumbuh. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan mencapai 4,23 persen meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,56 persen.

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha menunjukan peningkatan yang fluktuatif. Berdasarkan disitribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki persenstase tertinggi yakni 46,80 persen, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,55 persen, sektor konstruksi 12 persen, sektor indsutri pengolahan 11,25 persen, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 7,20 persen. Kontribusi masing-masing sektor tersebut memiliki persentase tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun demikian peningkatan persentase PDRB atas dasar berlaku secara umum berfluktuatif dan relatif stabil di masing-masing sektor. Hal ini menunjukan bahwa pengembangan ataupun pembangunan di setiap sektor masih dirasa kurang optimal sehingga perlu perhatian khusus dari permintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk mencapai pengembangan ekonomi makro yang optimal perlu mempertimbangkan beberapa indikator agar kebijakan yang diambil oleh pemerintahan

dapat dicapai dengan baik dan tepat sasaran. Adapun indikator ekonomi makro terdiri dari Indeks pembangunan manusia (IPM), Laju pertumbuhan ekonomi (LPE), Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Persentase penduduk miskin, indeks gini dan PDRB perkapita.

Struktur perekonomian makro Kabupaten Tapanuli Tengah masih didominasi oleh sektor/lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan peranan sebesar 46,80 persen pada tahun 2023, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika dilihat secara umum pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukan tren peningkatan meskipun tidak signifikan , namun dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk menghindari ketergantungan pada satu sektor ekonomi maka dibutuhkan upaya untuk divesifikasi ekonomi sehingga pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

Gambar 3.2
STRUKTUR PEREKONOMIAN MAKRO KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023 BERDASARKAN PDRB ADH BERLAKU (PERSEN)

2022*	Kategori/Lapangan Usaha	2023**
46,76	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,80
0,26	B. Pertambangan dan Penggalian	0,26
11,6	C. Industri Pengolahan	11,25
0,56	D. Pengadaan listrik dan gas	0,53
0,12	E. Pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang	0,12
11,7	F. Konstruksi	12,00
12,57	G. Perdagangan besar & eceran, reparasi mobil & sepeda motor	12,55
2,41	H. Transportasi dan pergudangan	2,74
1,33	I. Penyediaan akomodasi & makan minum	1,32
0,66	J. Informasi dan Komunikasi	0,65
0,96	K. Jasa keunagan dan Asuransi	0,96
1,94	L. Real Estat	1,94
0,34	M.N. Jasa perusahaan	0,34
7,2	O. Administrasi pemerintahan, pertahanan & Jaminan sosial wajib	7,20
0,93	P. Jasa pendidikan	0,93
0,33	Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,33
0,09	R.S.T.U Jasa lainnya	0,09

3.1.3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan hidup layak. untuk mencapai indeks pembangunan manusia (IPM) yang berkualitas dan optimal. Untuk mencapai peningkatkan nilai Indeks pembangunan manusia (IPM) maka pemerintahan dapat berfokus pada Usia harapan hidup untuk mencapai dimensi umur panjang dan hidup sehat, harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata lama sekolah (RLS) untuk mencapai dimensi pengetahuan, dan pengeluaran perkapita untuk mewakili dimensi hidup layak.

Gambar 3.3
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019-2023

Sumber data : BPS Kab. Tapanuli Tengah dalam angka 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat sejak tahun 2019 menunjukan peningkatan hingga tahun 2023 meskipun melambat. Pada tahun 2019 nilai Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 68,86, kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 72,77. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan indikator pendukung indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukan bahwa Usia harapan hidup masayarakat kabupaten Tapanuli Tengah mengalami peningkatan sejak lima tahun kebelakang dari 67,08 Tahun menjadi 71,76 tahun. Hal ini menunjukan bahwa kualitas kesehatan masayarakat Kabupaten tapanuli Tengah semakin membaik. Hal ini didukung oleh peningkatan infrastruktur pelayanan kesehatan dan juga perhatian terhadap gizi ibu dan anak yang terus dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Gambar 3.4
Usia harapan Hidup Tahun 2019-2023

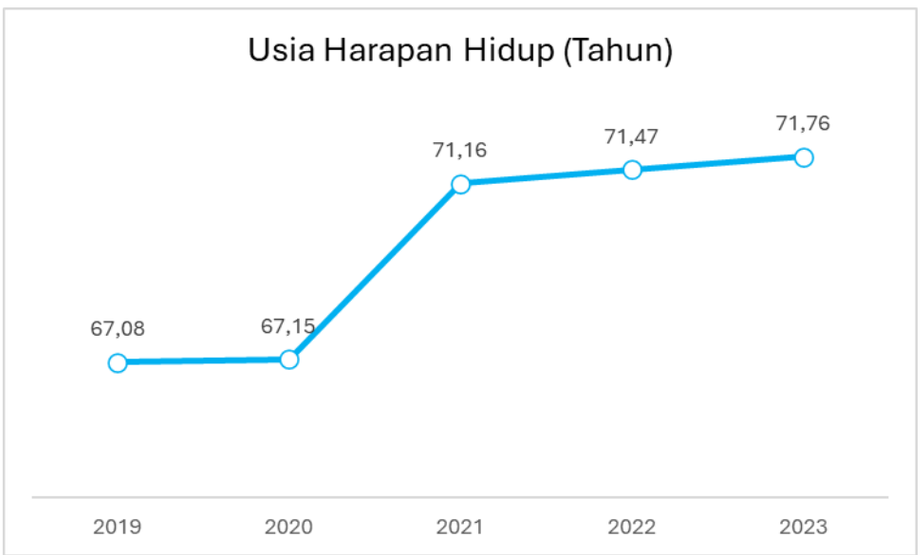

Sumber data : BPS kab Tapanuli Tengah dalam angka 2024

Pertumbuhan positif juga terjadi pada indikator Harapan lama sekolah (HLS). Indikator harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal dan dihitung dari usia 7 tahun keatas. Dalam rentang waktu selama lima tahun terkahir harapan lama sekolah (HLS) menunjukan tren peningkatan positif sebesar 12,79 tahun hingga 13,49 tahun. Hal ini menunjukan bahwa penduduk usia 7 tahun dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA atau D1. Hal ini memiliki pengaruh positif terhadap potensi sumberdaya manusia pada generasi mendatang yang lebih baik.

Gambar 3.5
Harapan lama sekolah Tahun 2019-2023

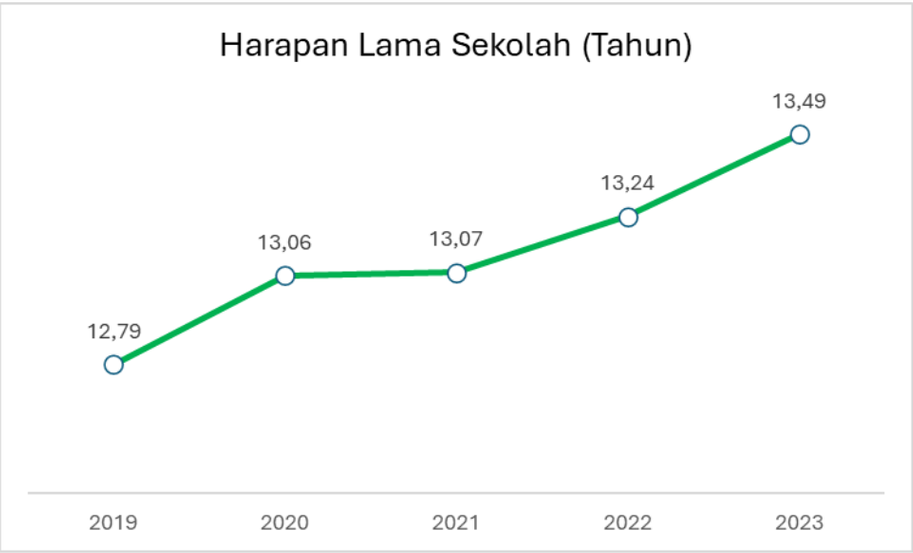

Sumber data : BPS Kab Tapanuli Tengah dalam angka 2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) digunakan untuk mengukur rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal. Berdasarkan data lima tahun terakhir menunjukan Rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukan tren peningkatan dari 8,48 tahun meningkat menjadi 8,87 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata masyarakat kabupaten Tapanuli Tengah belum mengentaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Persoalan tersebut telah ditangani dengan berbagai program dari pemeintahan terutama bantuan pendidikan salah satunya berupa beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu.

Gambar 3.6
Harapan lama sekolah Tahun 2019-2023

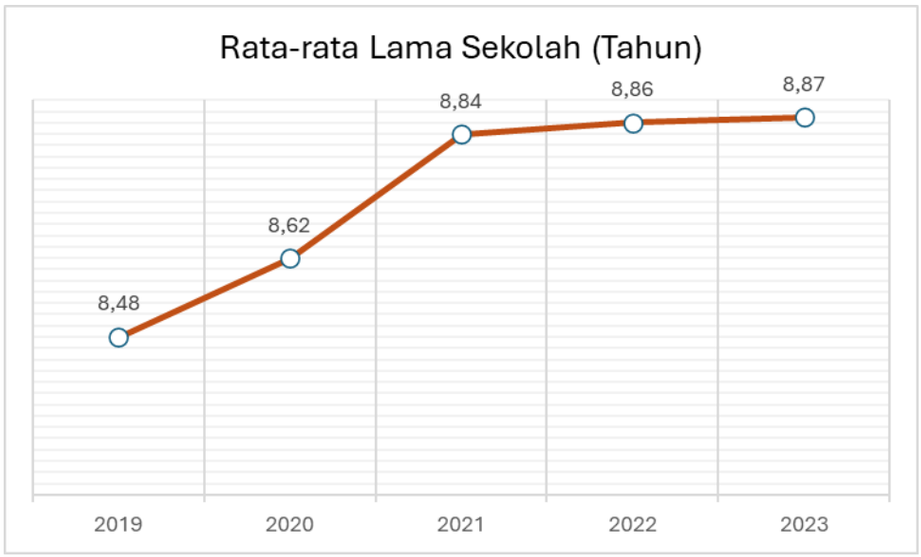

Sumber data : BPS Kab Tapanuli Tengah dalam angka 2024

Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Capaian indikator pengeluaran perkapita juga mengalami peningkatan setelah kembali normalnya wabah Covid-19. upaya pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Tingkat pengeluaran perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah trus mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir setelah kembali normalnya aktivitas masyarakat karna dampak dari wabah Covid-19. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan pengeluaran perorangnya dari Rp. 10.138 meningkat menjadi Rp. 10.690/orang. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya lapangan usaha untuk menambah pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap pengeluaran perkapita.

Gambar 3.7
Pengeluaran Perkapita Tahun 2019-2023

Sumber data : BPS Kab Tapanuli Tengah dalam angka, 2024

3.1.3.3. Penduduk Miskin

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 3.2
Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016-2022

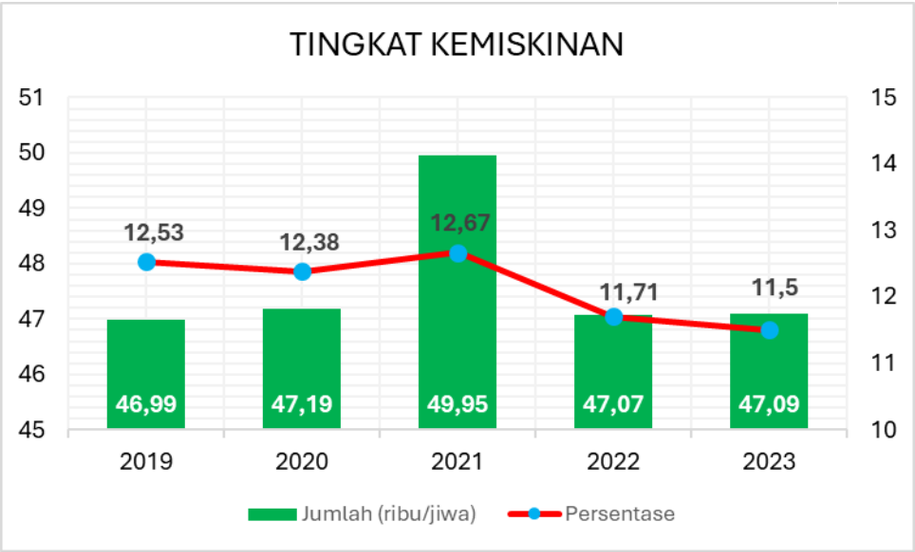

Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Tingkat kemiskinan mencerminkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan data statistik menunjukan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah sempat mengalami peningkatan singnifikan pada tahun 2021 sebesar 49.950 jiwa atau 12,67 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabaputen Tapanuli Tengah. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kasus Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 silam. Namun demikian pemerintahan terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-program tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Upaya tersebut berhasil dan menunjukan tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 47.070 jiwa dan pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 47.090 jiwa.

Selain itu terdapat pula kemiskinan ekstrem dimana Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang

dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.

Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 25 Tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023-2024.

Tabel 3.1
Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2022

No	Daerah	Kemiskinan (x.000 jiwa)		Kemiskinan Ekstrem (x.000 jiwa)	
		2021	2022	2021	2022
1	Tapanuli Tengah	49.95	47.07	12,09	10,98
2	Sumatera Utara	1.343,86	1.268,19	208,06	212,81
3	Indonesia	27.542,77	26.161,16	5.800,05	5.590,72

Pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah individu dengan kemiskinan ekstrem yaitu dari 12.092 jiwa menjadi 10.997 jiwa, atau 3,07 % menjadi 2,73 %. Posisi tersebut masih diatas angka nasional.

Grafik 3.3
Grafik Perbandingan Persentase Kemiskinan Ekstrem

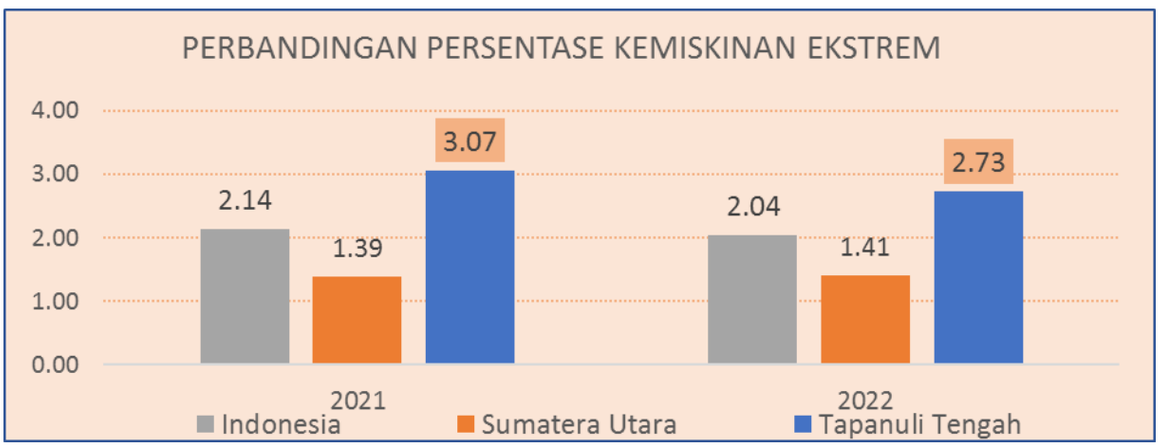

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah

3.1.3.4. Gini Rasio

Gini Rasio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Distribusi pendapatan semakin merata ketika koefisien rasio gini antara 0,20 s/d 0,35 dan sebaliknya distribusi pendapatan dikatakan sangat timpang antara 0,50 s/d 0,70. Tingkat ketimpangan penduduk Kabupaten tapanuli Tengah 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2022 menunjukan tren positif dimana ketimpangan pendapatan mengalami penurunan signignifikan sebesar 0.233 dari 0,335 pada tahun 2020 setelah pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,241 meningkat 0,008 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.3
PERKEMBANGAN GINI RATIO KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2019-2023

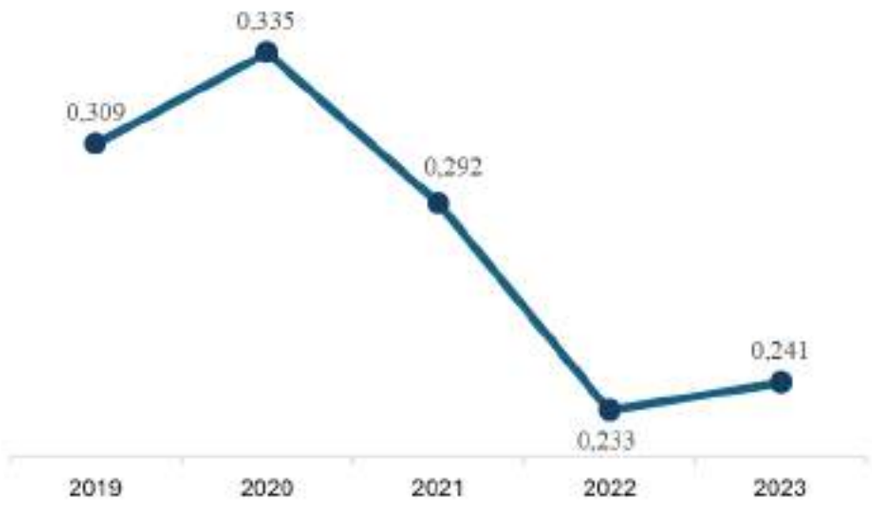

Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Penurunan indeks Gini rasio disebabkan oleh beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah membaiknya kinerja aktivitas ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.

3.1.3.5. Inflasi

Secara umum laju inflasi merupakan persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu priode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah permintaan dan penawaran barang, biaya produksi, kebijakan moneter, dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendekatan laju inflasi Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan laju inflasi di Kota Sibolga. Pada kurun waktu 2019-2023 secara umum laju inflasi Kota Sibolga mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan signifikan pada tahun 2022 sebesar 6,43 persen, namun pada 2023 pemerintahan berhasil menekan laju inflasi menjadi 2,80 persen. Kenaikan laju inflasi tentu akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kebutuhan bahan makanan menjadi penyumbang terbesar mempengaruhi tingkat laju inflasi di kota sibolga dan sekitarnya.

Grafik 3.4
Laju Inflasi Tahun 2019-2023

Laju inflasi Kota Sibolga bila dilihat rata-rata diatas laju inflasi Provinsi dan Nasional. Peningkatan inflasi tidak hanya diengaruhi oleh kondisi internal saja, tetapi juga Nasional dan global. Pada tahun 2025 pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah optimis inflasi di kabupaten/kota tersebut akan tetap stabil dan bahkan berkurang.

3.1.3.6. Tingkat Penangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha yang tersedia di daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tapanuli Tengah bergerak secara fluktuatif. Penurunan angka pengangguran signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 7,24 persen kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,98 persen dan pada tahun 2023 sedikit menurun menjadi 7,81 persen. Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran secara umum mengalami peningkatan sejak lima tahun terakhir. TPT berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 menunjukan TPT laki-laki lebih tinggi sebesar 10.119 orang, dibandingkan TPT perempuan sebesar 6.368 orang.

Jika dilihat secara umum jumlah Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja (TPAK) terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan rasio angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh lapangan kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka juga ikut meningkat. Pada tahun 2019 menunjukan tingkat angkatan kerja sebanyak 171.470 orang, meningkat menjadi 211.032 orang pada tahun 2023. Sementara tingkat pengngguran terbuka pada tahun 2019 sebesar 12.447 orang, meningkat menjadi 16.487 orang pada tahun 2023.

Tabel 3.2
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2019 - 2023

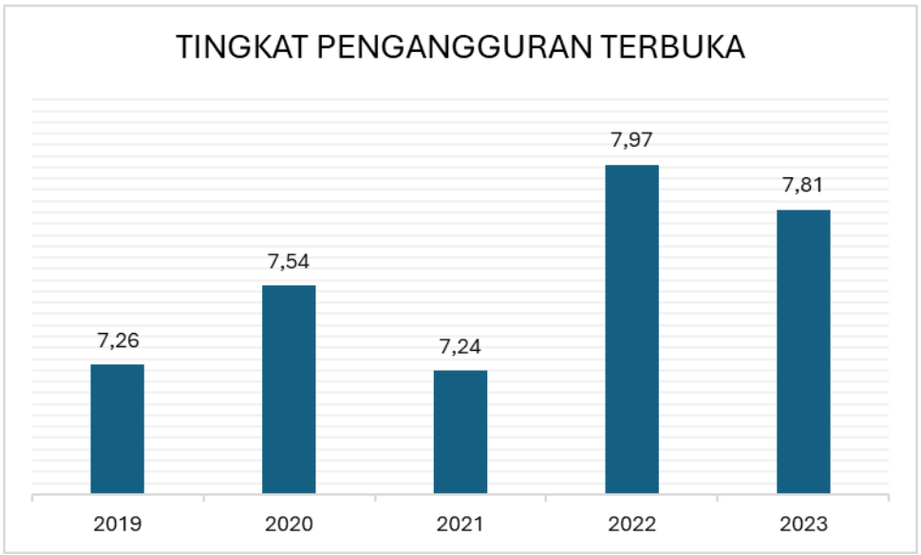

Sumber data : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, 2024

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah sejak tahun 2020 hingga saat ini akibat penurunan aktivitas usaha yang melibatkan tenaga kerja, pengurangan jam kerja dan bahkan PHK terhadap tenaga kerja akibat meruginya perusahaan. Namun demikian pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah tetap optimis untuk menekan tingkat pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan melalui pendampingan UMKM, pelatihan dan pemberian akses permodalan.

3.1.4 **Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025**

3.1.4.1. Tantangan

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah akan menghadapi berbagai tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian nasional dan global. Tantangan perekonomian Kabupaten tapanuli tengah pada tahun 2025 dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan daerah. Beberapa tantangan yang mungkin akan dihadapi adalah :

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas transfortasi lainnya akan mempengaruhi aksesibilitas dan mobilitas ekonomi.
2. peningkatan Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja lokal yang berperan penting dalam pengembangan ekonomi.
3. Akses terhadap modal dan investasi yang merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
4. pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan penyumbang PDRB tertinggi di kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat bergantung pada perubahan iklim, penurunan produktivitas, dan masalah lingkungan.
5. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung tranformasi digital daerah
6. Pengendalian inflasi

7. Penguatan Koperasi dan UMKM serta pelaku-pelaku usaha pada sektor-sektor ekonomi potensi lokal dan strategis seperti pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan.
8. Penghapusan kemiskinan ekstrim
9. Penurunan stunting
10. Peningkatan pelayanan sektor pendidikan dan kesehatan, dan
11. Peningkatan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

3.1.4.2. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah diperkirakan akan terus tumbuh positif seiring kembali normalnya aktivitas masyarakat. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah adalah :

1. Pengembangan destinasi wisata. Kabupaten Tapanuli tengah memiliki potensi wisata alam dan budaya yang besar termasuk pantai, pegunungan dan situs bersejarah. Pengembangan infrastruktur dan promosi yang tepat, sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan.
2. Sektor pertanian, perikanan dan perkebunan merupakan sektor penyumbang PDRB tertinggi Kabupaten Tapanuli Tengah pengembangan masing-masing sektor dengan tepat dapat mendongkrak perekonomian daerah. Pengelolaan sumberdayaalam berkelanjutan, diversifikasi produk, penggunaan teknologi, dan pembangunan indsutri pengolahan menjadi salah satu upaya untuk meningkatan nilai tambah dan produktivitas lintas sektor.
3. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi yang memadai akan mendukung mobilitas dan distribusi barang serta memudahkan aksesibilitas masyarakat. Konektivitas digital juga menjadi hal yang penting seiring pesatnya peningkatan teknologi informasi yang terus berkembang guna mendukung ekonomi digital dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah.
4. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM. Potensi ekonomi kreatif dan UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat masif. Namun jika tidak di dukung oleh pemerintahan daerah tentu akan tergerus oleh perkembangan industri-industri yang sudah menggunakan teknologi modren. Oleh sebab itu pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif penting untuk dilaksanakan melalui akses permodalan, pelatihan dan tujuan pasar.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah

(Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan); 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan Dana insentif daerah. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Secara umum kinerja keuangan daerah berfluktuatif. Sumber utama pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pada tahun 2022 jumlah pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp.1.171 Milyar, mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar Rp.1.188 Milyar. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah harus terus meningkat untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Untuk mendukung terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, arah kebijakan yang dilakukan antara lain :

1. Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
2. Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
3. Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
4. Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
5. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
6. Pengembangan Sektor Ekonomi: Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
7. Reformasi digital dengan mengembangkan sistem pembayaran pajak secara online
8. Melakukan cleansing data base kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

9. Optimalisasi hasil usaha BUMD agar memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal serta meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Jumlah Pendapatan Daerah Tahun 2023-2024
dan Proyeksi Pendapatan DaerahTahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp		
		REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**78.814.754.455,14**	**91.847.220.683,00**	**82.805.789.000,00**
4.1.01	Pajak Daerah	25.675.210.649,00	27.378.087.000,00	26.957.938.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.697.432.000,00	3.657.500.000,00	2.090.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.258.065.683,00	10.253.065.683,00	10.790.167.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	41.184.046.123,14	50.558.568.000,00	42.967.684.000,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.100.529.446.315,00**	**1.140.142.624.097,00**	**1.163.733.203.012,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.042.454.851.618,00	1.085.980.881.000,00	1.104.333.203.012,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.074.594.697,00	54.161.743.097,00	59.400.000.000,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**9.010.395.355,00**	**17.322.333.600,00**	**23.345.588.108,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.010.395.355,00	17.322.333.600,00	23.345.588.108,00
	Jumlah Pendapatan	**1.188.354.596.125,14**	**1.249.312.178.380,00**	**1.269.884.580.120,00**

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah secara umum antara lain :

1. Belanja wajib dan mengikat
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Belanja pendidikan, kesehatan dan infrastrukutr
4. Belanja peningkatan pertumbuhan ekonomi
5. Belanja pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting
6. Belanja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;.

7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada Pemerintahan Desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan DAU, DAK dan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
10. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2022 yaitu Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Pengembangan Sentra-Sentra Ekonomi, Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerjasama Daerah.
11. Mendukung program/kegiatan strategis dan prioritas yang terkait dengan agenda nasional dan provinsi dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.

Selanjutnya realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Belanja Daerah Tahun 2023-2024
dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp		
		REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**817.820.255.996,14**	**875.751.626.699,00**	**881.246.394.191,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	449.075.408.836,00	500.193.351.860,00	519.621.348.050,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.460.146.318,14	323.635.090.737,00	344.310.847.522,00
5.1.03	Belanja Bunga	4.248.013.228,00	3.787.528.202,00	3.108.426.269,00
5.1.05	Belanja Hibah	23.728.687.614,00	48.135.655.900,00	14.205.772.350,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.308.000.000,00		
	BELANJA MODAL	**139.248.596.731,00**	**171.598.045.390,00**	**180.033.896.752,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.604.456.422,00	41.010.816.228,00	43.269.834.028,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.852.246.192,00	51.536.917.652,00	53.745.936.664,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.143.127.767,00	73.374.393.519,00	77.342.208.069,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.648.766.350,00	5.675.917.991,00	5.675.917.991,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.141.387.268,16**	**2.857.678.767,00**	**3.579.715.253,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.141.387.268,16	2.857.678.767,00	3.579.715.253,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**190.682.126.100,00**	**208.083.977.400,00**	**208.181.748.800,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	3.103.558.700,00	2.904.793.800,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	190.682.126.100,00	204.980.418.700,00	205.276.955.000,00
	Jumlah Belanja	**1.148.892.366.095,30**	**1.258.291.328.256,00**	**1.273.041.754.996,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**39.462.230.029,84**	**(8.979.149.876,00)**	**(3.157.174.876,00)**

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar

kembali atau diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit.

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran Pembiayaan bersumber dari Pembayaran Pokok Utang, dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Jumlah Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH Rp		
		REALISASI TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**33.697.902.598,03**	**19.631.996.000,00**	**17.310.021.000,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.697.902.598,03	19.631.996.000,00	17.310.021.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**33.697.902.598,03**	**19.631.996.000,00**	**17.310.021.000,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**6.334.049.173,00**	**10.652.846.124,00**	**14.152.846.124,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			3.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.334.049.173,00	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**6.334.049.173,00**	**10.652.846.124,00**	**14.152.846.124,00**
	Pembiayaan Netto	**27.363.853.425,03**	**8.979.149.876,00**	**3.157.174.876,00**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**66.826.083.454,87**	**-**	**-**

Pemerintahan Tapanuli Tengah terus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaannya berdasarkan potensi daerah yang ada untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat**.** sejalan dengan kebijakan dan belanja daerah, maka arah kebijakan pembiayaan di tahun 2025 akan diarahkan pada:

1. Meningkatkan investasi dan kerjasama pemerintahan dan swasta dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
2. meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD melalui profesionalisme dan inovasi serta mengembangkan kerjasama strategis antara BUMD dan pihak swasta dan meningkatkan profitabilitas.
3. Memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi dengan penerapan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-tiga RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rencana Pembangunan Daerah periode 2023–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Indikator Tujuan RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator	Target Akhir
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**65,00 (B)**
Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah	**Indeks Pembangunan Manusia**	**72,77-73,17**
Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Taapanuli Tengah	**Tingkat Kemiskinan**	**10,00-11,00**
Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,00-6,00**

Berdasarkan pada tabel tersebut, maka penjelasan masing–masing tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu :

1. **Tujuan Pertama, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik *(Good Governance)***

Tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep penyelenggaraan tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, menghargai nilai–nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, dan secara sadar dan sistematis membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi unsur transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang merupakan dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Perwujudan *Good Governance* tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada kerja sama yang baik antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, di mana dalam pelaksanannya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien.

Tujuan pertama, yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance)*** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Persepsi Anti Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT dengan indikator Indeks Pelayanan Publik

2. **Tujuan Kedua, Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah**

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu aset penting dalam suatu pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung dengan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta pemanfaatan teknologi IT untuk membantu pengembangan kompetensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, serta memberikan ruang bagi para pemuda untuk ikut serta dalam pembangunan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkompeten dan berdaya saing.

Tujuan kedua, yaitu **Meningkatkan Kompetensi dan Daya Saing SDM Tapanuli Tengah** memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan (termasuk pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pencegahan

dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (seperti AIDS, TB dan Malaria).

b. Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan (termasuk peningkatan dan pemerataan kompetensi tenaga kependidikan, mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif)

3. Tujuan Ketiga, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri semaksimal mungkin. Kesejahteraan merupakan keadaan ideal yang diinginkan oleh setiap masyarakat. Dukungan terhadap peningkatan kompetensi masyarakat di berbagai bidang termasuk dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja, berwirausaha, serta pengoptimalan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada dapat mewujudkan kesejahetraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Tujuan ketiga yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tapanuli Tengah** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator Indeks Pengeluaran dan PDRB Perkapita;
b. Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
c. Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator Indeks Gini.

4. Tujuan Keempat, Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengupayakan pertumbuhan perekonomian yang semakin meningkat. Peningkatan sektor perekonomian Tapanuli Tengah dilakukan dengan memanfaatan dan mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pariwisata maupun subsektor ekonomi kreatif. Selain mengelola sektor–sektor unggulan secara optimal, pembangunan infrastruktur untuk mendukung sarana dan prasaran setiap kegiatan juga terus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Dalam pengembangan perekonomian Tapanuli Tengah terdapat hal yang harus diperhatikan agar tidak berdampak signifikan atau menimbulkan permasalahan bagi Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang merupakan suatu konsep pengembangan perekonomian dengan memperhatikan lingkungan agar dapat berjalan beriringan dengan baik.

Tujuan keempat, yaitu **Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah dengan indikator LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan LPE Kategori Industri Pengolahan;
b. Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif dengan indikator LPE Sektor Pariwisata dan LPE Subsektor Ekonomi Kreatif;
c. Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata dengan indikator Indeks Infrastruktur; dan
d. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun Target 2025
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)		**Indeks Reformasi Birokrasi**	-	61,00 (B)
86,7 65,634 62,50(C)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	61,00 (B)
		Indeks MCP (*Monitoring Center for Prevention*)	-	86,7
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	65,634
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		62,50(C)
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah		**Indeks Pembangunan Manusia**	-	72,77-73,17
	Meningkatnya	Indeks Kesehatan		0,732

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun Target
				2025
	derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting		18,8
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan		0,688
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah		**Tingkat Kemiskinan**	%	10,33-11,33
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,714
		PDRB per Kapita	Juta Rp	34,31
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,25
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,306
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	%	3,50-5,50
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,47
		LPE kategori industri pengolahan	%	4,783
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	%	6,75

Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Tahun Target
				2025
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	-	34.53
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,98
		Indeks Risiko Bencana	-	177,70

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dapat diartikan merumuskan langkah yang diambil oleh Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mencapai tujuan dasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen RPD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026. Perencanaan strategis tidak saja menggambarkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung strategi dan arah kebijakan sehingga dapat mengukur kesesuaian kebijakan yang telah dirumuskan dengan kondisi yang ada dilapangan.

4.2.1. Strategi

Dalam dokumen RPD, penentuan tujuan dan sasaran disesuaikan dengan dokumen RPJPD dan isu strategis. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai. Strategi adalah serangkaian langkah strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPD. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023–2026 dapat dilihat pada tabel VI.I berikut:

Tabel 4.3

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

Tujuan/Sasaran		Strategi
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)		
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	
Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah		
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan produktivitas tenaga kerja
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan perdesaan
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan		
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah

Tujuan/Sasaran		Strategi
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana

Penjabaran dari strategi RPD Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain:

1. **Strategi 1**, Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel

   Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk mencapai tahap pemerintahan yang baik. Bentuk reformasi birokrasi ini berupa birokrasi yang cepat, melayani, responsive terhadap perubahan dan perkembangan jaman. Selain itu, keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelengaraan urusan daerah yang diyakini mampu mendorong pasrtisipasi masyarakat, sehingga pembangunan akan berjalan lebih baik dan efisien. Keberhasilan penyelenggaraam Reformasi Birokrasi dapat dilihat dari tercapainya pemerintah daerah Tapanuli Tengah yang bersih, akuntabel dan kapabel. Untuk mencapai predikat tersebut diperlukan sinergitas aparatur pemerintah sebagai pelaksana birokrasi melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah dalam melaksanakan tugas mereka sebagai "*publik servant*" pada semua tingkatan dan lini pemerintahan. Selain itu, Menciptakan sistem kerja yang tertib, rapih dan efisien untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas aparat pemerintah.

   Tata kelola pemerintah yang baik juga terwujud pada pelayanan publik sebagai salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Di era teknologi dan pandemi ini, pelayanan publik berbasis teknologi dan mudah diakses melalui rumah merupakan salah satu pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah Tapanuli Tengah berupaya untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. **Strategi 2**, Peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua urusan yang menentukan kualitas Sumber Daya Manusia, sebagaimana negara maju dapat dikenali dari mutu kesehatan dan pendidikan yang diberikan kepada masyarkat. Fokus peningkatan kualitas pendidikan dilihat dari akses, sarana dan psrasaran serta kualitas guru. Terlebih di era pandemi ini, pembelajaran jarak jauh masih berlaku sehingga aktivitas belajar mengajar menggunakan teknologi informasi sangat diperlukan. Peningkatan pendidikan yang berkualitas diarahkan untuk menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun serta menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat tertinggal serta masyarakat penyandang cacat termasuk penyelenggaraan pendidikan alternatif dan pendidikan khusus.

Isu kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah adalah *stunting*. Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting* menjadi perioritas dalam isu kesehatand daerah. Penanganan masalah *stunting* tetap dilakukan, namun tidak mengesampingkan isu kesehatan lainnya seperti pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (seperti AIDS, TB dan Malaria). Peningkatan kualitas kesehatan diarahkan untuk meningkatkan jumlah, jaringan, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan masyarakat, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, mengembangkan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin, meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat sejak usia dini serta pengembangan manajemen kesehatan.

3. **Strategi 3**, Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Sebagian besar penduduk di Tapanuli Tengah bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang juga merupakan komodiri utama perekonomian di Tapanuli Tengah. Di era pandemi ini, seluruh sektor pembentuk PDRB terdampak. Namun sekor pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung stabil sehingga angka pengangguran dan angka kemiskinan di Tapanuli Tengah tidak turun drastis. Untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran diperlukan stimulus bagi masyarakat, terutama masyarakat kelompok usia produktif. Pengembangan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja juga diupayakan melalui kebijakan untuk menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang Pertanian dan kelautan. Upaya ini, berkaitan dengan teknologi pengolahan tanaman pangan dan hasil perikanan yang merupakan sektor-sektor dominan bagi pertumbuhan

ekonomi daerah, sehingga kesinambungan antara pelatihan dan tenaga kerja dapat dikembangkan secara sinergis.

4. **Strategi 4**, Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan perdesaan

   Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional karena hakikatnya pembangunan desa adalah titik pusat dari segala upaya pembangunan. Sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dilaksanakan secara bersama-sama di dalam musyawarah, mufakat, gotong-royong merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di Indonesia. Pembangunan di desa dilakukan secara mandiri dikarenakan adanya dana desa yang bersumber pada APBN yang diperuntukan bagi desa. Pembangunan desa yang efektif dapat dilakukan dengan memetakan potensi dari setiap desa di Tapanuli Tengah, seperti potensi wisata dan potensi hasil pertanian. Setelah memetakan potensi sumber daya wilayah, pembangunan perdesaan diarahkan kepada pengembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan, pengembangan infrastruktur jalan dan kelistrikan di pedesaan, perluasan akses terhadap sumber daya produksi dan pasar, dan pengembangan sistem agribisnis berbasis pengembangan wilayah. Dengan digitalisasi, proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif dan menguntungkan.

5. **Strategi 5**, Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah

   Potensi pereknomian di Kabupaten Tapanuli Tengah didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan melalui pendekatan ini dapat ditingkatkan bagi pendapatan pelaku agribisnis dan agroindustri. Proses pengembangan agribisnis dan agroindustri di era teknologi ini sangat baik, dikarenakan sistem pemasaran, penyediaan sarana pengangkutan, penyebaran produk kelembagaan agribisnis dan agroindustri lebih mudah.

   Sektor potensi lainnya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sektor pariwisata. Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki panorama keindahan alam yang sangat kaya. Pesona alam Kabupaten Tapanuli Tengah berupa pantai, laut, bawah laut dan danau sangat potensial untuk menjadi pusat kunjungan wisata untuk Kawasan Barat Sumatera Utara. Hal ini menuntut adanya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengakses daerah objek wisata, serta selanjutnya peningkatan pemasaran wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produk-produk wisata dan apresiasi serta peran serta masyarakat dan dunia swasta dalam meningkatkan efektifitas promosi, investasi kepariwisataan dan sinergisitas dalam jasa pelayanan pariwisata. Kepariwisataan di Tapanuli Tengah

telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah kabupaten Tapanuli Tengan Tahun 2018-2028.

6. **Strategi 6,** Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah

   Pembangunan infrastruktur berpotensi memberikan kontribusi pada pemulihan ekonomi agar menjadi lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Pembangunan infrastuktur bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah, karena jika kesenjangan antarwilayah dapat teratasi maka daya saing antarwilayah akan meningkat. Pembangunan infrastruktur terdiri dari fasilitas fisik dan non fisik yang keduanya saling berkaitan dan saling mendukung. Pembangunan fasilitas fisik berupa infrastruktur perhubungan/transportasi, sedangkan infrastruktur non fisik seperti infrastruktur teknologi dan infomasi.

   Penyediaan dan percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata, kawasan terisolir, dan kawasan ekonomi strategis. Sedangkan infrastruktur teknologi dan informasi disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini yang semakin maju di mana komunikasi dapat terjalin melalui internet. Infrastruktur teknologi dan informasi di era pandemi ini merupakan suatu kebutuhan dikarenakan proses pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi telah mempengaruhi proses belajar, proses ekonomi masyarakat dan proses pelayanan publik dilakukan secara online.

7. **Strategi 7,** Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan ketangguhan menghadapi bencana

   Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjalin keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan masa yang akan datang. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang di dalamnya terdapat pemanfaatan, penataan, pengawasan, pemulihan pengendalian, pemeliharaan juga pengembangan lingkungan hidup itu sediri. Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung oleh lembaga pemerintahan yang handal dan penegakan hukum yang tegas dengan tetap mengacu pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan kebencanaan dikarenakan upaya menjaga kelestarian lingkungan juga dapat meminimalisir kejadian bencana. Pemetaan dan pemantauan wilayah rawan

bencana, diarahkan pemantauan wilayah rawan bencana yang diakibatkan kondisi topografi dan geografis di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah serta hutan maupun lahan perkebunan, seperti bencana tanah longsor, kebakaran hutan dan banjir.

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergis dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus/tema pembangunan tiap tahap yang menjadi acuan penentuan prioritas pembangunan RKPD setiap tahunnya. Fokus/tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah setiap tahap dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4.1
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2023-2026

Sumber: RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026

Penjabaran tema/agenda pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 sesuai gambar di atas adalah sebagai berikut:

Tema Pembangunan Tahun 2024: Pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM. Fokus tema pembangunan di tahun 2024 adalah infrastrutur dan SDM, sehingga kalimat tema 2024 adalah Pemerataan kualitas infrastruktur pembangunan guna peningkatan mutu SDM. Pemerataan infrastruktur hingga ke desa tertinggal diperlukan sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

untuk menunjang perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas SDM. Pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui penyediaan akses dan infrastuktur terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi gender, etnis, dan agama dengan dilandasi penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM); meningkatkan kesadaran dan kualitas beragama dan toleransi antar umat beragama, serta kesadaran akan pluralisme.

4.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

4.3.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sesuai dengan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045, sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 merupakan tahapan pertama pada periode 2025 – 2029 dengan arahan Penguatan Fondasi Tranformasi.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan, terdiri atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu (iv) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda.

Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

1. Transformasi Sosial, dengan Arah Pembangunan:
   a. Kesehatan untuk Semua
   b. Pendidikan Berkualitas yang Merata
   c. Perlindungan Sosial yang Adaptif

2. Transformasi Ekonomi, dengan Arah Pembangunan:
    a. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
    b. Penerapan Ekonomi Hijau
    c. Transformasi Digital
    d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
    e. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola, dengan Arah Pembangunan: Regulasi dan Tata Kelolayang Berintegritas dan Adaptif
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, dengan Arah Pembangunan.
    a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan DemokrasiSubstansial
    b. Stabilitas Ekonomi Makro
    c. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
    a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
    b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
    c. Lingkungan Hidup Berkualitas
    d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
    e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 merupakan tahapan pertama pada periode 2025 – 2029 dengan arahan Penguatan Fondasi Tranformasi.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 merupakan periode kedua Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Meningkatnya Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan
    b. Meningkatnya Derajat Kesehatan
    c. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

a. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat
b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
c. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
d. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

3. Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
b. Meningkatnya Akses Hunian yang Layak
c. Meningkatnya Kierja Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan
d. Menurunnya Ketimpangan Pembangunan Wilayah
e. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif
a. Meningkatnya Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah
b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
c. Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
d. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
e. Meningkatnya Inovasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
f. Meningkatnya Penilaian Kualitas Pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tahun 2025, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi SumateraUtara pada RPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PDRB per Kapita (juta/tahun):74.01 – 74,02
2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%): 19,0 - 19,5
3. Tingkat Kemiskinan (%): 6,96 – 7,46
4. Rasio gini (Indeks): 0,303 – 0,305
5. Kontribusi PDRB Provinsi (%): 5,0 – 5,12
6. Indeks Modal Manusia: 0,54
7. Indonesia Blue Economy Index (IBEI): 58,77
8. Penurunan intensitas emisi GRK (%): 1
9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%): 41
10. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 5,2 – 5,4
11. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%): 27
12. Tingkat Pengangguran Terbuka (%): 5,2 – 5,5

13. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%): 58,8 – 52,8
14. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%): 2,3 – 2,5
15. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)* (Ribu orang) : 300.000 – 350.000
16. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%): 0,35 – 0,43
17. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi: 6
18. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB): 22,8 – 23
19. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (%): 11,26
20. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB): 29 – 27
21. Indeks Reformasi Hukum (IRH) (Kategori Baik): 70
22. Indeks Pelayanan Publik (IPP): 3,57
23. Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE): 3,45
24. Indeks Integritas Nasional: 66,78
25. Indeks Demokrasi Indonesia/Provinsi (Sedang): 82,58
26. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%): 1,2 -1,5
27. Tingkat Inflasi (%): 1,5 -3,75
28. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK): 55,83 – 65,83
29. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) : 0,41 – 0,39
30. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*: 850 -1050
31. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%) (Opsi lain Indeks Ketahanan Pangan): 7,35

Rencana Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026) pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuangkan ke dalam 4 (Empat) prioritas pembangunan dengan menargetkannya ke dalam bentuk 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kegiatan Strategis Daerah. Empat prioritas pembangunan dan Tiga Puluh Sembilan Kegiatan Strategis Daerah tersebut dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas. Perangkat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam kaitannya sebagai perwujudan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan tugas dan fungsi kinerja Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah, merupakan wujud dukungan terhadap Arah kebijakan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Major Project (MP), antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan melalui 12 (DuaBelas) Kegiatan Strategis Daerah, antara lain.
    a. Pembangunan Rehabilitasi, Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana danPrasarana Sekolah Menengah, Vokasi dan Khusus;

b. Implementasi *Teaching Factory Link and Match* Vokasi dan PenguatanPendidikan Universal berbasis kerja sama;

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak "EMAK" (Edukasi
Perempuan dan Anak);

d. Pembangunan TITIK BACA e- *Book Digital* dan Pengembangan *e-Library*
Sumut;

e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan serta pelayanan RSHaji Medan;

f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut);

g. Dukungan capaian *Universal Health Coverage (UHC)* pada Kabupaten/ Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;

h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);

i. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Bergerak, melalui.
   1) Pelayanan Kesehatan Mental Jiwa dan Mental Bergerak "Dr. Muhammad Ildrem Menyapa"
   2) Bus Kesehatan Bergerak

j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara dan Peningkatan Prestasi Olahraga SUMUT JUARA;

k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang damai dan berkeadilan serta Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental dan Nilai-nilai Demokrasi;

l. Optimalisasi dan Pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba).

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dilaksanakan melalui 11 (Sebelas) Kegiatan Strategis Daerah, antara lain.

   a. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin (MAPRO);

   b. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS-SDC);

   c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja dan Penguatan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melaluipelatihan tematik tenaga kerja serta pemagangan 1.000 tenaga kerja ke luar negeri;

d. Fasilitasi Standarisasi dan Peningkatan Pendapatan 1.000 (seribu)UMKM dan IKM melalui digitalitasi pemasaran;
e. Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani;
f. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM), Cetak Sawah Baru dan Peningkatan Mekanisme Pertanian;
g. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri serta Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Digitalisasi Promosi Pariwisata;
h. Pelaksanaan Event Internasional Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Calendar of Event;
i. Dukungan Pengembangan UNESCO Global Geopark Caldera Toba danDesa Wisata;
j. Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan RoadmapPengembangan Ekonomi Kreatif;
k. Penyelenggaraan North Sumatra Business Forum & Business Matchingdan Pameran Agro Industri Nasional.

3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutandilaksanakan melalui 12 (Dua Belas) Kegiatan Strategis Daerah, antara lain.
a. Penanganan Ruas Jalan dan Jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
b. Peningkatan Kualitas Sistem Jaringan Irigasi;
c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukaan;
d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan RegionalMedan – Deli Serdang;
e. Pembangunan Waduk/ Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
f. Pengembangan SPAM Mebidang (Medan – Binjai – Deli Serdang) danPembangunan SPAM Seriti (Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi);
g. Penataan Sungai Perkotaan yang Bersih dan Indah;
h. Penyediaan Sambungan Listrik bagi Keluarga Kurang Mampu;
i. Pembangunan PLTS Terpusat dalam rangka Peningkatan ProduktivitasPertanian dan Pariwisata;
j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah;
k. SUMUT TANGGUH BENCANA;
l. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui Gagasan “SUMUT HIJAU”.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatifdilaksanakan melalui 4 (Empat) Kegiatan Strategis Daerah, antara lain.
    a. Mempertahankan Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
    b. Peningkatan Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Utara melalui KlinikRB;
    c. Peningkatan Kualifikasi Pendidikan SDM Aparatur Negara/ASN melalui pemberian beasiswa S3 ASN (BEASISWA ASN PINTAR) dan Pelatihan ASNdidalam dan luar negeri;
    d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, melalui.
        1) *Planning and Innovation Corner* (PIC)
        2) *Event "North Sumatra Innovation and Achievement Summit*"

4.3.2 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pritoritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan potensi, kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori, kondisi umum daerah, dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka perlu ditetapkan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi, kebijakan nasional, provinsi yang bersifat mandatori, kondisi umum daerah, dan permasalahan aktual secara global, maupun nasional maka Tema Pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah pada RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah ***"PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN SERTA PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT".***

Perekonomian merupakan fokus pemerintah daerah dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah bergantung pada komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga dalam pemanfataannya memerhatikan aspek lingkungan. Tema pembangunan di tahun 2025 adalah Penguatan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan

pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.

Perekonomian mandiri bermakna bahwa kegiatan ekonomi berdasarkan swadaya yaitu masyarakat secara gotong-royong mengatur mekanisme sumber penghidupan. Tapanuli Tengah mampu mengelola ekonomi secara mandiri dengan mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada keunggulan sumber daya daerah dan daya dukung lingkungan; serta mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam mencapai tema tahun 2025, prioritas pembangunan Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut

1. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik**
2. **Pengembangan sektor andalan**
3. **Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (sdm)**
4. **Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi**
5. **Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat**

Rencana program Pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2025 dijabarkan dalam 5 program prioritas yakni Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pengembangan Sektor Andalan, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ekonomi, Serta Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat Tapanuli Tengah.

A. Peningkatan tata Kelola Pemerintahan

1. Program Reformasi birokrasi.

   Program ini diarahkan untuk merubah atau memperbaiki sistem, struktur dan proses dalam birokrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas layanan publik. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang bersih, kompeten dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

   a. Peningkatan profesionalitas ASN melalui pelatihan atau pengembangan kompetensi, pengembangan soft skills, program pendidikan lanjutan, peningkatan kesejahteraan serta penguatan budaya kerja ASN. indikator capaian kinerja yaitu peningkatan indeks profesionalitas ASN melalui persentase peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kinerja dan peningkatan penguasaan teknologi informasi ASN.
   b. Digitalisasi tata kelola keuangan daerah

      Program ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dengan sistem terintegrasi untuk mengelola seluruh aspek keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga pelaporan anggaran,

Penerapan *e-budgeting* mulai dari perencanaan anggaran, input usulan dari SKPD, verifikasi dan Validasi anggaran dilakukan secara online, Penerapan pembayaran dan penagihan secara elektronik (*e-Payment*) untuk semua transaksi keuangan daerah termasuk pemabayaran gaji ASN, pajak dan retribusi daerah, Penerapan portal pengadaan online, sistem evaluasi dan seleksi vendor secara elektronik (*e-Procurement*).

c. Pembenahan struktur organisasi birokrasi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas organisasi pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan hirarki, pengurangan tumpang tindih fungsi, peningkatan koordinasi antar unit serta mengurangi jabatan struktural.

d. Implementasi sistem meritrokasi untuk promosi dan mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek guna menentukan SDM yang tepat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi jabatan/pekerjaan yang akan dijalankan. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan kriteria, evaluasi kinerja berkala, transfaransi dan objektivitas.

e. Implementasi e-government

Program ini diarahkan kepada implementasi teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik, mengelola sumberdaya dan interaksi antar lembaga pemerintahan, swasta dan masayarakat dilaksanakan secara digital mulai dari pemberian informasi sampai kepada pelayanan publik.

2. Program Tata Kelola pemerintahan daerah (TKPD)

a. Pelatihan tata kelola pemerintahan

Program ini diarahkan pada pelatihan bagi pegawai pemerintahan daerah dalam hal etika pelayanan publik, integritas, dan tata kelola yang baik. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan integritas dan peningkatan kualitas layanan publik.

b. Sistem pelaporan elektronik

Program ini diarahkan pada pengembangan dan implementasi sistem pelaporan secara elektronik yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah infrastruktur, layanan publik dan administrasi pemerintahan secara online. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan transparansi kinerja pemerintahan, peningkatan responsif pemerintahan untuk merespon keluhan dan masukan masyarakat dan peningkatan kepuasan masyarakat.

c. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah

Program ini diarahkan pada pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan dan evaluasi (SIMPENDA) melalui pembangunan dan integrasi sistem informasi berbasis teknologi untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kinerja pemerintah daerah, peningkatan fungsi inspektorat, peningkatan kapasitas SDM bidang pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi publik serta evaluasi dan monitoring berbasis kinerja. Capaian indikator kinerja program yang akan dilaksanakan adalah efektivitas program, penguatan pengawasan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas ASN bidang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

FOKUS:

1. Reformasi birokrasi
    a) Peningkatan profesionalitas ASN
    b) Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
    c) Implementasi e-government
2. Tata Kelola pemerintahan daerah
    a) Pelatihan tata kelola pemerintahan
        - Pelayanan Publik (Perizinan, Pendidikan, Kesehatan, RSUD, PUSKESMAS, Pekerjaan Umum, Perkim, Penanggulangan Bencana, SATPOL PP, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
    b) Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah

B. Pengembangan sektor andalan

1. Program Pengembangan sektor perikanan dan kelautan

   Program ini diarahkan peningkatan kualitas SDM (nelayan) melalui pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengembangan teknologi perikanan dan kelautan melalui inovasi dan adopsi teknologi dalam penangkapan ikan, pengolahan serta pemasaran produk perikanan dan kelautan. Kemudian pembangunan atau pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, pasar ikan dan fasilitas penunjang lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas produk perikanan, peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan nelayan.
2. Program pengembangan kawasan tanaman pangan dan holtikultural

   Program ini diarahkan pada pengembangan daerah tertentu sebagai pusat produksi pangan dan kawasan hortikultura, peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan teknologi modren, kemitraan dan pembinaan petani, dan diversifikasi tanaman pangan. Capaian indikator kinerja adalah

penignkatan zona kawasan pangan dan hortikultural, peningkatan produktivitas dan kualitas, dan mengurangi ketergantungan pada jenis pangan tertentu.

3. Program Pengembangan sektor pertanian

   Program ini diarahkan pada pemetaan potensi lokal yang bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman yang cocok berdasarkan iklim, tanah dan faktor lokal lainnya, pembangunan infrastruktur pertanian yang berfokus pada peningkatan aksesbilitas (jalan, pasar dan transportasi), pembangunan atau pengembangan irigasi dan sistem pengairan, pelatihan dan penyuluhan, pemberian bantuan dan subsidi (subsidi pupuk, benih dan alat pertanian), dan pengembangan model pertanian berkelanjutan (penggunaan pupuk organik). Capaian indikator kinerja adalah peningkatan produksi pertanian, peningkatan pendapatan pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan aksesbilitas infrastruktur pertanian.

4. Program Pengembangan sektor peternakan

   Program ini diarahkan pada pelatihan dan penyuluhan peternakan, penggunaan pakan berkualitas, pengendalian penyakit dan kebersihan kandang, pengembangan pasar, diversifikasi produk ternak, dan subsidi pakan serta bibit ternak. Capaian indikator kinerja adalah tingkat pertumbuhan populasi ternak, produktivitas ternak, peningkatan kualitas produk ternak, dan peningkatan kesejahteraan peternak.

5. Program Pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan ekowisata

   Program ini diarahkan pada identifikasi potensi pariwisata dan ekowisata, pengembangan infrastruktur kawasan (jalan, transportsi umum, dan fasilitas pendukung), pengembangan produk wisata, promosi dan pemasaran (promosi online, offline, event budaya, festival), dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan kapasitas. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan PAD, peningkatan partisipatif masyarakat, peningkatan infrastriktur dan fasilitas, dan pengembangan produk wisata.

6. Program Pembentukan dan pengembangan koperasi

   Program ini diarahkan pada pendampingan pembentukan koperasi, pelatihan manajemen koperasi, penyediaan pinjaman dengan bunga rendah bagi anggota koperasi untuk pengadaan sarana produksi, dan penyediaan sarana produksi. Capaian indikator kinerja memper mudah akses permodalan bagi industri skala kecil, peningkatan produksi petani dan nelayan, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, dan peningkatan lapangan kerja.

7. Program kemitraan dan kolaborasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.

   Program ini diarahkan pada pengembangan model kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan, akademisi dan kelompok petani, peternak, nelayan untuk mengembangkan model pertanian, peternakan dan perikanan terintegrasi, pelatihan dan bimbingan teknis dalam penggunaan teknologi, manajemen dan teknis operasional, akses pasar dan akses pembiayaan. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan produktivitas, peningkatan mitra, peningkatan implementasi teknologi, dan kesejahteraan petani, peternak serta nelayan.

8. Program Kemudahan berinvestasi dan berusaha

   Program ini diarahkan pada implementasi perizinan terintegrasi secara online, penyederhanaan perizinan dan waktu pengurusan izin, peningkatan infrastruktur jalan, industri, transportasi dan logistik, peningkatan kualitas pelayanan publik serta deregulasi dan reformasi kebijakan. Indikator capaian kinerja adalah peningkatan jumlah investasi, penurunan waktu pembuatan izin, penurunan jumlah izin, peningkatan kepuasan terhadap layanan perizinan dan investasi, mempercepat waktu respon dan penyelesaian permohonan izin, dan peningkatan PAD.

9. Program Pengembangan UMKM dan IKM

   Program ini diarahkan pada pelatihan teknis produksi dan kualitas produk, pelatihan manajemen bisnis dan pemasaran, pemberian bantuan modal awal, fasilitas akses ke modal melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, penyediaan platform pemasaran online dan offline, pendampingan berkelanjutan, monitoring dan evaluasi, penyediaan forum komunikasi dan jaringan antar pelaku industri. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan jumlah industri, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, peningkatan penjualan produk, kemudahan akses pembiayaan, dan peningkatan lapangan kerja.

10. Program peningkatan akses pelayanan perbankan.

    Program ini diarahkan pada pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung layanan perbankan digital di daerah terpencil, kemitraan dengan agen layanan keuangan digital, dan menyediakan produk perbankan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian indikator kinerja adalah memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses ke perbankan, dan meningkatkan kualitas layanan perbankan di daerah terpencil.

11. Program Pelatihan diversifikasi hasil pertanian dan perikanan

Program ini diarahkan pada pelatihan diversifikasi hasil pertanian dan perikanan, penyediaan sarana dan prasarana (benih unggul, varietas baru, bantuan peralatan), pembentukan dan penguatan kelompok tani dan nelayan, dan pembuatan branding dan packaging produk. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan produksi, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, peningkatan kualitas produk, peningkatan lapangan kerja, penguatan kelembagaan, dan penurunan ketergantungan pada satu jenis komoditas.

12. Program pembentukan Kelembagaan Offtaker

    Program ini diarahkan untuk menjalin kerjasama ataupun pembentukan kelembagaan baru untuk mendukung berbagai sektor seperti pertanian, perikanan dan UMKM. Tujuan utama lembaga offtaker adalah untuk menjamin pasar bagi produk yang dihasilkan oleh produsen. Contoh lembaga offtaker yang dapta dilakukan kerja sama guna mendukung ekonomi antar sektor di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Perum Bulog (bidang pertanian), Perusahaan Perdagangan Indonesia (Pertanian dan industri), PT Garam (petani garam), PT Perindo (Perikanan tangkap), Koperasi Unit Desa (Pertanian dan perkebunan), PT Pupuk Indonesia (mendukung produktivitas petani). Capaian indikator kinerja adalah stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan baku.

FOKUS:

1. Pengembangan sektor pertanian
2. Pengembangan sektor perikanan dan kelautan
3. Pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan ekowisata
4. kemitraan dan kolaborasi bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan
5. Kemudahan berinvestasi dan berusaha
6. Pengembangan UMKM dan IKM
7. peningkatan akses pelayanan perbankan
8. Pelatihan diversifikasi hasil pertanian dan perikanan
9. pembentukan Kelembagaan Offtaker

C. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

1. Program peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan

   Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan dan akses internet), peningkatan

penggunaan teknologi dalam pendidikan, bantuan pendidikan (beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan subsidi), pendidikan inklusif (pendidikan kebutuhan khusus), pendidikan di daerah terpencil, dan pengembangan pendidikan vokasi. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan angka partisipasi sekolah (APS), tingkat kelulusan dan angka melanjutkan pendidikan, peningkatan hasil ujian dan tes standart, tingkat kepuasan siswa, guru dan orang tua terhadap layanan pendidikan, pengurangan disparitas pendidikan diperkotaan dan perdesaan.

2. Program Peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan berbasis IT

   Program ini diarahkan pada implementasi infrastruktur digital sekolah termasuk jaringan internet, Hardware dan Software, pengembangan platform e-learning untuk mendukung proses pembelajaran daring, pelatihan guru dan staf sekolah untuk meningkatkan kompetensi penggunaan teknologi digital, peningkatan akses dan konektivitas untuk daerah terpencil (internet dan perangkat internet), dan literasi masyarakat. Capaian indikator kinerja adalah peningkatan aksesbilitas pendidikan berbasis IT, peningkatan kualitas pembelajaran, inklusivitas pendidikan daerah terpencil.

3. Program peningkatan kualitas dan aksesbilitas pelayanan kesehatan

   Program ini diarahkan pada pemberian akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas (JKN, BPJS, JAMKESMAS, dll), peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas untuk memenuhi standart pelayanan yang ditetapkan, peningkatan kualitas layanan kesehatan tingkat primer (puskesmas dan klinik), pelayanan kesehatan bergerak (mobile health unit) untuk menjangkau daerah terpencil, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti peningkatan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan dan insentif untuk penempatan di daerah terpencil, dan digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine, rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan). Capaian indikator kinerja adalah penurunan prevalensi stunting, peningkatan utilitas layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan akses layanan, penurunan prevalensi penyakit, penurunan gap kesehatan, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan, dan peningkatan distribusi tenaga medis.

4. Program Aktivasi aktivitas posyandu

   Program ini diarahkan pada pemeriksaan kesehatan (ibu hamil, bayi dan balita), pemberian imunisasi, penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan (PMT), monitoring dan evaluasi kesehatan masyarakat. Capaian indikator kinerja

peningkatan peserta aktif posyandu, peningkatan cakupan imunisasi, penurunan stanting, dan peningkatan ketersedian PMT,

5. Program peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja

   Program ini diarahkan pada peningkatan keterampilan teknis di berbagai bidang (teknologi informasi, manufaktur dan konstruksi), pengembangan soft skills, pengembangan kewirausahaan, program magang dan penempatan kerja, dan pembinaan serta mentoring. Capaian indikator kinerja pengembangan keterampilan tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja.

FOKUS:

1. Peningkatan Indeks Pendidikan
2. Indeks Kesehatan
3. Penurunan prevalensi stunting
4. peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja
5. Perluasan upaya promotif dan preventif dan pembudayaan perilaku hidup
6. sehat.
7. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (Prioritas AIDS, TB dan Malaria).
8. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan.
9. Peningkatan Indeks Kesehatan
10. Penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
11. Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja

D. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi

1. Program pembangunan aksebilitas ekonomi.

   Program ini diarahkan pada meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah melalui perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan, memperluas jaringan transportasi publik, menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanitasi, pembangunan pasar tradisional dan modren, meningkatkan akses dan kualitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekonomi digital, dan pembangunan infrastruktur energi yang cukup dan berkelanjutan melalui pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi.

FOKUS:

1. Meningkatkan aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah
2. menyediakan akses air bersih dan sanitasi
3. pembangunan pasar tradisional dan modern
4. meningkatkan akses dan kualitas teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ekonomi digital

5. pembangunan infrastruktur energi melalui pembangunan pembangkit listrik dan jaringan distribusi

E. Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat

1. Penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim

   Program ini diarahkan pada peningkatan keterampilan masyarakat, pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), bantuan modal usaha, perbaikan infrastruktur dasar, perbaikan tempat hunian (rumah), penguatan jaring pengaman sosial, dan peningktan partisipasi masyarakat. Capaian indikator kinerja adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi, dan peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

2. Penanggulangan banjir

   Program ini diarahkan pada normalisasi dan naturalisasi sungai, pembangunan dan peningktan infrastruktur pengendali banjir (bendungan, waduk, kanal dan tanggul), penanaman pohon dan reboisasi hutan, penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat, dan pembangunan sistem drainase. Capaian indikator kinerja adalah penurunan area yang terdampak banjir, penurunan frekuensi dan durasi banjir, penurunan tingkat erosi tanah, dan peningkatan persentase area resapan air yang dilindungi dan di pertahankan, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang langkah-langkah kesiapsiagaan dan evakuasi saat banjir.

3. program Kerentanan bencana alam

   Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapai bencana melalui pelatihan, penyusunan rencana tanggap darurat dan penguatan lembaga kemasyarakatan, meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah terhadap bencana, peningkatan sistem peringatan dini bencana, membangun dan memperkuat infrastruktur publik yang tahan terhadap bencana gempa bumi, banjir dan longsor, dan mengidentifikasi dan memetakan daerah rawan bencana untuk perencanaan pembangunan lebih aman. Capaian indikator kinerja adalah mitigasi resiko bencana, penurunan angka korban dan kerugian akibat bencana, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bencana alam, dan peningkatan peringatan dini bencana.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat lokal.

   Program ini diarahkan pada pelatihan keterampilan sesuai potensi lokal, pemberian modal kepada individu atau kelompok, pembangunan infrastruktur lokal, pendampingan dan konseling masyarakat lokal, pengembangan potensi lokal dalam bidang pariwisata, kebudayaan dan sumberdaya alam. Capaian

indikator kinerja adalah peningkatan pendapatan masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan dan keberlanjutan usaha lokal, peningkatan aksesbilitas, peningkatan kunjungan wisatawan, industri kreatif atau pariwisata, dan peningkatan pelestarian budaya lokal.

FOKUS:

1. Penghapusan kemiskinan ekstrim
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
   b. Peningkatan pendapatan masyarakat
   c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan
2. Penanggulangan kemiskinan
   a. Pemberdayaan Masyarakat lokal

4.3.3 Program Prioritas Daerah

Program prioritas daerah merupakan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Dalam perumusan dokumen perencanaan, program dianggap menjadi cikal bakal keberhasilan tujuan dan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Program prioritas yang tercantum dalam tabel di bawah ini merupakan program yang sudah disesuaikan dengan nomenklatur di Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode. Program Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah secara terpisah terdapat pada Tabel dibawah ini

Tabel 4.4

Program Prioritas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governa	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Batas Wilayah Daerah yang Diselesaikan	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kegiatan dalam rangka Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
nce)					Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan	
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya pengawasan secara internal dan external	INSPEKTORAT
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terlaksananya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN , PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya	Indeks Perseps	PROGRAM PENINGKATAN	Terlaksananya Program Peningkatan	SATUAN POLISI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
		kualitas pelayanan publik berbasis IT	i Kualitas Pelayanan Publik	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Umum	PAMONG PRAJA
				PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN	Mendukung Kelancaran Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Data Base Kependudukan	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan e - Government di lingkup Pemerintah Daerah	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip/Dokumen yang diduplikasikan secara digital	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
					Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	KECAMATAN
					Mendukung Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	
Meningkatkan kompete	Indeks Pembangunan	Meningkatnya derajat	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Persentase Sarana Kesehatan Dasar yang Memenuhi	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
nsi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah	Manusia	kesehatan masyarakat		KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Standard	
					Terlaksananya Sistem Pelaporan	
					Usia Harapan Hidup	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yaitu Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter (MoU)	DINAS KESEHATAN
					Tersedianya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Penyediaan Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Pegawai Non PNS)	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tersedianya Pengawas dan Penyuluh Keamanan Pangan yang Berserti?kat	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAA	Cakupan Desa Siaga Aktif	DINAS KESEHATAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				N MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
		Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APK SD	DINAS PENDIDIKAN
					Meningkatnya APK SMP	
					Meningkatkan APK PAUD	
					Angka Buta Aksara usia diatas 15 tahun	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kompetensi tenaga Pendidik	DINAS PENDIDIKAN
				PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		DINAS PENDIDIKAN
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan dan pengembangan minat baca tulis	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	DINAS KETAHANAN PANGAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Meningkatnya Promosi Kesehatan Tentang Tumbuh Kembang Balita,	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Reproduksi Remaja, dan Kesehatan Lansia serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	DAN K E L U A R G A BERENCANA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan wirausahaan	DINASKEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
					Jumlah peserta mengikuti penyuluhan	
			PDRB per Kapita	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlakananya Kegiatan Dak Non Fisik Pendampingan dan koordinator Perkoperasian dan Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Terselenggaranya Pemuktahiran Data UMKM dan Penyusunan Data Base Koperasi berbasis Operasioanal Data System (ODS)	
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Tersedianya Sistem dan Jaringan Informasi Harga Bahan Pangan Strategis	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PENTING		
		Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tersedianya Tenaga Kerja Yang Terampil	DINAS KETENAGAKERJAAN
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Partisipasi Angkatan Kerja	DINAS KETENAGAKERJAAN
					Rancangan Perda Retribusi TKA	
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terlaksananya tata kelola kelembagaan dan kerjasama Hubungan Industrial	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS yang Mendapat Bantuan	DINAS SOSIAL
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang mendapat bantuan	DINAS SOSIAL
					Terwujudnya Pengembalian Jati Diri Penyandang Eks Penyakit Sosial Sehingga Dapat Hidup Layak di Tengah Masyarakat	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah masyarakat miskin	DINAS SOSIAL
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi Ikan Penduduk	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan hasil Produksi Pertanian yang mendukung Ketahanan Pangan Nasional	DINAS PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	jumlah produksi tanaman pangan,holtikultura dan perkebunan	DINAS PERTANIAN
					Jumlah kelompok tani yang menggunakan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
			LPE kategori industri pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi RPIK Kabupaten Tapanuli Tengah	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah dan ekonomi kreatif	LPE Sektor Pariwisata	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan situs cagar budaya kabupaten Tapanuli Tengah	DINAS PENDIDIKAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Julah Usaha dan Jasa Pariwisata	DINAS PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisata	DINAS PARIWISATA
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kerjasama dibidang pariwisata	DINAS PARIWISATA
			LPE Subsektor Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tercapainya Fasilitasi Promosi Hasil Produksi UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
			Kreatif	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Aduan Perizinan yang ditindaklanjuti	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kajian/Desain	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM KAWASAN	Luas Kawasan Kumuh	DINAS PERUMAHA
					Jumlah Rumah	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PERMUKIMAN		N DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Rumah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Kasiba/ Lisiba	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Penyelesaian Kasus Tanah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Jenis Pelayanan Angkutan	D I N A S PERHUBUNGAN
					Rasio Kondisi Prasarana Perhubungan	
					Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Membangun Keterbukaan Publik	DINAS KOMUNIKASI DAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PUBLIK		INFORMATIKA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen RPPLH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terkendali dan Teratasinya Kerusakan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terpilihnya Personal/Kelompok/ Sekolah Usaha untuk mendapat penghargaan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Layanan Angkutan Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Terlaksananya Program Penanggulangan Kebakaran	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Persentase Pelayanan Bencana Kebakaran	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	NAMA OPD
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Simulasi evakuasi bencana	B A D A N PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana	
					Gladi Posko dan Gladi Lapangan	

4.3.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Tabel 4.5

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	• Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan • Peningkatan Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan iklim investasi yang kondusif
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah	Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024
	Berkualitas dan Berdaya Saing		
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah	Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Layanan Infrastruktur yang Berkelanjutan dalam Penguatan Konektivitas dan Daya Saing Produktivitas Wilayah	Perwujudan ketersediaan infrastruktur yang baik Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan Inovatif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing

Sumber: Bappeda Kab. Tapanuli Tengah, 2023 (diolah)

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah di atas sangat penting untuk keselarasan pembangunan sehingga pembangunan lebih fokus.

Lebih lanjut Prioritas Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang telah disepakati harus didukung oleh Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang relevan dan mendukung target indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan pada setiap prioritas menggambarkan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026.

4.3.5. Perencanaan Tematik

Perencanaan tematik adalah pendekatan strategis yang dirancang untuk menangani masalah-masalah besar dan kompleks dengan cara yang terkoordinasi dan

terintegrasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perencanaan tematik berfokus pada area-area kritis yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta kestabilan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini melibatkan identifikasi isu-isu utama, penetapan tujuan yang jelas, dan penyusunan strategi serta kebijakan yang berfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.

1. Penurunan Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah kompleks yang mempengaruhi kualitas hidup jutaan orang di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya berkisar pada pendapatan yang rendah tetapi juga mencakup akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Untuk mengatasi kemiskinan secara efektif, perlu ada pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang mendasari kemiskinan, kita dapat menciptakan strategi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan.

a. Strategi dan Pendekatan:

1) Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan:

- Program Pendidikan: Investasi dalam pendidikan dasar dan menengah sangat penting. Pendidikan yang berkualitas dapat memberikan peluang lebih baik bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan keluar dari kemiskinan.
- Pelatihan Keterampilan: Program pelatihan keterampilan dan kursus vokasional dapat meningkatkan kemampuan kerja masyarakat. Pelatihan ini sering kali mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan.

2) Program Bantuan Sosial:
   - Bantuan Langsung Tunai (BLT): Program ini memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga miskin. BLT dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan.
   - Program Subsidi: Subsidi untuk kebutuhan pokok seperti pangan, energi, dan transportasi dapat mengurangi beban hidup masyarakat miskin.
3) Pembangunan Ekonomi Lokal:
   - Pemberdayaan UMKM: Dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses ke modal, pelatihan, dan pasar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
   - Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi dalam sektor-sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja seperti infrastruktur, pariwisata, dan industri kreatif.

b. Implementasi:
1) Penyuluhan dan Edukasi: Mengedukasi masyarakat tentang program yang tersedia dan bagaimana cara memanfaatkannya.
2) Monitoring dan Evaluasi: Mengawasi efektivitas program-program tersebut untuk memastikan mereka mencapai sasaran dan memberikan hasil yang diharapkan.

2. Penurunan Stunting

Stunting adalah masalah kesehatan yang serius yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi yang kronis selama masa awal kehidupan dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang dan menghambat kemampuan anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Masalah ini sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola makan yang tidak memadai, akses yang terbatas ke layanan kesehatan, dan sanitasi yang buruk. Untuk menangani stunting secara efektif, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berfokus pada perbaikan gizi, perawatan kesehatan, dan kondisi sanitasi.

a. Strategi dan Pendekatan:
1) Perbaikan Nutrisi:
   - Pemberian Makanan Bergizi: Program pemberian makanan tambahan, seperti suplementasi vitamin dan mineral, kepada ibu hamil dan anak-anak.
   - Penyuluhan Gizi: Edukasi tentang pola makan sehat dan pentingnya asupan gizi yang memadai, terutama selama masa kehamilan dan masa bayi.
2) Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan:
   - Perawatan Ibu dan Anak: Program yang menyediakan perawatan antenatal dan postnatal untuk ibu hamil dan bayi baru lahir.

- Imunisasi: Program imunisasi untuk melindungi anak-anak dari penyakit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka.

3) Kebersihan dan Sanitasi:
   - Akses ke Sanitasi yang Baik: Meningkatkan akses ke fasilitas sanitasi dan air bersih untuk mengurangi risiko infeksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan.

b. Implementasi:

1) Program Kesehatan Terpadu:** Menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi untuk ibu dan anak.
2) Kolaborasi Multisektoral:** Melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pertanian untuk menangani berbagai aspek stunting secara bersamaan.

3. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Penggunaan produk dalam negeri adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Masyarakat yang lebih memilih produk lokal dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ekonomi domestik. Namun, peningkatan penggunaan produk dalam negeri memerlukan lebih dari sekedar promosi. Diperlukan kebijakan yang mendukung, insentif untuk produsen lokal, dan edukasi kepada konsumen tentang manfaat membeli produk lokal. Ini juga melibatkan pengembangan industri lokal untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas dan kompetitif.

a. Strategi dan Pendekatan:

1) Promosi Produk Lokal:
   - Kampanye Konsumsi: Melakukan kampanye untuk mendorong masyarakat agar lebih memilih produk lokal daripada impor.
   - Pameran dan Festival: Menyelenggarakan pameran atau festival yang menampilkan produk-produk lokal.
2) Kebijakan Pemerintah:
   - Pengadaan Barang dan Jasa: Kebijakan pemerintah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
   - Insentif untuk Industri Lokal: Memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau subsidi bagi industri lokal.
3) Dukungan UMKM:
   - Akses ke Pasar: Memfasilitasi UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional.
   - Peningkatan Kualitas: Program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif.

b. Implementasi:

1) Regulasi dan Insentif: Menerapkan regulasi yang mendukung dan memberikan insentif bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku lokal.
2) Evaluasi Pasar: Menilai dan memantau efek kebijakan tersebut terhadap ekonomi lokal dan industri dalam negeri.

4. Peningkatan Investasi

Investasi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk meningkatkan investasi, penting untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor dengan menawarkan kepastian hukum, kemudahan berbisnis, dan insentif yang relevan. Mengembangkan infrastruktur yang memadai juga sangat penting, karena hal ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperlancar kegiatan bisnis. Selain itu, promosi dan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dapat memperluas jangkauan dan dampak investasi.

a. Strategi dan Pendekatan:

1) Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif:
   - Kemudahan Berbisnis: Menyederhanakan prosedur perizinan dan administrasi untuk memudahkan investor.
   - Kepastian Hukum: Menyediakan kepastian hukum untuk melindungi hak-hak investor.
2) Infrastruktur dan Akses:
   - Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan bisnis.
   - Akses ke Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan bagi investor dan pengusaha.
3) Promosi dan Kemitraan:
   - Promosi Pasar: Mengadakan promosi dan roadshow investasi untuk menarik investor asing.
   - Kemitraan Publik-Swasta: Membentuk kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk proyek-proyek besar.

b. Implementasi:

1) Kebijakan Pro-Investasi: Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung investasi dan menghilangkan hambatan.
2) Penyuluhan dan Dukungan: Memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan bagi investor untuk memulai dan mengelola investasi mereka.

5. Pengendalian Inflasi

Inflasi yang tinggi dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan merugikan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi adalah prioritas penting dalam kebijakan ekonomi. Inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, pengelolaan pasokan barang dan jasa, serta kebijakan fiskal. Mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk mengatasi penyebab inflasi dan menjaga kestabilan harga merupakan langkah krusial untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

a. Strategi dan Pendekatan:
   1) Kebijakan Moneter:
      - Pengaturan Suku Bunga: Mengatur suku bunga oleh bank sentral untuk mengontrol inflasi.
      - Pengendalian Jumlah Uang Beredar: Menggunakan instrumen moneter untuk mengontrol jumlah uang yang beredar di ekonomi.
   2) Pengelolaan Pasokan Barang dan Jasa:
      - Stabilisasi Harga: Mengontrol harga barang pokok dan memastikan pasokan yang stabil.
      - Intervensi Pasar: Intervensi pemerintah dalam pasar untuk mencegah lonjakan harga yang tiba-tiba.
   3) Kebijakan Fiskal:
      - Pengendalian Defisit: Mengelola defisit anggaran pemerintah agar tidak mempengaruhi inflasi.
      - Pengelolaan Subsidi: Meninjau dan mengelola subsidi untuk menghindari distorsi harga.

b. Implementasi:
   1) Koordinasi Kebijakan: Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk mencapai tujuan pengendalian inflasi.
   2) Monitoring dan Analisis: Memantau indikator ekonomi secara rutin untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan.

6. SDGs (Sustainable Development Goals)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah agenda global yang dirancang untuk menangani tantangan besar dunia dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. SDGs mencakup berbagai isu mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perubahan iklim, dengan fokus pada pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif.

a. Strategi dan Pendekatan:

1) Integrasi dalam Kebijakan:

- Perencanaan Strategis: Memasukkan SDGs dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan nasional.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mengkoordinasikan berbagai sektor untuk mencapai tujuan SDGs secara bersamaan.

2) Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan:

- Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.
- Kemitraan Global: Bekerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain untuk mencapai SDGs.

3) Pemantauan dan Pelaporan:

- Indikator Kinerja: Menggunakan indikator untuk mengukur kemajuan dan pencapaian SDGs.
- Pelaporan Transparan: Melaporkan hasil dan kemajuan secara transparan kepada publik dan komunitas internasional.

b. Implementasi:

1) Kebijakan Inklusif: Membuat kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs dan mengatasi ketimpangan.
2) Evaluasi dan Penyesuaian: Menilai dan menyesuaikan strategi berdasarkan evaluasi kemajuan untuk memastikan pencapaian tujuan.

Tabel 4.6

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
1.	**Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif (4)** Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; Keberlanjutan tata kelola keuangan dan barang milik daerah, peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (1)** peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (1)** Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; Digitalisasi tata Kelola keuangan daerah , Peningkatan profesionalitas ASN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik **Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (3)** Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
		kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing.	pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pendidikan dan kesehatan dan Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi bagi umkm
2.	**Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif (2)** mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. **Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3)** Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah tertinggal di Provinsi	**Pengembangan Sektor Andalan (2)** Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan Kelautan, pariwisata dan ekowisata, Pengembangan infrastruktur pendukung sektor agro-maritim (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Irigasi), Pembentukan dan pengembangan Kopereasi, Membangun kemitraan dan kolaborasi antar pemerintahan,

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
		Sumatera Utara	lembaga riset, universitas dan lembaga swasta untuk bersinergi dalam pengembangan sektor andalan , Peningkatan akses pelayanan keuangan Perbankan , Pelatihan pengolahan atau diversifikasi hasil pertanian dan perikanan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan agar mampu bersaing dari sisi pemasaran **Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ekonomi (4)** **(Indikator:** Indeks Infrastruktur) Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Peningkatan Akses Air bersih dan Sanitasi, Pembangunan Listrik, Pembangunan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
			jaringan telokomunikasi (Pembangunan Jaringan Internet pada kawasan produktif dan kawasan blankspot)
3.	**Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3)** Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat khususnya di daerah-daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Utara **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif (2)** mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata.	**Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ekonomi (4)** Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Jalan, Jembatan, Peningkatan Akses Air bersih dan Sanitasi, Pembangunan Listrik, Pembangunan jaringan telokomunikasi (Pembangunan Jaringan Internet pada kawasan produktif dan kawasan blankspot) **Pengembangan Sektor Andalan (2)** Pengembangan sektor pertanian, perikanan

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
			dan Kelautan, pariwisata dan ekowisata, Pengembangan infrastruktur pendukung sektor agro-maritim (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Irigasi), Pembentukan dan pengembangan Kopereasi, Membangun kemitraan dan kolaborasi antar pemerintahan, lembaga riset, universitas dan lembaga swasta untuk bersinergi dalam pengembangan sektor andalan , Peningkatan akses pelayanan keuangan Perbankan , Pelatihan pengolahan atau diversifikasi hasil pertanian dan perikanan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan agar mampu bersaing dari sisi pemasaran

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
4	**Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (1)** peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak. Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing.	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (3)** Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pendidikan dan kesehatan dan Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi bagi umkm
5	**Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif (2)** mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata.	**Pengembangan Sektor Andalan (2)** **(Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi;** LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan Kelautan, pariwisata dan ekowisata,

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
			Pengembangan infrastruktur pendukung sektor agro-maritim (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Irigasi), Pembentukan dan pengembangan Kopereasi, Membangun kemitraan dan kolaborasi antar pemerintahan, lembaga riset, universitas dan lembaga swasta untuk bersinergi dalam pengembangan sektor andalan , Peningkatan akses pelayanan keuangan Perbankan , Pelatihan pengolahan atau diversifikasi hasil pertanian dan perikanan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan agar mampu bersaing dari sisi pemasaran
6	**Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inkslusif (2)** mengelola sumber daya yang ada secara optimal, baik dari sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata.	**Pengembangan Sektor Andalan (2)** Pengembangan sektor pertanian, perikanan dan Kelautan, pariwisata dan ekowisata,

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
			Pengembangan infrastruktur pendukung sektor agro-maritim (Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Irigasi), Pembentukan dan pengembangan Kopereasi, Membangun kemitraan dan kolaborasi antar pemerintahan, lembaga riset, universitas dan lembaga swasta untuk bersinergi dalam pengembangan sektor andalan , Peningkatan akses pelayanan keuangan Perbankan , Pelatihan pengolahan atau diversifikasi hasil pertanian dan perikanan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan agar mampu bersaing dari sisi pemasaran **Peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat (5)**

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
			penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, Penanggulangan banjir
7	**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas Dan Inovatif (4)** Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; Keberlanjutan tata kelola keuangan dan barang milik daerah, peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah	**Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (1)** Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; Digitalisasi tata Kelola keuangan daerah , Peningkatan profesionalitas ASN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
8	**Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur**	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (1)** peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan Pembangunan Gender dan Perlindungan Anak.	**Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia (3)** Peningkatan kualitas dan aksesbilitas layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Tapanuli Tengah
		Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan yang berkeadilan, agar dapat tercipta sumber daya manusia di Provinsi Sumatera Utara yang berkompeten dan berdaya saing.	meningkatkan kualitas SDM, Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pendidikan dan kesehatan dan Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja, khususnya dalam teknologi informasi bagi umkm

4.3.5 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Tapanuli Tengah

Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, maka wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Nasional, serta mencakup arahan mengenai Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Kawasan strategis Provinsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu kawasan strategis Labuhan Angin–Sibolga;
2. Kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas:
   a. Kawasan strategis ekonomi;
   b. Kawasan strategis Sosial dan Budaya; dan
   c. Kawasan strategis lingkungan.

A. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi:

NO	KAWASAN STRATEGIS EKONOMI	TIPOLOGI	LOKASI
1	KSK Labuhan Angin	- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh - Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas - Kawasan Industri	Kecamatan Tapian Nauli
2	KSK Minapolitan	- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh - Kawasan perikanan	Kecamatan Sarudik Kecamatan Tapian Nauli Kecamatan Sorkam Barat Kecamatan Barus
3	KSK Agropolitan	- Potensi ekonomi yang cepat tumbuh - Kawasan pertanian	Kecamatan Manduamas Kecamatan Kolang Kecamatan Badiri Kecamatan Sibabangun

B. Kawasan Strategis Sosial dan Budaya meliputi:

Kawasan Strategis Sosial dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Cagar Budaya Barus di Kecamatan Barus dan Barus Utara. KSK ini merupakan kawasan konservasi warisan budaya di Kabupaten Tapanuli Tangah

C. Kawasan Strategis Lingkungan meliputi

Kawasan Strategis Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah KSK Mursala di Kecamatan Tapian Nauli. ini merupakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten KSK Tapanuli Tengah

Gambar 4.2

Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Tengah

4.3.6 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD serta diselaraskan dengan ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Berikut pemetaan hasil Musrenbang Kecamatan dan hasil POKIR DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah disesuaikan dengan tema prioritas serta kemampuan anggaran daerah.

1. **Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.**

   a. Jika melihat hasil dari Musrenbang Kecamatan dan Pokir DPRD, tidak ada kebutuhan dan permintaan atau usulan signifikan yang berkaitan dengan prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi tetap harus dibuatkan usulan terkait dengan prioritas pertama ini dalam rangka meningkatan tata kelola pemeritahan yang baik. Jika dihubungkan dengan kemampuan pagu anggaran belanja OPD Tapanuli Tengah tahun 2025, maka secara sederhana yang harus diprioritaskan untuk dilakukan pada tahun 2025 terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik antara lain, yakni :

   - Peningkatkan kualitas dan kinerja ASN Daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat
   - Penataan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan harus tergitalisasi
   - Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk pengelolaan data dan informasi dalam rangka peningkatan keterbukaan informasi publik
   - Mutasi dan promosi jabatan ASN berdasarkan prestasi, dan kredit poin yang baik serta latar belakang pendidikan yang sesuai

   b. Berdasarkan kebutuhan saat ini terkait dengan prioritas peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dibutuhkan kefokusan dan keseriusan dalam merealisasikannya : Pelayanan Publik terkait perizinan, peningkatan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD, PUSKESMAS, kemudian pada Dinas KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL perlu peningkatan sistem yang baik di berbagai kecamatan agar lebih mempermudah proses pengurusan administrasi kependudukan.

2. **Pengembangan Sektor Andalan**

   Prioritas ini perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga akan tercipta kesejahteraan. Hal penting yang harus dilakukan saat ini, antara lain :

   - Pengembangan sektor perikanan tangkap
   - Penentuan dan pengembangan kawasan tanaman pangan dan holtikultura per Kecamatan dalam rangka mendorong swasembada pangan yang mandiri
   - Pengembangan infrastruktur pendukung sektor agro-maritim (contoh : pembangunan dan peningkatan rehabilitasi irigasi)
   - Pengembangan kawasan unggulan pariwisata dan ekowisata (pembangunan penunjang akses wisata)

- Pelatihan dan pembinaan secara serius untuk pengelola wisata (penciptaan aplikasi wisata, penentuan biaya masuk lokasi wisata, biaya parkir turis, hingga diversifikasi kuliner khas lokal)
- Pembentukan dan pengembangan koperasi simpan pinjam dengan pengelolaan yang profesional dan dilakukan pembinaan serius oleh Pemerintah Daerah

3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Prioritas ini jika disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan hal yang cepat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, antara lain yakni :

- Merealisasikan beasiswa bagi putra-putri daerah untuk berkuliah di perguruan tinggi lokal (pemberian beasiswa harus adil berdasarkan kemampuan keuangan keluarga dan keluarga)
- Peningkatan kualitas dan aksesbilitas kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang kesehatan (alat kesehatan yang memadai)
- Peningkatan dan pembinaan secara serius oleh Pemerintah Daerah dalam tujuan untuk menambah keterampilan dan keahlian bagi masyarakat yang masuk kategori angkatan kerja (sektor UMKM adalah salah satu andalan yang cepat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat)

4. **Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Ekonomi** Indeks pembangunan infrastruktur yang baik akan mampu menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang dapat dilakukan segera jika acuannya adalah tema dan kemampuan anggaran daerah adalah :

- Pembangunan infrastruktur yang tetap menjaga kelestarian ekologi
- Pembangunan dan rehab akses jalan yang baik menuju kawasan wisata
- Peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang baik
- Peningkatan jaringan telekomunikasi khususnya pada kawasan wisata yang menjadi prioritas daerah
- Pembangunan kantor kelurahan/desa permanen (yang belum ada)
- Pembangunan dan peningkatan fasilitas penunjang di lokasi wisata

5. **Peningkatan Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat**

Kualitas dan taraf hidup masyarakat adalah sebuah keharusan yang harus diciptakan. Kualitas dan taraf hidup berhubungan dengan kesehatan (gizi), kemampuan daya beli/kondisi ekonomi masyarakat, penanggulangan bencana yang disebabkan manusia (banjir), hingga peningkatan per kapita daerah.

Prioritas peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dalam rangka mensukseskan tema RPKD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 sebaiknya yang harus dilakukan segera adalah :

- Penghapusan kemiskinan ekstrem
- Pemberian makanan penunjang gizi agar lebih baik pada anak dalam rangka penurunan jumlah stunting
- Melakukan kajian dan melakukan aksi langsung untuk menanggulangi banjir pada kawasan rawan banjir
- Peningkatan pendapatan per kapita yang akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan mendorong pelaku UMKM untuk berinovasi (pemanfaatan hasil laut) dengan konsep pemberdayaan masyarakat berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah

4.3.7. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Dalam optimalisasi potensi daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk lebih proaktif dalam mengembangkan inovasi kebijakan dengan orientasi penciptaan keunggulan daya saing yang berkelanjutan dalam menggali potensi daerah yang dimiliki melalui strategi yang didukung oleh inovasi kebijakan yang mampu meningkatkan pertumbuhan pembangunan dengan mengedepankan riset dan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa inovasi menjadi salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pereturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, maka untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SiDA) sebagai landasan kinerja pembangunan melalui penciptaan dan penguatan sinergitas antar pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi dan segenap pemangku kepentingan terkait dalam pendayagunaan ilmu pengetahuan/teknologi dan inovasi dalam pembangunan daerah.

Pentingnya inovasi daerah dalam kebijakan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat ini telah berupaya melakukan penguatan inovasi daerah dalam berbagai bentuk inovasi daerah seperti inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi yang

terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti pelayanan administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan dengan tujuan memberikan kemudahan kepengurusan administrasi kependudukan, menghemat waktu, tenaga dan biaya serta mencegah terjadinya pungli melalui inovasi pelayanan Sipengantin Ditempat Ibadah (Siap Pelayanan penGurusan Akta perkawinAN Terintegritas) di tempat ibadah. Yaitu Layanan Jemput Bola (JEBOL) Pencatatan akta perkawinan di Tempat Ibadah dengan layanan terintegritas (5 in 1) Urus satu dokumen dapat lima dokumen Adminduk (Akta perkawinan, Kartu Keluarga kedua orang tua, Kartu Keluarga yang baru membentuk rumah tangga yang baru dan KTP-el kedua mempelai status kawin.

JEMPOL PAK KADESKU DI TAPTENG dengan pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat antara lain perekaman KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran , perkawinan, kematian, perceraian dan Kartu Identitas Anak, Registrasi KTP Digital, Identitas Kependudukan Digital, pendataan korban banjir, longsor dan layanan khusus disabilitas, orang dalam gangguan jiwa dan Lansia atau berkebutuhan khusus lainnya.

Gambar 4.3
INOVASI Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Masih terkait dengan penguatan inovasi daerah BAPPEDA melakukan kerjasama dengan Akademisi untuk melakukan berbagai hal terkait penguatan dan pengembangan inovasi, dan juga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui instansi terkait yaitu BAPPEDA secara rutin melaporkan penyelenggaraan inovasi daerah melalui Aplikasi SiDA yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan terlebih dahulu sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait yang melakukan inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mengumpulkan data inovasi daerah dari masing masing Organisasi Perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah yang selanjutnya mengisi pelaporan secara elektronik.

Gambar 4. 4
Rapat dengan Akademisi terkait Pelaksanaan dan Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Tapanuli Tengah

4.3.6. Penurunan Angka Stunting

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan stunting hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Tapanuli Tengah melalui. Pemerintah Provinsi Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyusun berbagai kegiatan lintas sektor dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah diantaranya yaitu dalam melakukan perbaikan gizi kepada ibu hamil dan balita dilaksanakan oleh BKKBN, peningkatan kualitas sanitasi, penyediaan jamban, peningkatan kualitas air minum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peningkatan keikutsertaan ber-KB, Edukasi pemahaman stunting pada remaja di SMA/SMK dan konsultasi calon pengantin dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dalam mendukung perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi percepatan penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tapanuli Tengah. Adapun peran Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Penurunan Stunting yaitu :

1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;
3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting Kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan behavior change communication (BCC);
4. Mengalokasikan anggaran APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting
5. Membuat Program Sumbangan Sukarela Bapak Asuh Stunting
6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar Kecamatan
7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan
8. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting;
9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja Kecamatan dalam penurunan stunting;

Dukungan OPD Terhadap Penurunan Stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah

No.	Dinas	Kegiatan
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), Tenaga Ahli	✓ Memonitor dan Memastikan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada diwilayah kerjannya untuk menjadi sasaran.

	Satgas, BKKBN	✓ Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin (calon pengantin) datang ke Posyandu. ✓ Memonitor partisipasi TPPS Kecamatan dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. ✓ Memonitor partisipasi TPK dalam kegiatan pengukuran dan intervensi serentak. ✓ Memonitor kemajuan capaian target sasaran didampingi, balita dan ibuhamil yang ditimbang dan diukur, balita dan ibu hamil yang menjalani rujukan dan mendapatkan intervensi. ✓ Menginstruksikan TPPS Kecamatan untuk melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan. ✓ Melaporkan kegiatan Intervensi pencegahan stunting kepada pimpinan secara berjenjang dan memfasilitasi bilamana ada masalah sesuai dgn kewenangannya.
2.	Dinas Kesehatan	✓ Memastikan dan melaksanakan pendataan seluruh ibu hamil, balita dan catin yang ada diwilayah kerjanya untuk menjadi sasaran. ✓ Memastikan kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu. ✓ Memastikan antropometri terstan dan telah tersedia dan terkalibrasi di semua Posyandu. ✓ Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstan dan dan pemberian edukasi pencegahan stunting. ✓ Memastikan pemberian gizi dan makanan tambahan pada sasaran yang tepat. ✓ Memastikan kemajuan perbaikan status gizi sasaran yang sudah mendapat intervensi.
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	✓ Memonitor pengalokasian APBDes untuk mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu. ✓ Memastikan peran aktif Kepala Desa ntk mendorong kehadiran ibu hamil, balita dan catin datang ke Posyandu.

		✓ Memastikan penyaluran Makanan Tambahan bagi Balita dan Ibu Hamil yg bersumber dari Dana Desa ✓ Memonitor komitmen Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan pengukuran dan intervensi serentak. ✓ Memfasilitasi bila masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan pengukuran dan intervensi sesuai kewenangan ✓ Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan kepada ketua TPPS secara berjenjang.
4.	Dinas Pendidikan	Memonitor laporan kemajuan jumlah balita diSatuan PAUD/TK/RA yang telah menjadi sasaran penimbangan pengukuran.
5.	Camat Se- Kabupaten Tapanuli Tengah	✓ Berperan Aktif dalam Mendorong pelaksanaan intervensi serentak dlm Penanggulangan Stunting di tingkat kecamatan dgn meningkatkan kordinasikan dengan stakeholder yg ada dikecamatan, bersama TNI dan Polri serta Petugas Ppl KB, Puskesmas, Kepala Desa/Lurah hingga Kadus/Dusun. ✓Melaksanakan pendampingan bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam melakukan Pembinaan kepada Calon Pengantin (Catin). ✓ Melaporkan kepada Pimpinan atas kegiatan penanggulangan Stunting tingkat kecamatan secara Berkala.

4.3.7. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus lebih bekerja keras untuk tetap bisa menekan angka kemiskinan di Tapanuli Tengah. Perhatian yang serius terhadap percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan membentuk Tim Koordonasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 265/BPTT/2023 tentang pembentukan TKPK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2025. TKPK Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan tugas penyelenggaraan fungsi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) serta Rencana Aksi Tahunan (RAT). Berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2020 bahwasanya Strategi dan Program

Penanggulangan Kemiskinan yang tertuang dalam RPKD dan RAT mengacu kepada Strategi Kebijakan Nasional penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini juga menjadi acuan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan/kemiskinan ekstrem daerah dengan arah kebijakan:

1. Masyarakat Rentan Miskin

Masyarakat Rentan miskian merupakan kelompok masyarakat yang pendapatannya di atas garis kemiskinan namun tidak mencapai kategori kelas menengah. Kelompok ini bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan hanya menggerus pendapatan mereka namun bisa mengubah status mereka dari rentan miskin menjadi miskin. Berdasarkan data P3KE terdapat 5.258.079 jiwa yang dapat dikatagorikan sebagai penduduk Rentan Miskin.

Beberapa program/kegiatan pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin dapat melalui mekanisme pemberian bantuan sosial (bansos) dan insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBD) yang harus fokus pada kelompok masyarakat rentan/vulnerable group. Namun kendala masalah terkait data penerima manfaat yang kurang valid selalu masalah klasik yang berulang untuk segera diselesaikan. Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka penanganan masyarakat rentan miskin adalah melalui pemberdayaan Masyarakat Rentan Miskin yang dapat dilaksanakan melalui:

a) Pengembangan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah, dengan Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi;
b) Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Terlantar dalam Panti, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya didalam Panti;
c) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah serta kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri;

d) Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.

2) Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO)

Konsep Program/kegiatan integrasi Masyarakat Miskin Produktif (MAPRO) Adalah konsep penanggulangan kemiskinan daerah yang bersifat inklusif dengan melibatkan lintas OPD Kabupaten Tapanuli Tengah yang berorientasi pada implementasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Latar belakang pelaksanaan kegiatan ini adalah tingginya tingkat kemiskinan yang tidak memiliki pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sulitnya masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan karena kesulitan berwirausaha dan memperoleh pekerjaan. Untuk itu diciptakanlah suatu kegiatan sebagai solusinya pemecahan masalah tersebut yaitu dengan peningkatan wirausaha dan pelatihan skill pada kelompok masyarakat miskin.

Tujuannya adalah untuk menciptakan wirausaha dan meningkatkan peluang memperoleh pekerjaan bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga diperoleh manfaat berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat miskin. Dalam strategi pelaksanaan penurunan angka kemiskinan/kemiskinan ekstrem mempedomani Tagging Program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam aplikasi SIPD (Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun2021). Penanganan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah yang menangani dan dilaksanakan dengan menerapkan pola pendampingan, kemitraan dan keberlanjutan sesuai dengan kewenangan daerah. Salah satu intervensi akses pasar adalah melalui pemasaran produk hasil usaha Kabupaten Tapanuli Tengah, dan dapat juga dilaksanakan pemasaran melalui e-commerce dan platform lainnya yang dimiliki oleh perangkat daerah terkait. Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara juga menyusun kerangka Identifikasi Resiko penanggulangan kemiskinan, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Identifikasi Resiko yang memuat penyebab resiko dan dampak resiko;
2) Penentuan Status resiko yang memuat pedoman matriks Analisa resiko dan tabel level dampak resiko;
3) Penilaian resiko yang memuat pernyataan resiko yang dinilai berdasarkan level kemungkinan, level dampak dan Analisa status resiko dan skala kemungkinan, skala dampak dan skala status resiko, status resiko serta level resiko;
4) Respon resiko yang memuat deskripsi resiko dan penanganan resiko

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Persentase Penduduk Miskin

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (x .000 jiwa)	53.05	48.53	46.99	47.19	49.95	47.07	47.09
Persentase Kemiskinan (%)	14.66	13.17	12.53	12.38	12.67	11.71	11.50
Garis Kemiskinan (Rp.)	367,687	369,471	376,474	406,646	429,050	450,940	489.760

DESA/KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING

No	Uraian data	Penetapan Tahun Lokus					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa Lokus yang ditetapkan	21	30	40	75	85	
2	Jumlah Kelurahan Lokus yang ditetapkan	1	4	9	15	19	
3	Jumlah Kecamatan Lokus yang ditetapkan	9	13	17	19	20	

PEMANFAATAN PENETAPAN DESA/KELURAHAN LOKUS :

1. Untuk Penajaman Sasaran Intervensi Penurunan Stunting Di Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Sebagai “Alarm” Terkait Dengan Kondisi Status Gizi Balita, Terutama Prevalensi Stunting
3. Data Dukung Dalam Pengusulan Kegiatan Terkait Cakupan Layanan Penurunan Stunting Yang Bersumber Apbn, Dak, Apbd Provinsi, Bkp Dan Lainnya

Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah individu dengan kemiskinan ekstrem yaitu dari 10.997 jiwa menjadi ± 7,850 jiwa, atau 2,73 % menjadi 1,92 %. Posisi tersebut masih diatas angka nasional yaitu 1,12 %

Persentase kemiskinan Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 11,50 % dari sebelumnya 11,71 % atau menjadi berjumlah ± 47.090 jiwa dari sebelumnya ± 47.070 jiwa. Pada tahun 2023, didapatkan sejumlah ± 7.850 jiwa dengan kemiskinan ekstrem dari ± 47.090 jiwa dengan kemiskinan dari 386.895 jiwa penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah (BPS 2023).

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran *(output)* kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), sasaran dari kegiatan, satuan, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun ke-3 (ketiga) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pembangunan sumberdaya manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan, maka dijabarkan pada urusan yang terdiri atas:

A. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**, yaitu :

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
5. RSUD.
6. Satpol PP.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Sosial.

B. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**, yaitu:

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Ketahanan Pangan.
3. Lingkungan Hidup.
4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Perhubungan.

8. Komunikasi dan Informatika.
9. Koperasi dan UKM.
10. Perizinan.
11. Kepemudaan dan Olahraga.
12. Perpustakaan.
13. Tenaga Kerja.

C. **Urusan Pilihan**, yaitu:
1. Kelautan dan Perikanan.
2. Pariwisata.
3. Pertanian.
4. Perindustrian dan Perdagangan.

D. **Pendukung Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Sekretariat Dewan.
2. Sekretariat Daerah.

E. **Penunjang Urusan Pemerintahan**, yaitu:
1. Badan Perencana Pembangunan Daerah.
2. BPKPAD.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. **Pengawasan**, yaitu:
1. Inspektorat.

G. **Kewilayahan**, yaitu meliputi 20 Kecamatan.

H. **Pemerintahan Umum,** yaitu :
1. Bakesbang.

Konsistensi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah antara RPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 ditunjukkan dari tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Konsistensi Tujuan dan Sasaran
RPD Tahun Pelaksanaan 2025 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

NO.	RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025				RKPD TAHUN 2025				KETERANGAN
	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**-**	**57,67 (CC)**	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**-**	**57,67 (CC)**	**-**
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	51,00 (CC)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	-	51,00 (CC)	-
		Indeks MCP (*Monitoring Center for Prevention*)	-	86,7		Indeks MCP (*Monitoring Center for Prevention*)	-	86,7	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	65.634		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	65.634	-
	Meningkatnya Kkualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	62,50 (C)	Meningkatnya Kkualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	62,50 (C)	-
2	**Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**-**	**71,11-71,51**	**Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Tapanuli Tengah**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**-**	**71,11-71,51**	**-**
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,732	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	-	0,732	-
		Prevalensi stunting	-	23,3		Prevalensi stunting	-	23,3	-

	meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,688	meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	-	0,688	-
3	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**10,33-11,33**	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**10,33-11,33**	**-**
	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,714	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Pengeluaran	-	0,714	-
		PDRB per Kapita	Juta Rp	34,31		PDRB per Kapita	Juta Rp	34,31	-
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,25	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja lokal	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,25	-
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,306	Meningkatnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	-	0,306	-
4	**Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**3,50-5,50**	**Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**3,50-5,50**	**-**
	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**%**	2,47	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	**%**	2,47	-
		LPE kategori industri pengolahan	**%**	4.783		LPE kategori industri pengolahan	**%**	4.783	-
	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	**%**	6,75	Meningkatnya kualitas kepariwisataan daerah	LPE Sektor Pariwisata (akomodasi dan makan minum)	**%**	6,75	-
	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	**-**	34,53	Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Indeks Infrastruktur	**-**	34,53	-
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,98	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,98	-
		Indeks Risiko Bencana	-	177,7		Indeks Risiko Bencana	-	177,7	-

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan.

6.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2026. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021-2025

No.	RPJMN				RPJMD Provinsi Sumatera Utara				RPD Kabupaten Tapanuli Tengah					
	Indikator	Target			Indikator	Target			Indikator	Target				
		2023	2024	2025		2023	2024	2025		2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	7,40	8,00		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,00-6,00	5,00-5,20	5,20-5,40	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,18	4,23	4,18-5,25	4,18-5,50	4,00-6,00
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,80	6,00	6,0-7,0	Tingkat Kemiskinan (%)	8,80-7,80	8,20-8,00	8,20 - 8,00	Tingkat Kemiskinan (%)	11,71	11,5	10,67-11,67	8,20-11,33	10,00-11,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,70	4,40	5,0	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,50-5,25	6,00-5,75	5,50-5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,9	7,81	6,50	5,50-6,25	6,00
4	IPM				IPM	72,50– 73,00	72,8-73,5	73,10 -73,40	IPM	70,31	72,77	70,74-71,14	72.77-73,17	71,49-71,89
5	Indeks Gini				Indeks Gini	0,309	0,324	0.322	Indeks Gini	0,2330	0,241	0,227	0,221	0,300
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)					

Tabel 6.2
TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025
Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Indikator Makro	Sasaran RPJMD/ RPD Provinsi	Sasaran RKPD 2025 Provinsi	Sasaran RKPD 2025 Kabupaten/ Kota
1	PDRB per Kapita (juta/tahun)	72.45	72,75 – 74,01	35.398.089,036 - 35.402.416,442
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0	19 - 19,5	11,61 - 11,796
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,2 - 8	7,46 - 6,96	10,205 - 9,531
4	Rasio gini (Indeks)	0,322	305 - 303	0,24 - 0,23
5	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0	5 - 5,12	1,216
6	Indeks Modal Manusia	0	0,54	74,00
7	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	2,3 - 2,5	58,77	20,00 – 22,74
8	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	30,16	1	1
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	0	41	31
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 - 5,4	5,2 - 5,5	4,33- 4,47
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0	27	20
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 5,2	5,2	7,65 – 7,49
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	0	58,8 - 62,8	68 - 70
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0	2,3 - 2,5	1,32 - 1,39
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)* (Ribu orang)	0	300.000 - 350.000	

16	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	0	0,35 - 0,43	
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	6	45
18	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0	22,8 - 23	
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (%)	0	11,26	
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	0	29 - 27	19 – 19,5
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH) (Kategori Baik)	0	70	
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,45	3,57	2,51
23	Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0	3,45	2,2
24	Indeks Integritas Nasional	0	66,78	66,78
25	Indeks Demokrasi Indonesia/Provinsi (Sedang)	78	82,59 - 85,83	
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0	1,2 - 1,5	0,381 - 0,477
27	Tingkat Inflasi (%)	2,75	1,75 - 3,75	
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	0	55,83 - 65,83	48,81 - 57,63
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0	0,41 - 0,39	0,41
30	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	0	850 - 1.050	405 - 501
31	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	0	7,35	7,54

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari IKU di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama pada pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023-2026 yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Tahun	Tahun Target
			2023	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	71,11-71,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,23	3,50-5,50
3	PDRB per Kapita		32.649	34,31
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,41	68,98
5	Indeks Infrastruktur	-	8,19	34,53
6	Tingkat Kemiskinan	%	11,50	10,33-11,33
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,81	6,25
8	Indeks Gini	-	0,241	0,306
9	Indeks Reformasi Birokrasi	-	45,90	57,67 (CC)
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	51,73	62,50 (C)

6.3 Indikator Kinerja Kunci

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan

indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Pada umumnya, indikator ini merupakan adalah indikator outcome yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan indikator kinerja kunci merupakan indikator kinerja menurut Permendagri 86 Tahun 2017 yang disempurnakan pada indikator urusan pelayanan umumnya melalui Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan indikator kinerja kunci daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.4
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun 2023	Target 2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
I.	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
1	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,77	71,11-71,51
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.23%	3,50-5,50
3	PDRB per Kapita		32,649	34,31

4	LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%		2,47
5	LPE kategori industri pengolahan	%		4,783
6	LPE Sektor Pariwisata	%		6,75
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	68,41	68,98
8	Indeks Risiko Bencana	-	187,85	177,70
9	Indeks Infrastruktur	-		34,53
10	Tingkat Kemiskinan	**%**	11.50	10,33-11,33
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.81	6,25
12	Indeks Pengeluaran	-		0,714
13	Indeks Gini	-	0.241	0,306
14	Indeks Reformasi Birokrasi	**-**		57,67 (CC)
15	Nilai SAKIP	-	40,19	51,00 (CC)
16	Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	51,08	86,7
17	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			65,634
18	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	-		62,50 (C)
19	Laju Inflasi	%	3,75	2
20	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Juta Ton CO2eq		3
21	Prevalensi stunting	%	23,8	23,3
II.	**Kesejahteraan Sosial**			
1	Indeks Pendidikan	-		0,732
2	Indeks Kesehatan	-		0,688
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	63,56%	87,59%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,98%	99,67%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,10%	87,76%

4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi daIarn pendidikan kesetaraan	%	0,79%	8,96%
b) Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.03	0,05%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	50,00%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	86	94,00%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	87	88,00%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92	90,00%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	62	91,00%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	38	83,00%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	46	80,00%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88	98,60%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	35	27,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	95	59,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	44	49,00%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	61	34,00%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	35	49,00%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	16%	25,00%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	73.54%	68,12%

3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	61.78%	68,14%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	43.75%	99,08%
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100%	88,92%
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	59.72%	66,62%
7	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100%	100,00%
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100%	100,00%
d) Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	0%	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0%	100,00%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	28,59%	78,39%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	16,65%	4%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	0,430%	8,72%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00 %	100,00%
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	75,00 %	85,00%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	500 Orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	500 Orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	1350 Orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00 %	100,00%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	15 menit	15 menit
f) Sosial				

1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (Indikator SPM)	%	100%	100,00%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100%	100,00%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
a) Tenaga Kerja				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	26,32%	58,00%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	%	0,50%	0,90%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27'52%	48,00%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,2%	4,4%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	2,8%	8,33%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11%	10,90%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	59,09	20,94
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,92	18,36
c) Pangan				
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%		2,20%
d) Pertanahan				
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0 %	100,00%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0 %	0%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0 %	0%
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	4,00 %	TIDAK ADA

5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0 %	100,00%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50 %	100,00%
e) Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%		74,56
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%		9,10%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%		77,50%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	perekaman KTP elektronik	%	91,46%	100,00%
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	30,45%	44,00%
3	kepemilikan akta kelahiran	%	49,04%	100,00%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	15,15%	36,49%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	57,86%	49,05%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	42,14%	50,59%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,74	1,91%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	58,18%	74,40%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,40%	16,66%
i) Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	%	56%	66%
2	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	%	46%	51%
j) Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	6,25	28,00%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	33,33	98%

3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	54,00	64%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	50,4%	20%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	65%	100,00%
l) Penanaman Modal				
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	148,53%	19%
m) Kepemudaan dan Olahraga				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,79	2%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	2,12	7%
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	-	2 Medali
n) Statistik				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100,00%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	98,00%
o) Persandian				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	45	20%
p) Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100%	100,00%
q) Perpustakaan				
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%		45,50%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-		33,00
r) Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%		4,38%
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%		1,73%
Urusan Pilihan				
a) Kelautan dan Perikanan				

1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	42.307	1.400,00 Ton
b) Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%		36
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%		7,5%
3	Tingkat hunian akomodasi	%		58,37%
4	Kontribusi sektor pariwisata Lerhadap PDRB harga berlaku	%	10,25%	0,87%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	35,38%	3,0%
c) Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	7,24%	2,53
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-100%	100,00%
d) Kehutanan				
e) Energi dan Sumber Daya Mineral				
f) Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	0,92%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	81%	100,00%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	45,81%	22,38%
g) Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	3,13%	13,33%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	37,5%	47,5%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100,00%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0%	78,0%

5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0%	100,00%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100%	99,00%
h) Transmigrasi				
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan				
a) Perencanaan dan Keuangan				
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13%	14,57%
2	Rasio PAD	%	7%	10,50%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2,7	Level 3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 1	Level 3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	83%	32,5%
6	Opini Laporan Keuangan	-	WDP	WTP
b) Pengadaan				
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	40%
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	61,00	55,0%
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	27,74	38,25%
c) Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75%	446%
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12%	64%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,17	2,0%
d) Manajemen Keuangan				
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	6%	12%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalamAPBD	%	14%	28,5%
3	Manajemen Aset	-	ADA	ADA
	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	

	2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	
	3. Apakah ada proses invcntarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Tidak	
	4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva	%	6%	6,00%
e) Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia unluk pelayanan	%		100,00%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%		100,00%
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
I.	**Kemampuan Ekonomi Daerah**			
1	Pangan			
1.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp		1.050.000
1.02	Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	Rp		440.000
2	Pertanian			
2.01	Nilai Tukar Petani (Pendekatan angka Provinsi)	-	127,81	101,00
II	**Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**			
1	ESDM			
1.01	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	N/A	89,05
1.02	Persentase penduduk yang mengakses internet	%	N/A	66,58
III	**Iklim Berinvestasi**			
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
1.01	Angka kriminalitas (crime rate)	%		45,00
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
2.01	Nilai Indeks Desa Membangun	-	0,5842 (Tertinggal	0,5947 (Tertinggal)
IV	**Sumber Daya Manusia**			
1	Ketenagakerjaan			
1.02	Persentase penduduk berpendidikan tinggi	%	11,33%	11,00

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 merupakan tahapan akhir penyusunan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 yang memuat rencana kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025, rancangan kerangka ekonomi daerah, beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 serta rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sepanjang Tahun 2025. RKPD menjadi dasar dan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2025.

RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2026. RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 menjadi pedoman dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen RPD dan menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam RPD Tahun 2023-2026. Pencapaian RKPD memerlukan sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025

RKPD Tahun 2025 ini disusun untuk persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dalam rangka menyepakati antara lain permasalahan pembangunan daerah; prioritas pembangunan daerah; arah kebijakan pembangunan; program dan kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Keterlibatan dan komitmen seluruh Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang telah disusun dalam dokumen RKPD Tahun 2025 menjadi hal yang penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

SUGENG RIYANTA